

TRANSFORMASI PENDIDIKAN
————— PADA —————
MASA PASCAPANDEMI

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
-

TRANSFORMASI PENDIDIKAN
————— PADA —————
MASA PASCAPANDEMI

Subyantoro, dkk.

Cipta Prima Nusantara
2023

Transformasi Pendidikan pada Masa Pascapandemi

Copyright © Penulis

Penulis : Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum., Prabawati Nurhabibah, Hetilaniar,
Meina Febriani, Imaniah Kusuma Rahayu, Rizky Widia Kardika,
Qurrota Ayu Neina, Prasetyo Yuli Kurniawan, Mei Fita Asri Untari,
Zainal Arifin, Uki Hares Yulianti, Hayatun Nufus
Editor : Meina Febriani
Tata letak : Lha Heksa

Diterbitkan oleh
Penerbit Cipta Prima Nusantara
Cetakan 1, Mei 2023
x+ 262 hlm. 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-380-311-3 (PDF)

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa
seizin tertulis dari penerbit

Redaksi:
Penerbit Cipta Prima Nusantara
Green Village Kavling 115, Ngijo, Gunungpati
Semarang, Jawa Tengah 50228
Email: ciptaprimanusantara@gmail.com
Web: <https://penerbitciprinus.com/>

PRAKATA

Puji Syukur kehadirat Allah Swt., atas lahirnya sebuah buku referensi yang berisi tentang transformasi pendidikan pada masa pascapandemi. Topik itu hadir sebagai upaya untuk menjelajahi perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan seiring dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia secara luas. Pandemi COVID-19 telah menghadirkan tantangan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Sistem pendidikan menjadi salah satu sektor yang terdampak paling signifikan. Pembatasan fisik, penutupan sekolah, dan pembatasan interaksi sosial telah memaksa kita untuk mencari solusi inovatif dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.

Buku ini menggali secara mendalam transformasi yang terjadi pada pendidikan pada era pascapandemi. Penulis mengeksplorasi dampak pandemi terhadap pembelajaran daring, penyesuaian kurikulum, peran teknologi dalam pembelajaran, dan transformasi dalam pola pikir dan paradigma pendidikan. Dalam buku ini, pembaca akan menemukan pemikiran kritis dan analisis mendalam tentang berbagai aspek transformasi pendidikan pascapandemi.

Buku ini juga menawarkan wawasan tentang peluang dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan transformasi pendidikan. Penulis memaparkan pandangan yang inklusif, berfokus pada keadilan pendidikan, kesetaraan akses, dan pemenuhan kebutuhan siswa yang beragam. Dalam proses menyusun buku ini, penulis ingin memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan yang terjadi di dunia pendidikan pascapandemi. Penulis berharap buku ini dapat menjadi panduan dan sumber pengetahuan yang berharga bagi para praktisi pendidikan, pengambil keputusan, dan siapa pun yang tertarik dalam memahami dinamika pendidikan saat ini.

Wajah pendidikan pascapandemi bergantung pada setiap pundak masyarakat Indonesia. Setiap individu harus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itulah, mahasiswa S3 Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa Pascasarjana UNNES, menyumbangkan gagasan tulisnya dalam bentuk artikel dengan tema besar “Manajemen Pendidikan Pascapandemi Covid-19”. Laksana embun di padang pasir, semoga buku ini setidaknya sedikit bisa memberi sumbangan bagi pendidikan di Indonesia.

Akhirnya, penulis berharap buku ini dapat memberikan sumbangsih positif bagi pembaruan pendidikan dan mendorong diskusi yang konstruktif tentang transformasi pendidikan pada masa pascapandemi. Penulis berharap agar buku ini dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Terima kasih dan selamat menikmati bacaan yang bermanfaat ini.

Salam hangat,

Penulis

DAFTAR ISI

Pakata — iii
Daftar Isi — v

BAB 1 : MANAJEMEN BAHASA PASCAPANDEMI — 1

Wajah Pendidikan Kita Pascapandemi — 3
Subyantoro

Menggiatkan Gerakan Literasi Sekolah Pasca Pandemi — 8
Prabawati Nurhabibah

Pembelajaran SD Pasca Pandemi — 11
Hetilaniar

Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dalam Jaringan (BIPA Daring): Ekstensifikasi Bahasa Indonesia Pascapandemi — 17
Meina Febriani

Pembelajaran BI Pascapandemi Covid 19 — 21
Imaniah Kusuma Rahayu

Tranformasi Kualitas Manajemen Pendidikan Pascapandemi — 25
Rizky widia kardika

Manajemen Pembelajaran Mahasiswa PPG Pascapandemi — 28
Hayatun Nufus

Manajemen Pendidikan Informal melalui Gerakan Literasi Keluarga— 31
Qurrota Ayu Neina

Penguatan Pembelajaran Bahasa Indonesia Pascapandemi — 36

Prasetyo Yuli Kurniawan

Sekolah Unggul melalui Manajemen Berbasis Sekolah: Strategi

Manajemen Pascapandemi — 38

Mei Fita Asri Untari

Learning loss? Yap, tapi Jangan Hiperbolik — 44

Zainal Arifin

Pembelajaran Bahasa Indonesia Pascapandemi *Covid-19* — 48

Uki Hares Yulianti

BAB 2 : MANAJEMEN PESERTA DIDIK — 53

Manajemen Peserta Didik Berbasis Kesehatan Mental bagi Remaja

— 55

Prabawati Nurhabibah

Supervisi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru — 58

Hetilaniar

Formula Pendidikan Generasi Alfa — 61

Meina Febriani

Mengelola Kecerdasan pada Anak — 66

Imaniah Kusuma Rahayu

Manajemen Peserta Didik sebagai Strategi Meningkatkan Mutu

Lulusan — 70

Rizky Widia Kardika

Perpustakaan digital memotivasi siswa berliterasi — 73

Hayatun Nufus

Internalisasi Pendidikan Moral Peserta Didik secara Komprehensif

— 79

Qurrota Ayu Neina

Manajemen Peserta Didik melalui Pengembangan Kegiatan

Akademik dan Non Akademik — 83

Prasetyo Yuli Kurniawan

- Manajemen Stress Peserta Didik: Peralihan Pembelajaran *New Normal* — 86
Mei Fita Asri Untari
- Manajemen Peserta Didik dalam Kacamata Althusserian — 92
Zainal Arifin
- Manajemen Peserta Didik melalui Pengembangan *Soft Skill* Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila — 96
Uki Hares Yulianti

BAB 3 : MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN — 101

- Menjadi Guru Metal (Melek Digital) — 103
Prabawati Nurhabibah
- Peran Manajemen Peserta Didik dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik — 106
Hetilaniar
- Siapa Ingin menjadi Guru? — 110
Meina Febriani
- Kurangnya Guru di Daerah Terpencil — 115
Imaniah Kusuma Rahayu
- Revolusi Guru dari Masa ke Masa — 117
Rizky Widia Kardika
- Meningkatkan Kompetensi Guru melalui PPG — 120
Hayatun Nufus
- Reformasi Birokrasi Tata Kelola Penerimaan Tenaga pendidik Indonesia — 124
Qurrota Ayu Neina
- Guru profesional melalui Transformasi Digital — 128
Prasetyo Yuli Kurniawan
- Hadapi Kurikulum Merdeka: Guru Berbekal Literasi Digital — 130
Mei Fita Asri Untari

Kekurangan Guru, Sebuah Kecerobohan Sistemik —135

Zainal Arifin

Pelatihan Pembelajaran Digitalisasi bagi Guru —139

Uki Hares Yulianti

BAB 4 : MANAJEMEN KURIKULUM — 143

Urgensi Pembelajaran Sastra dalam Kurikulum Merdeka —145

Prabawati Nurhabibah

Kurikulum Merdeka, Akankah Merdeka? —150

Hetilianiar

Nasib Pendidikan Sastra —153

Meina Febriani

Pembelajaran Bahasa Indonesia Berorientasi Ekonomi Kreatif —158

Imaniah Kusuma Rahayu

Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Abad 21 —160

Rizky Widia Kardika

Mata Pelajaran Bahasa (dan Sastra) Indonesia dalam Kurikulum Merdeka —164

Hayatun Nufus

Mengembalikan Porsi Sastra dalam Kurikulum melalui Program Sastrawan Masuk Sekolah —170

Qurrota Ayu Neina

Kedudukan Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum Merdeka —174

Prasetyo Yuli Kurniawan

Manajemen Kurikulum pada Masa Transisi dari PAUD ke SD Pascapandemi —177

Mei Fita Asri Untari

Kurikulum *copas* Untuk (Mimpi) Pendidikan yang Hebat —1182

Zainal Arifin

Project Based Learning, Inovasi Model Pembelajaran Merdeka Belajar —186

Uki Hares Yulianti

BAB 5: MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA — 189

Benahi Kualitas Pendidikan di Indonesia melalui Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Layak dan Memadai — 191

Prabawati Nurhabibah

Pembelajaran Berbasis Digital: Peluang dan Tantangan — 194

Hetilaran

Laboratorium Bahasa, Pentingkah? — 198

Meina Febriani

Minimnya Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kawasan Perbatasan — 202

Imaniah Kusuma Rahayu

Keterbatasan Bukan Alasan untuk Tak Belajar — 205

Rizky Widia Kardika

Sarana dan Prasarana Penentu Mutu Pendidikan — 208

Hayatun Nufus

Media Kontekstual dalam Ranah Pembelajaran — 212

Qurrota Ayu Neina

Pentingnya Sarana dan Prasarana dalam Mencapai Tujuan Pendidikan — 215

Prasetyo Yuli Kurniawan

Peran serta Masyarakat dalam Manajemen Sarana dan Prasarana — 217

Mei Fita Asri Untari

Kurikulum Merdeka dan ‘Infrastruktur Langit’ — 221

Zainal Arifin

Sarana dan Prasarana Pembelajaran Digital pada Kurikulum Merdeka — 224

Uki Hares Yulianti

BAB 6: MANAJEMEN KEUANGAN DAN KEPEMIMPINAN — 227

Krisis Kepemimpinan pada Perguruan Tinggi di Indonesia — 229

Prabawati Nurhabibah

Pengelola Keuangan Berbasis Teknologi —234

Hetilaran

Gerakan Alumni Peduli — 238

Meina Febriani

Peran Kepala Sekolah sebagai Manajer Sekolah —241

Imaniah Kusuma Rahayu

Dunia Pendidikan Perlu Pemimpin yang Bertumbuh —243

Rizky Widia Kardika

Kepemimpinan Transformasional Pendidik, Meningkatkan Percaya Diri Siswa —245

Hayatun Nufus

Kecerdasan Emosional dan Spiritual dalam Kepemimpinan —248

Qurrota Ayu Neina

Pemimpin yang Amanah dan Tanggung Jawab dalam Dunia Pendidikan —251

Prasetyo Yuli Kurniawan

Kepemimpinan yang Baik dalam Manajemen Keuangan Sekolah —253

Mei Fita Asri Untari

Kebijakan Pemimpin yang ‘Manut sama Juragannya’ — 257

Zainal Arifin

Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah pada Kurikulum Merdeka Belajar —260

Uki Hares Yulianti

BAB 1

**MANAJEMEN PENDIDIKAN BAHASA
PASCAPANDEMI**

WAJAH PENDIDIKAN KITA PASCAPANDEMI

Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum.

Kasus covid-19 terdeteksi di Indonesia mulai tanggal 2 Maret 2020 ketika dua orang dikonfirmasi tertular dari Seorang warga negara Jepang hingga Januari 2021 Indonesia telah melaporkan lebih dari 10000 orang terjangkit virus ini. Berbagai problematika muncul beriringan dengan semakin merebaknya virus ini segala daya dan upaya telah dilakukan pemerintah guna memperkecil kasus penyebaran covid ini tak dipungkiri dampak dari virus ini yakni dalam bidang pendidikan. Harapannya dengan penelitian ini dapat dijadikan refleksi dan dan pemahaman terkait virus Corona yang menjadi dampak dari wajah pendidikan Indonesia dan juga menimbulkan berbagai problematika yang ada.

Di Indonesia banyak keluarga yang kurang setuju melakukan sekolah di rumah. Bersekolah di rumah bagi keluarga Indonesia adalah kejutan besar khususnya bagi produktivitas orang tua yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah. Demikian juga dengan problem psikologis peserta didik-peserta didik peserta didik yang terbiasa belajar bertatap muka langsung dengan pendidik-pendidik mereka. Seluruh elemen pendidikan secara kehidupan sosial “terpapar” sakit karena covid-19. Pelaksanaan pengajaran berlangsung dengan cara online. Proses ini berjalan pada skala yang belum pernah terukur dan teruji sebab belum pernah terjadi sebelumnya.

Kebijakan belajar di rumah pada institusi pendidikan jelas menyebabkan gangguan besar, seperti pembelajaran peserta didik, gangguan dalam penilaian, pembatalan penilaian, peluang

mendapatkan pekerjaan setelah lulus pendidikan, pembatalan penilaian publik untuk kualifikasi dalam seleksi pekerjaan. Bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia melakukan yang terbaik untuk penanganan ini? Sekolah memerlukan sumber daya untuk membangun kembali kehilangan dalam pembelajaran, ketika mereka kembali membuka aktivitas pembelajaran. Rekoveri untuk pemulihan ini harus dilakukan secara cepat dan tepat dengan pengalokasian anggaran dari pemerintah untuk pendidikan. Pemangkasan birokrasi pendidikan harus segera dijalankan untuk menangani dampak Covid-19 ini bagi dunia pendidikan. Kebijakan penting yang harus dilakukan oleh menteri pendidikan adalah merekoveri penilaian untuk pembelajaran, bukan menghilangkan, disebabkan pentingnya faktor penilaian bagi peserta didik, sehingga kebijakan yang lebih baik adalah menunda penilaian bukan melewatkan penilaian internal sekolah. Bagi lulusan baru, kebijakan harus mendukung masuknya para lulusan (fresh graduet) ke pasar kerja untuk menghindari periode pengangguran yang lebih lama. Kementerian pendidikan harus berkoordinasi dengan menteri terkait agar lapangan kerja padat karya kembali dibuka dan disegarkan.

Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa, dimasa mendatang dan masa yang akan datang akan sangat ditentukan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa itu sendiri. Generasi muda yang berkualitas dihasilkan dari adanya sistem pendidikan yang berkualitas pula, pada peserta didik usia pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah usia emas yang perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang disediakan pemerintah human capital dan investasi pembangunan SDM merupakan keniscayaan bagi suatu bangsa dan suatu daerah investasi pembangunan SDM adalah suatu upaya sangat penting dalam mempersiapkan generasi emas untuk kesejahteraan dan kemajuan suatu bangsa yang memiliki peradaban tinggi.

Menurunya kasus Covid-19 di Indonesia saat ini, memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia. Salah satu kebijakan tersebut, mulai

diberlakukannya kegiatan pembelajaran tatap muka (luring). Berubahnya kebijakan pendidikan dari awal sebelum pandemi dilakukan secara luring. Kemudian berubah menjadi daring dan kembali luring tentu memberikan efek terhadap pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik.

Culture Shock terhadap proses pembelajaran yang berubah-ubah mengakibatkan adanya penurunan kualitas pendidikan yang diakibatkan rasa stres peserta didik, akibat perubahan yang terlalu cepat dalam sistem pembelajaran saat ini.

Untuk mengatasi hal tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan terkait sistem pendidikan beserta strategi manajemen dalam bidang pendidikan. Dengan adanya strategi perencanaan yang matang, diharapkan tercipta sistem pendidikan yang lebih terarah pada penentuan skala prioritas teknik dan instrumen pendidikan yang tepat bagi peserta didik yang akan dilakukan pada masa pascapandemi Covid-19.

Manajemen sendiri merupakan proses yang dilaksanakannya oleh kepala manajemen dalam sekolah yaitu kepala sekolah, agar dapat mencapai secara efektif dan efisien tujuan dari sekolah tersebut. Aktifitas manajerial yang berlangsung dalam sekolah tentu diperlukan keberadaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun fisik yang dipadukan untuk mencapai visi dari lembaga pendidikan (Wahyudi, Fuadi, & Naim, 2020). Dengan bahasa lain bahwa manajemen pendidikan yakni ilmu dan seni dalam pengelolaan sumberdaya pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Manajemen memiliki beberapa fungsi yaitu fungsinya sebagai Perencanaan (*Planning*), kemudian dalam hal Pengorganisasian (*Organizing*), untuk dapat menjadi Penggerak (*Actuating*), dan fungsi sebagai Pengawasan (*Controlling*) (Usman, 2013). Penerapan fungsi manajemen tersebut bila dilaksanakannya dalam pelaksanaan pembelajaran oleh pendidik akan dapat mencapai hasil yang maksimal di tengah berbagai keterbatasan dan

kendala yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniati dan Prayoga dalam penelitiannya tentang Pengaruh Manajemen Perencanaan Pembelajaran Terhadap Kinerja Pendidik SMA Negeri di Kota Mataram, bahwa manajemen dalam pembelajaran memiliki peranan untuk kinerja pelayanan pendidik. Jika manajemen pembelajaran tidak direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik, maka mustahil program akan berhasil dengan baik (Yuniati & Prayoga, 2019). Sekolah sebagai satuan pendidikan merupakan lembaga pelayanan publik yang bertujuan untuk memanusiakan manusia (Idris & Tabrani, 2017). Pendidikan bersifat humanis merupakan sebuah realitas, sehingga fungsi utamanya yakni dalam mewujudkan pelayanan yang optimal di dunia pendidikan terutama dalam pelayanan prima (excellent service) seorang pendidik. Sehingga dalam penerapan manajemen satuan pendidikan mesti berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat dan pendidik sebagai ujung tombak pelayanan tersebut. Pelayanan prima sebagai bagian dari manajemen mutu, yakni sebuah pelayanan yang diberikan secara maksimal kepada pelanggan di sekolah yaitu orang tua dan peserta didik (Idris & Tabrani, 2017). Sehingga kehadiran lembaga pendidikan untuk terus dapat meningkatkan pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan di sekolah. Berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Disampaikan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan memiliki beberapa prinsip yaitu (1) sebagai kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna; (2) mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan; (3) sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; (4) memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; (5) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak

asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima (*excellent service*) dalam bidang pendidikan yang efisien dan efektif sangat diperlukan kehadiran seluruh elemen untuk bekerja sama antarberbagai pemangku kepentingan terlebih pada masa Covid-19 maupun pascapandemi Covid-19. Terkait dengan lima prinsip yang di atas, mengarahkan kepada lembaga pendidikan untuk dapat terjadi pendewasaan, sehingga dalam proses untuk pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang dihadapi, selalu disertai dengan rasa tanggung jawab yang besar. Untuk dapat melihat keberhasilan pembelajaran dalam dunia pendidikan, bahwa adanya salah satu komponen penting yang memengaruhi yaitu pendidik. Seperti halnya juga pelayanan prima di suatu perusahaan, bagi lembaga pendidikan tidak terlepas atas keaktifan dari pimpinan seorang kepala sekolah terutama seorang pemberilayanan tersebut yaitu pendidik. Pendidik merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai pendidik. Orang yang pandai bicara dalam bidang-bidang tertentu, belum tentu dapat disebut sebagai pendidik. Untuk menjadi seorang pendidik diperlukan syarat-syarat khusus. Pendidik yang professional harus menguasai betul seluk beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu.

Tugas dalam mendidik, mengajar, dan melatih merupakan tugas pendidik sebagai profesi yang mulia. Mengajar yakni pendidik sebagai penerus dan pengembang ilmu pengetahuan serta keterampilan-keterampilan peserta didik. Mendidik merupakan tugas pendidik untuk meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan. Sedangkan melatih sebagai seorang pendidik yakni mengasah kemampuan peserta didik yang telah diberikan dengan cara mendidik dan mengajar dalam tugasnya sebagai pendidik pada bidang kemanusiaan. Pendidik sebagai orang tua kedua pada saat di sekolah. Pendidik sebagai penarik simpati sehingga menjadi idola para peserta didiknya. Sehingga Pelajaran apapun yang diberikan,

hendaknya dapat menjadi motivasi bagi peserta didiknya (Afif & Kastamin, 2023). Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Ayat 2 Pasal 4 menyatakan bahwa pendidik dan dosen sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) adalah cerminan sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Pekerjaan besar pendidikan pascapandemi ini, tentunya harus melibatkan berbagai pihak pemangku kebijakan. Mulai dari pendidik sebagai praktisi pendidikan sampai pada kepala daerah yang bertanggung jawab terhadap berbagai kebijakan terkait situasi pandemi yang sedang terjadi. Sebagai seorang pendidik, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan saat ini kepada peserta didik adalah pendekatan individual yang fleksibel. Hal ini menjadi sangat penting, karena setiap peserta didik memiliki keunikan mereka masing-masing. Sehingga sebagai seorang pengajar, pendidik wajib memahami dan menyadari akan keunikan tersebut.

Pelayanan prima juga dapat dilakukan bagi peserta didik yang bermasalah oleh pendidik dalam berbagai cara untuk melayani perbedaan individual yang terjadi dalam proses pembelajaran di sekolah agar peserta didik memiliki minat dan termotivasi untuk belajar, terutama dalam pada masa pascapandemi Covid-19 yang mengharuskan peserta didik tidak hadir secara langsung di sekolah ataupun sebagian tatap muka dan sebagian lagi belajar dari rumah. Kemampuan yang berbeda serta situasi kondisi yang mengharuskan seorang pendidik untuk menerapkan manajemen dalam pembelajarannya dengan pelayanan yang prima sebagai upaya dalam program yang disesuaikan di pembelajaran yang akan dibuatkan dan dilaksanakannya oleh pendidik. Dengan adanya pelayanan prima dalam proses pembelajaran untuk dapat membuat individu merasa nyaman dalam pembelajaran yang diterima sehingga dapat memengaruhi minat belajar peserta didik.

Adalagi permasalahan pembelajaran yang peserta didik tidak bertemu langsung di kelas membuat penguasaan materi menjadi kurang maksimal. Hasilnya tentu saja tidak sedikit peserta didik yang

tidak mampu memahami materi yang disampaikan. Permasalahan lain yang muncul pada saat pascapandemi Covid-19 banyak para peserta didik yang menyepikan pembelajaran. Bahkan alih-alih serius dalam pembelajaran, para peserta didik banyak yang menganggap belajar online sebagai kegiatan mengisi waktu saat liburan. Pembelajaran bersama pendidik dianggap hanya sebagai mengisi waktu luang. Selain itu, dengan adanya pendidik yang memberikan tugas yang banyak. Sehingga peserta didik berpikir bahwa dalam pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 ke pascapandemi Covid 19, belajar hanya sebagai kegiatan mengerjakan tugas. Tentu hal itu sangat disayangkan.

Kemampuan dan kecepatan adaptasi masing-masing peserta didik tentu tidak sama, berkaitan dengan perubahan sistem pembelajaran yang cenderung berubah-ubah di masa pandemi ini. Sebagai seorang pengajar melatih kepekaan rasa sangatlah penting dilakukan. Hal tersebut dikarenakan objek yang sedang kita dekati adalah manusia yang tentunya memiliki pikiran, perasaan, dan insting mereka masing-masing. Tetapi, kita tidak boleh melupakan bahwa seorang pendidik itu juga manusia yang selain dituntut untuk dapat menjalankan tugas secara profesional.

Untuk itu, sinergi dari berbagai pihak sangatlah diperlukan. Di masa pascapandemi ini, hak untuk mendapatkan pendidikan yang merata merupakan hak dari seluruh peserta didik. Tetapi kewajiban penyediaan pendidikan tersebut haruslah ditanggung bersama. Selain itu, sebagai orang tua kita juga harus memberikan dukungan yang penuh kepada setiap pendidik demi terpenuhinya pendidikan yang baik bagi peserta didik di masa pandemi.

Wajah pendidikan pascapandemi bergantung pada setiap pundak masyarakat Indonesia. Setiap individu harus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

MENGGIATKAN GERAKAN LITERASI SEKOLAH PASCA PANDEMI

Prabawati Nurhabibah

L iterasi tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Pendidikan adalah proses pribadi untuk memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber. Keterampilan membaca dan menulis berperan dalam mencari dan menyerap pengetahuan tersebut. Dengan kemampuan membaca ini, seseorang memiliki pengetahuan yang luas dan kaya akan informasi. Hubungan antara keduanya dapat dilihat dalam proses belajar mengajar formal. Siswa dengan berbagai pengetahuan dan kekayaan informasi menunjukkan bahwa siswa tersebut memiliki literasi yang tinggi. Siswa dapat memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber, tidak hanya mengandalkan guru sebagai sumber belajar. Literasi mempengaruhi keterbukaan siswa untuk memperoleh pengetahuan dan memungkinkan siswa untuk memahami topik dari perspektif yang berbeda.

Adalah penting bahwa siswa memperoleh keterampilan literasi yang diperlukan untuk memahami teks-teks dari semua mata pelajaran secara analitis, kritis dan deliberatif. Pemahaman siswa terhadap isi suatu teks sangat erat kaitannya dengan minat baca siswa. Semakin siswa tidak memahami isi teks, semakin rendah minat membaca siswa. Namun, pada Maret 2016, Central Connecticut State University melakukan survei terhadap negara-negara paling boros di dunia, menempatkan Indonesia pada peringkat 60 dari 61 negara. Dalam membaca, Indonesia berada tepat di belakang Thailand (59) dan di depan Botswana (61). Dalam hal ketersediaan infrastruktur untuk kegiatan membaca,

peringkat Indonesia lebih tinggi dari negara-negara Eropa.

Berdasarkan data statistik UNESCO 2011, Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara dengan tingkat literasi rendah. Budaya membaca di Indonesia menempati peringkat terendah dengan skor 0,001. Artinya, dari sekitar 1.000 orang Indonesia, hanya satu yang memiliki budaya membaca yang tinggi (<https://en.unesco.org/>). Fakta ini juga didukung oleh hasil survei internasional International Student Assessment Program (PISA) 2015 tentang membaca di sekolah menengah, yang menempatkan siswa Indonesia di peringkat 68 dari 74 negara yang disurvei. (<http://www.oecd.org/pisa/>). *Program for International Student Assessment* (PISA) mengukur kemampuan siswa untuk menyerap teks, menafsirkan teks, memproses teks dan memberi mereka makna. Kemampuan membaca ini berkontribusi pada rendahnya pemahaman membaca orang Indonesia.

Baru-baru ini publik dihebohkan dengan rilis hasil PISA Indonesia 2018. Berdasarkan hasil survei ini, peringkat PISA Indonesia 2018 mengalami penurunan dibandingkan hasil PISA 2015. Anak usia 15 tahun dinilai setiap tiga tahun sekali di 79 negara. Studi ini membandingkan kinerja setiap anak dalam matematika, membaca, dan sains. Dalam kategori literasi, Indonesia menempati peringkat ke-6 dari bawah, yang juga dikenal dengan peringkat ke-74. Skor rata-rata Indonesia 371 berada di bawah skor rata-rata Panama 377. China menempati urutan pertama dengan skor rata-rata 555. Di tempat kedua adalah Singapura dan Makau dengan skor rata-rata 549. Sementara itu, Finlandia yang sering disebut-sebut sebagai model sistem pendidikan, menempati urutan ke-7 dengan skor rata-rata 520.

Penurunan hasil ini menuai kritik dari beberapa pihak. Pemerintah diminta mengkaji dan memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. Padahal, pada tahun 2016 lalu, Kemendikbud meminta seluruh sekolah di Indonesia untuk

menyelenggarakan kegiatan literasi sekolah mulai dari tingkat SD-SMA/K. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan angka melek huruf warga negara Indonesia, khususnya pelajar. Pada Juli 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Iptek No. 23 Tahun 2015 tentang Pembinaan Karakter. Salah satu poin penting dari aturan tersebut adalah siswa wajib membaca buku non-buku pelajaran selama 15 menit setiap hari di sekolah sebelum kelas dimulai. Berdasarkan amanat tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) mencanangkan program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) bagi siswa semua jenjang pendidikan. Hal ini menyebabkan pengenalan program GLS di sekolah-sekolah di berbagai daerah termasuk tingkat sekolah menengah pertama. Menurut pedoman GLS Realschule, kegiatan GLS mencakup tahap pengenalan, pengembangan, dan pembelajaran. Ketiga tahapan tersebut memiliki aktivitas yang berbeda namun berkelanjutan. Namun hasil dari kegiatan GLS tersebut masih kecil dan kurang optimal karena kegiatan yang dilakukan di beberapa sekolah menengah hanya sebatas 15 menit membaca dan meringkas.

Dari sudut pandang ontologis, literasi berakar pada kerangka bahasa dan sastra yang lebih luas. Padahal, keterampilan membaca dan menulis siswa diajarkan sambil belajar bahasa Indonesia. Sebagian besar warga sekolah menganggap GLS sebagai program wajib bagi guru Indonesia. Padahal, GLS merupakan program wajib bagi seluruh warga sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk menumbuhkan gerakan literasi sekolah masih kurang. Meskipun GLS telah diterapkan selama tiga hingga empat tahun terakhir, hasil tes PISA terus menunjukkan hasil yang buruk, sehingga penting untuk mempertimbangkan masalah literasi dan upaya literasi sekolah secara lebih rinci.

PEMBELAJARAN SD PASCA PANDEMI

Hetilaniar

Berbagai aspek kehidupan manusia telah terkena dampak dari wabah Covid-19. Misalnya, dalam rangka pendidikan, kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke rumah masing-masing. Pembelajaran online telah menggantikan instruksi kelas dalam proses pembelajaran. Sekolah harus menyusun strategi yang jelas untuk menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar. Respon setiap satuan pendidikan terhadap transformasi fundamental yang terjadi cukup cepat ini berbeda-beda. Keterampilan sosial anak yang belum terfasilitasi selama wabah harus dilatih melalui pembelajaran tatap muka di sekolah dan kegiatan pasca pandemi lainnya. Bagi siswa yang sudah lama tidak berinteraksi dalam lingkungan pendidikan, pembelajaran tatap muka bisa menjadi cara untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Sejak pandemi Covid 19 pertama kali menyebar ke Indonesia, melalui transisi kenormalan baru dan memasuki era pasca pandemi saat ini, lanskap pendidikan telah mengalami banyak perubahan. Sekolah terus melakukan penyesuaian sewenang-wenang terhadap proses pembelajaran selama periode itu, dengan partisipasi orang tua, guru dan siswa. Terutama guru perlu seutuhnya harus menyesuaikan diri dengan proses dan mendidik dengan berani, terutama saat peraturan pembelajaran jarak jauh.

Pasca pandemi Covid-19, terjadi banyak perubahan lingkungan dan perilaku siswa, terutama dalam pembelajaran di Sekolah Dasar (SD). Ketika pembelajaran tatap muka pasca pandemi dilakukan, tidak dapat dipungkiri bahwa guru harus berperan penting dalam pembentukan karakter siswa seperti

perubahan sikap dan tingkat kedisiplinan. Khususnya siswa yang tidak peduli dan mudah bosan mengalami perubahan sikap tersebut. Akibatnya pembelajaran menjadi kurang efektif. Hal ini menyebabkan beberapa siswa membolos dan kedisiplinan siswa juga menurun. Pelaksanaan pembelajaran yang kurang ideal dalam hal ini disebabkan kendala yang diperoleh pasca pandemi, seperti lingkungan kelas yang kurang kondusif yang disebabkan oleh sifat siswa yang tidak sopan, acuh tak acuh, dan kasar serta cepat bosan. Faktor tersebut salah satunya disebabkan oleh keterpaksaan orang tua memberikan gawai kepada anak-anaknya yang masih duduk di tingkat Sekolah Dasar. Gawai memberikan dampak positif dan negatif karena secara tidak langsung memberi keleluasaan pada anak untuk aktif menggunakan teknologi. Hadirnya gawai pada siswa Sekolah Dasar mempengaruhi perubahan karakter anak tersebut. Dilain sisi adanya teknologi memberikan akses kelancaran dalam belajar. Maka sangat perlu sekali pengawasan ketat yang dilakukan oleh orang tua.

Kepala sekolah dasar mengharapkan inisiatif dan rencana yang dibuat akan mengarah pada penyesuaian perilaku selama periode pasca pandemi. Misalnya, menggunakan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran (pengelolaan, evaluasi dan materi pembelajaran) dan menjadikan penggunaan teknologi lebih akurat, menyeluruh dan disiplin. Selain itu, orang tua akan mengambil posisi guru. Dalam situasi ini, orang tua tidak hanya bertanggung jawab untuk mengawasi anaknya selama belajar di rumah, mereka juga harus siap membantu anak-anak mereka ketika menghadapi tantangan belajar. Selain peran guru dan orang tua berubah, siswa juga kesulitan memahami informasi yang diajarkan. Siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan mudah akibat terbatasnya media yang digunakan dan jaringan internet yang sulit. Untuk mengatasi masalah ini, guru dapat membagikan bacaan atau bahan pembelajaran lainnya sebelumnya. Sistem sekolah Indonesia yang tertekan harus siap dengan cepat beradaptasi dengan penyesuaian ini mengingat wabah Covid-19. Siswa akan tertinggal,

materi pembelajaran tidak akan diterima dengan baik oleh siswa, dan hasil belajar siswa akan sangat menurun jika guru dan siswa tidak segera beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Pandemi Covid 19 menunjukkan penurunan pada tahun 2022 bahwa pengajaran tatap muka mulai menggantikan pembelajaran jarak jauh atau daring dalam proses pendidikan. Efek dari proses pembelajaran selama pasca pandemi tidak dapat dicegah dan dipungkiri. Tentu saja ada efek positif dan negatif, tetapi sebagai seorang guru, dapat memaksimalkan efek positif dan meminimalkan efek negatif untuk meningkatkan tujuan pendidikan. Di era pasca pandemi, paradigma pembelajaran seperti pembelajaran online, pembelajaran campuran, dan pembelajaran hybrid semakin populer. Pembelajaran daring, pembelajaran campuran, media sosial, dan pembelajaran terbuka merupakan kemajuan signifikan untuk pengajaran yang efektif di era digital saat ini.

Hal tersebut tentunya memberikan tantangan bagi para guru di Sekolah Dasar, karena kebanyakan guru di Sekolah Dasar kebanyakan sudah senja dan kurang menguasai teknologi yang dipakai sebagai sarana saat pembelajaran dilakukan pasca pandemi. Namun, tidak dipungkiri juga bahwa teknologi bisa menggantikan guru dalam proses pembelajaran. Pembelajaran pasca pandemi yang bisa dikatakan semuanya melibatkan teknologi, tentunya menjadi suatu hal yang baru bagi guru di sekolah dasar. Semua guru perlu mempunyai gawai yang bisa digunakan dalam pembelajaran, apa lagi jika pembelajaran dilakukan secara *blended learning*. Berbagai aplikasi perlu dikuasai dan dipahami seperti *whatsapp*, *google meet*, *gmail*, *google form*, *class room*, *e-learning* dan masih banyak lagi aplikasi yang mendukung.

Guru, siswa, bahkan orang tua dituntut untuk mahir dalam bidang teknologi. Akibatnya, baik guru dan peserta didik sekarang harus menghadapi kesulitan baru. Mereka harus menguasai teknologi dan cara mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Dalam pemanfaatannya siswa Sekolah Dasar perlu bimbingan dari guru dan orang tua. Maka dari itu, guru merupakan pusat dalam pemanfaatan

teknologi saat pembelajaran dilaksanakan sehingga guru seharusnya bisa lebih unggul memanfaatkan teknologi demi kelancaran kegiatan belajar mengajar dengan baik. Pasca pandemi, guru Sekolah Dasar perlu media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dengan demikian guru harus menyiapkan semuanya agar siswa mendapatkan pemahaman yang lebih dan mampu berpikir kritis. Momok pembelajaran monoton sebenarnya diakibatkan oleh guru yang tidak bisa menghidupkan suasana kelas dan belum bisa menguasai teknologi dengan sempurna di zaman canggih sekarang ini.

BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING DALAM JARINGAN (BIPA DARING) : Ekstensifikasi Bahasa Indonesia Pascapandemi

Meina Febriani

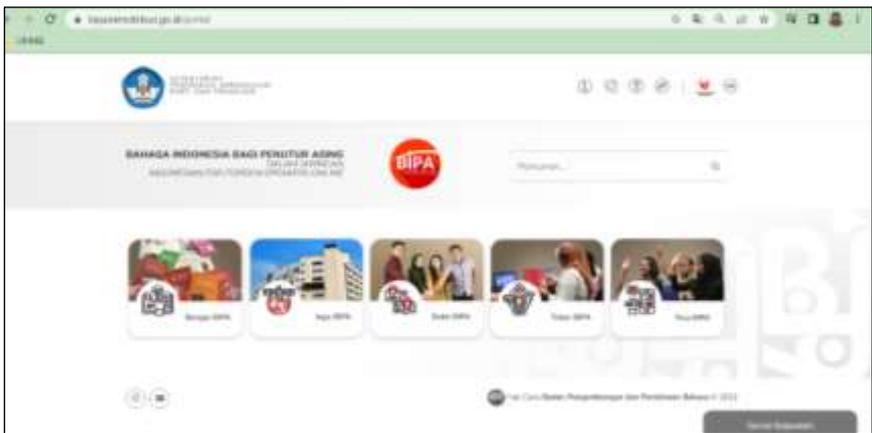
Perubahan pola kehidupan adalah sebuah keniscayaan, termasuk yang terjadi pada abad ke-21 ini. Pada masa ini manusia dikenal dengan istilah *digital native* karena perkembangan teknologi dan informasi yang sangat masif. Informasi akan dapat diterima secara sporadis melalui platform digital yang menjadi gaya hidup pada era global ini.

Sebuah fenomena tak terduga, yakni pandemi *corona virus disease-2019* (Covid-19) yang melanda dunia selama kurang lebih dua tahun (2019-2021) memberikan perubahan yang signifikan dalam berbagai lini kehidupan, salah satunya pendidikan. Sebelumnya, mungkin tidak pernah terlintas dalam benak kita bahwa pendidikan akan dilaksanakan secara daring selama masa pandemi. Pembelajaran yang biasanya berlangsung di ruang kelas sekolah, rupanya bisa dilakukan secara virtual yang bisa dilakukan di mana saja.

Perubahan tatanan pendidikan pada masa pandemi adalah garis mula adaptasi belajar pada abad ke-21 ini dimulai dengan sungguh-sungguh. Artinya, upaya ekstensifikasi area pendidikan yang tidak hanya sebatas pendidikan yang berlangsung secara luring, tetapi bisa pula daring, *blended*, maupun *hybrid*. Perubahan tatanan hidup pada masa pandemi menjadi titik tolak pola interaksi baru

pada masa pascapandemi, salah satunya pada pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA).

Promosi belajar bahasa Indonesia bagi penutur asing telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui program BIPA. Pada akhir tahun 2020 tercatat terdapat 41 negara telah menyelenggarakan program BIPA dengan total 72.746 pemelajar. Jumlah tersebut menjadi salah satu indikator bahwa minat warga asing untuk belajar bahasa Indonesia terus meningkat dari berbagai belahan dunia (Badan Bahasa, 2021). Merespons paradigma baru pendidikan abad ke-21 ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah mengembangkan platform digital, BIPA Daring (<https://bipa.kemdikbud.go.id/portal>) sebagai upaya ekstensifikasi bahasa Indonesia. Hal tersebut juga sebagai solusi untuk memfasilitasi pemelajar BIPA dari berbagai negara tanpa harus berada di Indonesia secara langsung.



Gambar 1. Tampilan Platform BIPA Daring (<https://bipa.kemdikbud.go.id/portal>)

Mengenal Platform BIPA Daring

Platform BIPA daring adalah sebuah jenama yang merupakan respons pedagogik atas kebutuhan interaksi virtual para *digital native*. Platform ini memiliki beberapa program antara lain: (1) belajar BIPA, (2) jaga BIPA, (3) bakti BIPA, (4) tebar BIPA, dan (5) tera BIPA.

Pertama, belajar BIPA (<https://bipa.kemdikbud.go.id/belajar.php>) merupakan kantong virtual yang berisi bahan acuan yang terdiri atas bahan ajar, buku pengayaan, dan buku penunjang lain dalam wujud buku elektronik, audio/video maupun aplikasi yang mendukung pembelajaran BIPA. Bahan-bahan tersebut bisa diakses secara bebas oleh khalayak pengguna internet. *Kedua*, jaga BIPA (<https://bipa.kemdikbud.go.id/jaga.php>) merupakan akronim dari Jaringan Lembaga Penyelenggara Program BIPA. Jaga BIPA membentangkan data berupa peta lokasi dan profil lembaga penyelenggara program BIPA di dalam maupun di luar Indonesia. *Ketiga*, modul aplikasi serba-serbi kiprah dan karya pemerhati BIPA (bakti BIPA) yang dapat diakses melalui laman <https://bipa.kemdikbud.go.id/bakti.php> berisi data dan informasi kiprah, karya (ilmiah, kreatif), maupun kabar penugasan pemerhati BIPA, baik yang disediakan oleh Badan Bahasa maupun pengguna terdaftar. *Keempat*, tebar BIPA (<https://bipa.kemdikbud.go.id/tebar.php>) merupakan wadah pengelolaan pembelajaran BIPA secara virtual. Modul aplikasi ini memfasilitasi layanan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan pembelajaran BIPA secara daring. *Kelima*, tes daring pembelajaran BIPA (tera BIPA) yang bisa diakses melalui laman (<https://bipa.kemdikbud.go.id/tera.php>). Modul aplikasi tersebut berisi layanan tes daring yang terdiri atas tes penempatan bagi calon pemelajar BIPA dan tes evaluasi belajar bagi pemelajar BIPA.

Platform BIPA daring adalah sebuah embrio pembelajaran kekinian dalam tatanan kehidupan digital saat ini. Pola pendidikan jarak jauh berbasis BIPA daring merupakan upaya ekstensifikasi

bahasa Indonesia secara strategis. Hal tersebut menjadi sebuah peluang emas bagi Indonesia dalam mempromosikan bahasa Indonesia ke berbagai penjuru dunia. Oleh sebab itu, dibutuhkan manajemen yang mumpuni dalam menjalankan pembelajaran virtual agar tujuan umum dan instruksional yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dengan baik.

Adapun standardisasi aspek manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara virtual, barangkali memang belum dirumuskan secara khusus. Untuk itu, acuan pokok standar manajemen dapat mengadaptasi dari delapan standar nasional pendidikan, yakni (1) standar kompetensi lulusan; (2) standar isi; (3) standar proses; (4) standar penilaian; (5) standar tenaga kependidikan; (6) standar sarana dan prasarana; (7) standar pengelolaan; dan (8) standar pembiayaan (PSKP Kemdikbud, 2022).

Pertama, BIPA daring secara tegas perlu menentukan tingkatan level BIPA dan standardisasi kompetensi dalam bingkai standar kompetensi lulusan. *Kedua*, standar isi kurikulum BIPA yang kontekstual, kekinian, dan holistik. *Ketiga*, standar proses yang terkontrol dan inovatif. *Keempat*, standar penilaian yang valid dan reliabel terhadap kompetensi BIPA. *Kelima*, tenaga kependidikan yang kapabel dan melek teknologi. *Keenam*, sarana dan prasarana yang lengkap. *Ketujuh*, pengelolaan yang memfasilitasi kebutuhan lapangan. *Kedelapan*, standar pembiayaan yang akuntabel.

Secara umum, BIPA daring sebagai platform digital masih perlu dikembangkan dan dipromosikan ke berbagai belahan dunia. BIPA adalah salah satu strategi unggulan untuk mempromosikan budaya Indonesia di kancah dunia. Sebab, makin banyak orang yang bisa berbahasa Indonesia di penjuru dunia, makin dikenal pulalah Indonesia. (*MF*)

PEMBELAJARAN BI PASCAPANDEMI COVID 19

Imaniah Kusuma Rahayu

Pandemi Covid-19 telah banyak mengubah tatanan kehidupan. Salah satu tatanan kehidupan yang paling terdampak adalah bidang Pendidikan. Pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka di semua jenjang pendidikan, baik dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, dihentikan untuk sejenak. Saat pandemi covid -19, para pelajar melakukan pembelajaran secara daring yang dilakukan dari rumah masing-masing. Pembelajaran daring adalah pembelajaran *online* dengan menggunakan jaringan internet dengan menggunakan media pembelajaran seperti *handphone*, laptop, atau computer. Hal ini dilakukan agar pendidikan bagi para pelajar tetap dapat berjalan dan tersalurkan.

Namun, sistem pembelajaran daring yang terlaksana selama pandemi covid 19 masih menyisakan berbagai macam persoalan. Persoalan tersebut diantaranya adalah ketidaksiapan pelajar itu sendiri seperti sulit dan kurang konsentrasi karena belum terbiasa dengan pembelajaran daring. Materi atau tugas yang diberikan kurang dimengerti karena kurangnya instruksi yang diberikan. Selain itu, dibutuhkannya jaringan internet dan media pembelajaran yang tidak semua pelajar memilikinya. Misalnya saja, para pelajar yang tinggal daerah pelosok, mereka pasti kesulitan untuk menemukan jaringan internet.

Kini, memasuki era pasca pandemi covid 19. Hal yang perlu dipikirkan adalah akan di bawa ke mana arah pembelajaran kita? Ali

Formen, Ph.D mengemukakan beberapa model mengenai pendidikan pasca pandemi. Diantaranya adalah: 1) Adanya kolaborasi antara guru dan orang tua; 2) Meninjau ulang persepsi guru yang baik; 3) Integrasi teknologi dalam sistem pendidikan; dan 4) Etik yang perlu dipromosikan dalam dunia pendidikan. Selain itu, 18 tokoh dari berbagai bidang ilmu profesi juga merumuskan pola pendidikan pasca pandemi yaitu: 1) Memanfaatkan alam dan masyarakat sebagai media pembelajaran; 2) memaksimalkan digital serta 3) membangun dan menumbuhkan karakter iman dan takwa dalam diri siswa.

Sejalan dengan pendapat tersebut, adanya kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat perlu ditingkatkan. Dalam dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya, pelajar diharapkan memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta agar dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai konteks komunikasi baik lisan maupun tulisan. Pembelajaran bahasa Indonesia dapat melibatkan orang tua maupun masyarakat seperti bagaimana melakukan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat, bagaimana cara menawarkan suatu produk kepada masyarakat, bagaimana melakukan negosiasi dengan baik dan benar, dsb sesuai dengan kepentingan lain sesuai dengan konteksnya. Dengan lebih melibatkan orang tua dan masyarakat secara langsung dalam proses pembelajaran, pelajar diharapkan dapat bereksperimen dan bereksplorasi terhadap bahasa lisan dan tulisannya. Selain itu dengan berinteraksi langsung dengan orang tua dan masyarakat, pelajar diharapkan untuk tidak kaget ketika terjun ke dunia kerja nantinya karena pengalaman adalah guru terbaik.

Selanjutnya adalah integrasi antara teknologi dalam sistem pendidikan. Penguasaan TIK atau ICT literacy adalah kemampuan individual untuk menggunakan ICT secara semestinya untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, dan mengevaluasi informasi, dan mengembangkan pemahaman yang baru, serta mengomunikasikan informasi tersebut kepada orang lain agar dapat

berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Nugraha (2016) terdapat tujuh level atau tahapan penguasaan TIK yang perlu dikuasai oleh pengajar dan pelajar agar tercapai KI dan KD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Ketujuh level tersebut adalah, *define*, *access*, *manage*, *integrate*, *evaluate*, *create*, dan *communicate*. Berikut penjelasan masing-masing level menurut Nugraha (2016: 165-174):

Pada level *define*, pengajar dan pelajar memiliki kompetensi dalam menggunakan perangkat TIK untuk mengidentifikasi dan menghadirkan informasi untuk memahami struktur dan kaidah teks anekdot, eksposisi, laporan hasil observasi, prosedur kompleks, negosiasi, cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi kompleks, ulasan/review, film/drama, cerita sejarah, berita, iklan, editorial/opini, dan cerita fiksi dalam novel baik melalui lisan maupun tulisan. Pada level *access*, pengajar dan pelajar memiliki kompetensi dalam mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan dan mengetahui bagaimana menemukan dan mendapatkan kembali informasi tersebut untuk membandingkan berbagai teks. Pada level *manage*, pengajar dan pelajar memiliki kompetensi dalam mengorganisasi dan menyimpan informasi untuk dipergunakan dalam berbagai konteks untuk menganalisis berbagai teks. Pada level *integrate*, pengajar dan pelajar memiliki kompetensi dalam menginterpretasi, merangkum, membandingkan, dan membedakan informasi menggunakan bentuk penyajian yang serupa atau berbeda untuk memaknai berbagai teks. Pada level *evaluate*, pengajar dan pelajar memiliki kompetensi dalam mengevaluasi dan merefleksikan proses yang digunakan untuk mendesain dan mengonstruksi solusi berbasis TIK dan membuat penilaian terkait kualitas, kesesuaian, kebermanfaatan, dan efisiensi informasi dalam mengevaluasi berbagai teks, dan level keenam adalah level *create*. Pada level ini, pengajar dan pelajar memiliki kompetensi dalam 1) mengembangkan atau mengreasi informasi dan pengetahuan dengan menyintesis, mengadaptasi, menerapkan, mendesain, menemukan, dan menyajikan informasi berbagai teks; 2)

mengembangkan/ mengkreasi, mengabstraksi, dan mengonversi informasi dan pengetahuan dengan menyintesis, mengadaptasi, menerapkan, mendesain, menemukan, dan menyajikan informasi dalam berbagai teks. Level terakhir adalah level *communicate*. Pada level ini, pengajar dan pelajar memiliki kompetensi dalam 1) mempresentasikan informasi dan pengetahuan dengan bertukar dan berbagi informasi berbagai teks kepada audien dalam konteks yang sesuai dan menggunakan media yang tepat; 2) membuat keputusan secara bertanggung jawab, kritis, reflektif, dan etis dalam memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi kepada orang lain dalam berbagai teks; 3) mempresentasikan informasi dan pengetahuan dengan bertukar dan berbagi informasi sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat baik secara lisan maupun tulisan kepada audien dalam konteks yang sesuai dan menggunakan media yang tepat; 4) membuat keputusan secara bertanggung jawab, kritis, reflektif, dan etis dalam memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi kepada orang lain dalam berbagai teks.

Dengan adanya kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat serta integrasi antara teknologi dalam sistem pendidikan diharapkan dapat mengatasi permasalahan pendidikan pasca pandemi covid 19 khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia.

TRANSFORMASI KUALITAS MANAJEMEN PENDIDIKAN PASCA PANDEMI

Rizky Widia Kardika

Pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting di suatu Negara. Namun dengan kondisi seperti ini, perlu banyak pertimbangan dalam menentukan sebuah inovasi sebagai bentuk upaya mengatasi badai permasalahan ini. Prinsip yang ditekankan oleh pemerintah terkait pendidikan di Indonesia adalah tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Oleh karena itu Indonesia menerapkan sistem pendidikan yang dilakukan dengan sistem belajar dari rumah. Hal ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa Covid-19. Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 15, dijelaskan bahwa PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain. Dalam pelaksanaannya, PJJ dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (*daring*) dan pembelajaran jarak jauh luar jaringan (*luring*).

Dalam pelaksanaan PJJ, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan (*daring* atau *luring* atau kombinasi keduanya) sesuai dengan karakteristik dan ketersediaan, kesiapan sarana dan

prasarana. Secara hakikatnya pendidikan bukan saja soal transformasi pengetahuan. Maupun tidak hanya soal proses pendidikan guna membuat manusia memahami dan mengetahui ilmu. Selain itu juga tidak hanya sekedar tentang angka taupun peningkatan pengetahuan yang diterima oleh peserta didik. Melampaui hal tersebut, pendidikan sebagai proses pendewasaan sikap dan perilaku peserta didik setelah belajar. Sehingga keterlibatan bagi seorang pendidik dalam proses pendidikan akan mampu membawanya hidup dalam keadaan masyarakat yang penuh dinamikanya.

Sistem pendidikan secara daring sudah diterapkan selama kurang lebih 2 tahun terakhir semenjak pandemi covid 19 melanda. Namun apakah sistem ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Tentu saja tidak, sistem pembelajaran secara daring ini merupakan kebijakan baru khususnya di Indonesia. Sebagai kebijakan baru tentu terdapat banyak hal yang masih kurang dan adanya hambatan-hambatan yang sebelumnya tidak diperkirakan. Sebagai contoh adalah kurang tersedianya fasilitas penunjang pembelajaran daring, dalam faktanya banyak peserta didik yang tidak memiliki perangkat handphone atau komputer untuk menunjang proses pembelajaran daring ini. Kondisi demikian membuat mereka bingung menghadapi kendala ini.

Permasalahan yang terjadi bukan hanya pada ketersediaan fasilitas pembelajaran, melainkan ada problem baru yaitu ketiadaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi, guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring, terutama orangtua peserta didik dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Tidak berhenti sampai di situ, meskipun jaringan internet dalam genggam tangan, peserta didik menghadapi kesulitan akses jaringan internet karena tempat tinggalnya di daerah yang cukup terpencil dan secara letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada peserta didik yang mengikuti pembelajaran daring, sehingga pelaksanaannya kurang efektif.

Pandemi covid-19 menggambarkan pentingnya percepatan peningkatan infrastruktur digital. Hingga kini secara global populasi dunia yang memiliki akses internet sebanyak 60 persen. Sedangkan penggunaan internet di Indonesia masih di bawah angka populasi global tersebut, yakni 54 persen dari total populasi Indonesia.

Kondisi ini menjadi hambatan yang serius bagi upaya pengembangan sistem pembelajaran digital. Di samping akses internet, perlu dibangun pusat teknologi pembelajaran digital tersentralisasi dan berfokus pada masa depan. Ini akan menjadi solusi lengkap untuk pembelajaran jarak jauh. Meskipun saat ini dunia pendidikan telah memasuki proses belajar tatap muka, namun keterampilan mengajar *online* tetap perlu dikuasai. Meskipun selama masa pandemi para guru telah mengalami peningkatan kemampuan mengajar *online*, namun masih banyak keterampilan teknis yang perlu dikuasai.

MANAJEMEN PEMBELAJARAN MAHASISWA PPG PASCAPANDEMI

Hayatun Nufus

Wabah Covid 19 telah mengejutkan dunia. Virus ini menyebar dengan cepat dengan ciri-ciri gangguan pernafasan hingga menyebabkan kematian. Indonesia pun terkena dampak dari ganasnya virus ini, keadaan ini tidak saja menyangkut mengenai kesehatan tetapi berdampak pula pada sosial ekonomi dan Pendidikan. Pada 11 Maret 2020 pemerintah menetapkan kejadian ini sebagai wabah nasional. Agar virus ini tidak menyebar, pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Keadaan pandemi berpengaruh terhadap sistem Pendidikan di Indonesia yang semula dilakukan secara tatap muka atau luring berubah menjadi daring (dalam jaringan) atau secara virtual. Perubahan yang secara tiba-tiba tersebut telah membuat “gagap” sistem Pendidikan kita, karena pendidik maupun peserta didik belum terbiasa dengan situasi ini. Banyak factor yang menyebabkan “kegagapan” ini di antaranya belum terbiasanya pendidik menggunakan teknologi dalam pembelajaran serta perangkat pembelajaran yang masih diperuntukkan untuk pembelajaran tatap muka, *semua serba online*. Untuk pembelajaran tingkat dasar, peran guru sangat vital karena keterbatasan pengetahuan mengenai teknologi dan keterbatasan ekonomi peserta didik. Pembelajaran dilakukan satu arah. Tidak semua peserta didik memiliki *handphone* atau komputer. Hal ini menyebabkan pembelajaran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Peserta didik tak kalah terkejut dengan

keadaan ini, untuk belajar jarak jauh dibutuhkan media pembelajaran berupa *handphone*, laptop, dan jaringan internet.

Tidak dapat dipungkiri, meski dampak negatif akibat virus Corona lebih besar, virus ini berdampak positif bagi dunia Pendidikan Indonesia. Setelah keadaan berangsur membaik, namun kebiasaan pada masa pandemi telah membawa perubahan pada manajemen pembelajaran seperti penggunaan aplikasi, zoom, googlemeet, e-book, google classrom dan lain sebagainya menjadi hal yang biasa digunakan. Dengan kondisi yang kian normal, penggunaan media pembelajaran jarak jauh masih digunakan dalam pembelajaran. Selain sebagai media pembelajaran, teknologi juga berfungsi untuk memudahkan pencarian informasi, meningkatkan minat belajar, memudahkan akses belajar, dan meningkatkan kemampuan belajar.

Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah guna mempersiapkan lulusan S1 Pendidikan dan D IV Non pendidikan yang berkeinginan dan berminat serta bakat menjadi guru untuk menguasai kompetensi guru seutuhnya yang berstandar nasional. Dalam pelaksanaan pembelajarannya PPG dalam jabatan FKIP Universitas PGRI Palembang masih secara daring, hal ini mengadaptasi pembelajaran di era pandemi covid 19.

Pasca pandemi ini pembelajaran mahasiswa PPG bidang studi Pendidikan Bahasa Indonesia berbasis internet atau dalam jaringan (daring). Dosen dan mahasiswa bertemu secara online baik itu tatap muka maupun dalam aplikasi *Learning Management System* (LMS) PPG dari teori maupun Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Dari sejak pandemi hingga sekarang, pembelajaran PPG menggunakan piranti lunak yang didesain sebagai wadah seluruh perangkat pembelajaran. Aplikasi LMS memuat perangkat pembelajaran berupa bahan ajar, lembar kerja, instrumen evaluasi, media pembelajaran, ruang diskusi antara sesama mahasiswa dan dosen. Kegiatan mahasiswa dapat dipantau melalui aplikasi ini berupa video pembelajaran, perangkat pembelajaran, tugas-tugas

mahasiswa serta memberikan penilaian terhadap hasil pembelajaran. Seluruh civitas seperti dosen, mahasiswa, pengelola atau tenaga administrasi yang terlibat dalam perkuliahan PPG terhubung dengan aplikasi LMS.

Jarak bukanlah masalah dalam proses pembelajaran PPG karena kegiatan yang dilakuakn sudah terjadwal dan terstruktur dalam aplikasi LMS. Mahasiswa dari berbagai pelosok di Indonesia dapat dipertemukan dalam pembelajaran daring ini. Namun system ini mempunyai kelemahan yaitu masalah jaringan internet. Tidak semua mahasiswa berasal dari kota besar yang mudah mendapatkan jaringan internet, tapi beberapa mahasiswa merupakan guru yang berasal dari daerah pedalaman sehingga tidak mudah untuk mendapatkan *signal* yang baik. Ketika pembelajaran secara tata maya, koneksi yang buruk menjadi hambatan seperti suara yang terputus-putus dan terpentat dari ruang pertemuan tatap maya sehingga tidak dapat mengikuti perkuliahan.

Pandemi telah memberikan kita pembelajaran dalam bidang Pendidikan seperti kurikulum yang perlu diperbaharui, pengetahuan menggunakan teknologi perlu ditingkatkan. Kompleksnya masalah Pendidikan di Indonesia pada masa pandemi menjadi tanggung jawab kita bersama agar tidak lagi “gagap” dalam menghadapi peristiwa yang secara tiba-tiba. Pengalaman pahit dijadikan acuan agar kita cepat tanggap dalam mengatasi masalah.

MANAJEMEN PENDIDIKAN INFORMAL MELALUI GERAKAN LITERASI KELUARGA¹

Qurrota Ayu Neina

Membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa. Pada dasarnya, kemampuan dan keterampilan membaca adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena memiliki peranan penting dalam melahirkan generasi penerus yang cerdas, kreatif, dan kritis. Hal tersebut dikuatkan oleh ahli yang menyatakan bahwa membaca merupakan keterampilan berharga dan penting yang dapat digunakan sepanjang hidup. Selain penting, keterampilan membaca termasuk bagian dari proses pendidikan, seperti yang tercantum dalam Permendikbud No 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum yang menjelaskan bahwa membaca merupakan bagian dari proses pendidikan pengembangan potensi diri sehingga memiliki kemampuan berpikir rasional dan prestasi akademik.

Kegiatan membaca mulai diperkenalkan kepada siswa di SD kelas rendah. Melalui kegiatan membaca ini, siswa dapat sekaligus mempelajari mata pelajaran yang lain dan mengetahui segala jenis informasi yang berkembang di sekitarnya, serta mengolahnya sebagai ilmu pengetahuan yang dapat diaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Mengingat begitu banyak hal yang dapat diperoleh dari kegiatan membaca, jelas bahwa membaca memiliki peranan

¹ Artikel ini pernah dimuat di *Suara Merdeka*, 2 Juni 2022 dengan judul "Diperlukan Gerakan Literasi Keluarga"

penting bagi siswa. Namun, pada kenyataannya, kemampuan membaca siswa Indonesia tidak sesuai dengan harapan. Hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) tahun 2016 yang dilakukan Kemendikbud menunjukkan bahwa 46,83% siswa SD kelas rendah masih belum terampil membaca. Data lain menunjukkan bahwa kemampuan anak Indonesia dalam membaca secara lancar pada usia 7-8 tahun (kelas II SD) makin memprihatinkan. Hal ini tentu sangat disayangkan.

Salah satu kondisi terkait dengan penyebab rendahnya kemampuan membaca anak akhir-akhir ini di antaranya karena pandemi covid-19. Diberlakukannya pembelajaran dalam jaringan menurunkan minat belajar siswa. Bahkan, dikatakan banyak anak yang mengalami penurunan kemampuan membaca lancar semenjak diterapkannya sistem sekolah dalam jaringan akibat pandemi. Kondisi ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu: 1) kesalahan penerapan media dan teknik pembelajaran oleh guru, 2) ketidaktahuan guru dan orang tua berkait dengan teknologi yang dapat mendukung pembelajaran daring, 3) ketidaksiapan orang tua dalam mendampingi anak selama pembelajaran daring, dan 4) kebosanan siswa dalam menghadapi situasi belajar daring.

Permasalahan serupa juga dialami oleh anak-anak yang berada pada tingkatan SD kelas rendah. Anak-anak tersebut mengalami kondisi belajar daring yang memaksa mereka untuk belajar mandiri berdampingan dengan teknologi. Kondisi ini tentu menjadikan orang tua dan anak lebih bekerja keras dalam memahami materi. Sayangnya, anak-anak yang masih duduk di bangku SD kelas rendah belum semuanya pandai membaca untuk memahami materi secara mandiri, apalagi bagi siswa SD kelas I yang baru saja masuk sekolah. Tentu hal ini sangat berat bagi keduanya. Oleh karena itu, kemampuan membaca sebagai salah satu cara memahami seluruh pelajaran ini harus dikuasi bagi anak, khususnya SD tingkat rendah.

Minimnya kesadaran orang tua berkait dengan gerakan literasi keluarga juga menyebabkan anak kurang termotivasi dalam belajar membaca. Padahal, di antara beberapa pihak yang berkontribusi

dalam meningkatkan gerakan literasi ini, keluarga memiliki peran paling utama. Keluarga merupakan lembaga pendidikan informal yang memiliki peran paling penting dalam pengembangan literasi. Karena keluarga adalah sekolah pertama dan dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku dan perkembangan anak. Gerakan literasi keluarga merupakan usaha memaksimalkan peran anggota keluarga untuk mengembangkan karakter dan kesuksesan akademik anak.

Akan tetapi, bahwa banyak orang tua yang belum memiliki kesadaran untuk mendampingi anak dalam belajar, khususnya membaca. Jika dibiarkan, hal tersebut berdampak pada motivasi belajar anak yang kian menurun dan membuat kemampuan membaca anak tidak terasah. Setidaknya terdapat tiga kendala yang menyebabkan hal tersebut terjadi, antara lain: 1) orang tua tidak cukup memiliki pengetahuan dasar mengenai teknik dasar mengajarkan keterampilan membaca kepada anak; 2) orang tua tidak memiliki waktu yang cukup; dan 3) orang tua yang tidak melek teknologi sehingga tidak memiliki media yang cukup.

Pertama, kendala berkait dengan ketidakcukupan pengetahuan orang tua berkait dengan teknik dasar dalam mengajarkan keterampilan membaca kepada anak usia SD kelas rendah. Selama ini orang tua hanya mengajarkan dengan teknik mengeja. Padahal, teknik mengeja ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu: 1) anak akan mengalami kesulitan dalam mengenal rangkaian huruf seperti suku kata dan juga kata; 2) anak akan mengalami kesulitan pelafalan diftong dan fonem rangkap, seperti *ng*, *ny*, *kh*, *au*, *oi*, dan sebagainya; dan 3) setelah anak mampu membaca suku kata, ia akan kesulitan untuk menghilangkan proses pengejaan dan hal ini dapat menghambat kemampuan anak untuk membaca dengan normal.

Kedua, kendala berkait dengan waktu. Disinyalir kesibukan orang tua dalam pekerjaannya membuat orang tua tidak memiliki cukup waktu untuk mengoptimalkan waktu belajar anak di rumah. Ketika orang tua sudah sampai di rumah dalam keadaan lelah

membuat orang tua tidak memiliki semangat yang tinggi untuk mengajak anak belajar. Ditambah dengan kondisi pandemi dan orang tua hanya membantu anak untuk “menggugurkan” tugas, tanpa ada tambahan waktu untuk megajarkan keterampilan membaca kepada anak.

Ketiga, kendala berkait dengan ketidakcakapan orang tua dalam penguasaan teknologi dalam dunia pendidikan. Ketidakcakapan ini berdampak pada pengelolaan media belajar yang kurang. Orang tua hanya mengandalkan media yang diberikan oleh guru kelas berupa Lembar Kerja Siswa dan juga buku paket. Hal ini tentu tidak cukup untuk memotivasi anak untuk belajar membaca karena terlalu monoton dan membosankan.

Hal tersebut diperparah dengan kondisi pembelajaran pada masa pascapandemi ini. Kebijakan dari pemerintah untuk melakukan penyesuaian kurikulum dengan memadatkan materi dan memangkas beberapa materi membuat anak mengalami kondisi *learning loss*. Kondisi pembelajaran dengan teknik *hybrid learning* juga membuat orang tua gagap. Pada akhirnya, orang tua dan anak lebih banyak disibukkan dengan teknik belajar dibandingkan dengan konten materi pembelajaran, padahal seluruh materi pelajaran tersebut baru dapat dipahami oleh anak jika ia mampu membaca dan memahami materi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan peran keluarga dalam menyadarkan pentingnya literasi untuk meningkatkan keterampilan membaca anak melalui gerakan literasi keluarga (GLK).

Gerakan literasi keluarga (GLK) merupakan program pemberdayaan keluarga dalam meningkatkan minat baca anak. Gerakan literasi keluarga dilakukan untuk mengembalikan peran anggota keluarga dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki guna mengembangkan karakter dan kesuksesan akademik pada diri setiap anak Indonesia. Merancang program literasi keluarga adalah strategi yang paling efektif untuk meningkatkan keterlibatan orang tua dan pengembangan literasi anak. Kegiatan gerakan literasi keluarga dapat berupa komitmen dari setiap keluarga untuk

mencintai ilmu pengetahuan, apapun jenis ilmunya dan melibatkan serta terus memotivasi seluruh anggota keluarga lainnya untuk terus belajar.

Gerakan literasi keluarga (GLK) ini dapat dilakukan dengan beberapa hal sederhana dan bermakna, seperti: 1) pengondisian lingkungan literasi dalam lingkungan rumah dan sekitarnya; 2) pengoptimalan penggunaan jaringan internet untuk mengakses sumber-sumber belajar dari dalam jaringan; 3) melibatkan orang tua dalam kegiatan literasi di sekolah; dan 4) pengalokasian waktu tertentu dalam keluarga untuk melakukan aktivitas-aktivitas bersama yang berkaitan dengan literasi.

Dukungan dan pendampingan yang tepat dari orang tua tentu dapat memotivasi anak untuk belajar lebih giat dan produktif. Gerakan literasi keluarga (GLK) bertitik tolak pada keinginan untuk meningkatkan kemampuan literasi anggota keluarga. Oleh karena itu, pemahaman literasi sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi, mencari, memperoleh, mengolah, dan menginformasikan kembali informasi perlu ditingkatkan di ranah keluarga.

Formulasi tersebut diharapkan dapat memberikan andil dalam meningkatkan kesadaran orang tua mengenai gerakan literasi keluarga (GLK) serta memberikan dampak positif pada meningkatnya kemampuan membaca anak karena keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, dan dalam konteks pendidikan, menjadi lingkungan pembelajaran pertama dan utama bagi anak-anak.

PENGUATAN PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA PASCA PANDEMI

Prasetyo Yuli Kurniawan

Dalam era pascapandemi, manajemen pendidikan di Indonesia menjadi semakin penting. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia pendidikan secara signifikan, dari pembatasan akses fisik ke ruang kelas hingga kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, manajemen pendidikan bahasa Indonesia haruslah menyesuaikan diri dengan keadaan baru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik.

Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen pendidikan bahasa Indonesia adalah pembatasan fisik yang diberlakukan selama pandemi. Keterbatasan ini mengharuskan sekolah dan guru untuk beralih ke pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Sebagai hasilnya, kurikulum pendidikan bahasa Indonesia harus diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran dalam bentuk daring. Guru-guru harus meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi, merancang materi yang lebih kreatif dan menarik, serta memastikan interaksi yang mengembangkan antara guru dan siswa tetap terjalin walaupun dalam bentuk virtual.

Selain itu, manajemen pendidikan bahasa Indonesia juga harus mempertimbangkan variasi pada metode pembelajaran yang digunakan. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga guru harus mampu memilih metode yang paling tepat untuk memfasilitasi pembelajaran siswa. Selain itu, penggunaan media dan teknologi yang tepat juga dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Manajemen pendidikan bahasa Indonesia juga harus mempertimbangkan kesiapan dan dukungan dari orang tua siswa. Orang tua dapat memainkan peran penting dalam mengawasi kemajuan akademik siswa, membantu mereka dalam pembelajaran jarak jauh, dan memberikan motivasi. Oleh karena itu, sekolah dan guru harus memiliki komunikasi yang efektif dengan orang tua dan memberikan dukungan yang diperlukan dalam pengembangan pembelajaran siswa.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif, manajemen pendidikan bahasa Indonesia juga harus memperhatikan kebutuhan siswa dalam hal psikologis dan sosial. Pembelajaran jarak jauh dapat berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan sosial siswa. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan yang holistik dalam pengembangan siswa, termasuk memperhatikan aspek sosial dan psikologisnya melalui konseling dan dukungan mental.

Manajemen pendidikan bahasa Indonesia juga harus mempertimbangkan evaluasi dan pemantauan yang terus menerus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan melakukan evaluasi dan pemantauan secara teratur, sekolah dan guru dapat mengetahui jenis pembelajaran apa yang berhasil dan tidak berhasil, dan mengubah strategi pembelajaran sesuai dengan hasil evaluasi tersebut.

Secara keseluruhan, manajemen pendidikan bahasa Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi pembelajaran bahasa Indonesia, seperti teknologi, kebutuhan siswa, dan kebutuhan pasar kerja di masa depan. Dengan mengadopsi strategi dan teknologi yang tepat dan memperhatikan kebutuhan siswa secara holistik, manajemen pendidikan bahasa Indonesia dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan.

SEKOLAH UNGGUL MELALUI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH : Strategi Manajemen Pascapandemi

Mei Fita Asri Untari

Pandemi Covid-19 memaksa setiap orang beradaptasi dengan kebiasaan baru, termasuk dalam proses belajar mengajar di sekolah. Ketidamampuan beradaptasi dan bertransformasi akan menambah persoalan dan memperlambat upaya pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang jitu dalam masa transisi menuju era pasca pandemi, atau orang menyebut era new normal.

Direktorat Sekolah Dasar telah mengeluarkan tiga langkah dalam beradaptasi dengan pandemi Covid-19 untuk mencapai tujuan pendidikan Indonesia yang leboh baik. **Pertama**, melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di tengah pandemi, misalnya relokasi anggaran untuk pendidikan pasca pandemi, SKB 4 Menteri tentang pembelajaran tatap, muka,koordinasi dengan pemerintah daerah dan sekolah. Relokasi anggaran direalisasikan dengan memberikan dana BOS langsung kepada rekening sekolah dan dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah selama pandemi. **Kedua**, adanya transisi masa pandemi, yaitu pemerintah melakukan vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan, penyiapan infrastruktur termasuk digitalisasi dan telekomunikasi untuk pemenuhan pembelajaran pada masa pandmi. **Ketiga**, yaitu melalui penguatan dan perluasan digitalisasi termasuk sekolah di wilayah 3T, memberikan optimalisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),

scale up pengimbasan sekolah penggerak serta penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui berbagai moda pembelajaran.

Melalui strategi tersebut diharapkan akan melahirkan perilaku pada masa *passca* pandemi. Terlahirnya penguatan perilaku hidup bersih dan sehat, pemanfaatan teknologi dalam mendukung pembelajaran menjadi menyeluruh, sehingga menimbulkan kecakapan dalam pemanfaatan teknologi. Semua itu muaranya adalah peningkatan pendidikan menjadi lebih baik setelah adanya pandemi yang menurunkan proses pembelajaran/*loose learning*.

Pendidikan merupakan proses mengubah manusia menjadi lebih baik, lebih mahir dan terampil. Peran serta guru dan kepala sekolah sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan studi baik di Indonesia maupun di berbagai negara, bahwa komponen yang paling kuat pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pendidikan adalah guru. Guru dan kepala sekolah perlu melakukan inovasi dan mengembangkan ide-ide baru baik dalam pola atau metode pembelajaran untuk siswa dan juga pola manajemen yang tepat. Kualitas suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh kualitas pembelajaran saja, tetapi juga dipengaruhi bagaimana lembaga pendidikan tersebut mampu mengelola tenaga pendidik dan kepanendidikan dengan memunculkan motivasi dan potensinya untuk mampu mengupayakan yang terbaik dalam melaksanakan tugasnya.

Manajemen secara umum diartikan untuk pengelolaan, penataan atau pengaturan. Dapat juga diartikan memberdayakan sumber daya manusia yang ada untuk menyusun program, melaksanakan program, memanfaatkan sumber daya yang ada, mempertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang untuk membuat justifikasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan suatu organisasi. Menurut Burhanudin dkk (2013) yang menjadi sebuah substansi manajemen pendidikan adalah (1) kurikulum dan pembelajaran; (2) peserta didik; (3) pendidik dan tenaga kependidikan, (4) sarana dan prasarana; (5) pembiayaan; (6) humas dan (7) budaya dan lingkungan. Sejalan dengan pendapat

tersebut Abidin Nata (2008) menjelaskan bahwa manajemen pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan dan evaluasi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia baik personal, material, dan spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dapat diartikan sebagai keseluruhan proses Kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personal dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Salah satu impian lembaga pendidikan adalah menjadi sekolah unggul dan mampu menciptakan pembelajaran dan lulusan yang berkualitas. Tidak terkecuali dengan sekolah dasar. Sekolah unggul merupakan lembaga pendidikan yang lahir dari sebuah keinginan untuk memiliki sekolah yang mampu berprestasi tingkat nasional dan internasional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditunjang oleh akhlak yang baik. Sekolah unggul dikembangkan untuk mencapai keistimewaan dan keluaran pendidikannya. Kriteria sekolah unggulan diantaranya adalah manajemen yang kuat, kurikulum yang luas dan seimbang, dan pelibatan masyarakat.

Di tingkat sekolah, otonomi pendidikan dilaksanakan melalui program Manajemen Berbasis Sekolah. Program MBS ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam meningkatkan mutu, efisiensi, dan peluang yang setara terhadap akses pendidikan. Dengan adanya partisipasi dan rasa memiliki sekolah, kepala sekolah dan guru-gurunya akan dapat mengelola sekolah secara lebih efektif.

Hal-hal yang dapat dilakukan dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah adalah

a. Otonomi

Sekolah yang memiliki otonomi yang kuat dapat membuat berbagai keputusan menyangkut tugas guru, perencanaan kurikulum, metode pengajaran, sumber daya manusia, sumber

daya keuangan, sumber daya materi, informasi, pengetahuan, teknologi, dan alokasi waktu. Sekolah dapat menentukan strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam menjalankan kurikulum baik kurikulum wajib pemerintah dan kurikulum khusus atau unggulan.

b. Partisipasi

Sekolah mendorong Kepala sekolah dapat membangun wadah konsultasi guru dan komite sekolah termasuk wadah lain yang relevan misalnya forum guru kelas, forum guru mata pelajaran dalam gugus. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya konsultasi/pembahasan mengenai kualitas pendidikan untuk peserta didik. Konsultasi dapat berupa rencana kerja guru, perenanaan dan pengaturan program mengajar, jumlah siswa di kelas, proses-proses untuk menjamin kesejahteraan dan kedisiplinan siswa, serta perencanaan dan pengaturan keuangan maupun sarana sekolah.

c. Rasa Memiliki

Masyarakat bertanggungjawab terhadap sekolah setempat dan memberi kontribusi dalam pembuatan keputusan bersama. Dengan begitu masyarakat dapat mengembangkan rasa memiliki sekolah yang ada di wilayahnya.

d. Proses Bawah-Atas

Manajemen berbasis sekolah menerapkan prinsip 'bawah-atas' (bottom-up). Hal ini berarti bahwa semua keputusan diambil berdasarkan gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh semua pemangku kepentingan sekolah. Sekolah mengembangkan Rencana Pengembangan Sekolah beserta anggarannya yang kemudian dibahas lebih lanjut dengan perwakilan orang tua, komite sekolah, Yayasan, dan semua pihak selaku warga sekolah.

e. Kerja Tim

Kerja tim berarti semua pihak dapat berbagi pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan jika masing-masing orang bekerja sendiri-sendiri.

Konsep maju bersama tidak hanya berlaku bagi sekolah-sekolah dalam gugus, tetapi juga bagi guru dalam satu sekolah.

f. Transparansi

Transparansi berarti membagi semua informasi yang relevan dengan semua orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Transparansi diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan sekolah. Keterbukaan informasi dapat membangun kepercayaan dan komitmen dari guru dan orang tua.

g. Akuntabilitas

Sekolah bertanggung jawab mengenai pendidikan generasi muda kepada masyarakat setempat dan sistem pendidikan. Bentuk akuntabilitas sekolah diwujudkan dalam laporan tertulis dan pertemuan berkala dengan pemangku kepentingan untuk membahas persoalan sehubungan dengan program dan anggaran.

Manajemen berbasis sekolah dapat diterapkan untuk memperbaiki kondisi pendidikan pasca pandemi. Selama hampir dua tahun siswa belajar di rumah dengan keluarga, maka perlu transisi yang lura biasa untuk membiasakan kembali anak-anak untuk ke sekolah. Di sinilah peran keluarga, masyarakat dan warga sekolah untuk membangun budaya sekolah yang semestinya. Yang dapat dilakukan untuk menciptakan sekolah yang siap untuk siswa kembali sekolah pada pasca pandemi adalah dengan menciptakan iklim belajar yang tepat, mengatur ruangan belajar, dan mengelola interaksi kegiatan belajar mengajar sehingga membuat siswa antusias dalam belajar dan menantang bagi siswa dalam belajar. Guru bersama orang tua perlu berkolaborasi dalam menciptakan model pembelajaran yang bervariasi ketika di sekolah dan di rumah, menanamkan dan mencontohkan sikap disiplin kepada siswa. Guru secara berkala melaporkan proses pembelajaran siswa kepada orang tua dan mencari solusi jika terdapat permasalahan. Selain itu,

pendisiplinan dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat perlu ditanamkan di sekolah dan di rumah. Fasilitas sarana dan prasarana baik di sekolah dan di rumah diupayakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kemampuan kritis dan kreatif siswa. Tentu semua itu tidak dapat terlaksana dengan baik jika orang tua tidak turut mendukung.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi pasca pandemi membuat sekolah dan masyarakat perlu bangkit dan memulihkan pendidikan dengan cara berkolaborasi dalam menentukan langkah yang sesuai dengan mutu sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai sekolah yang unggul untuk membentuk karakter, kemampuan berpikir anak, dan menutup kekurangan pendidikan pada masa pandemi.

LEARNING LOSS? YAP, TAPI JANGAN HIPERBOLIK

Zainal Arifin

Secara umum, *learning loss* diartikan sebagai kondisi kemunduran secara akademis kemampuan para peserta didik terkait dengan kesenjangan yang berkepanjangan atau terkait dengan proses pendidikan yang berlangsung secara tidak baik. Apakah *learning loss* benar-benar terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia pasca

Pandemi menghajar semua sektor kehidupan. Tak terkecuali sektor pendidikan. Selama pandemi, sektor pendidikan termasuk sektor yang hancur-hancuran setelah sektor kesehatan dan sektor ekonomi. Sekolah tutup, guru bingung, orang tua khawatir, siswa tak tertangani. Gejolak baru bermunculan. Isu learning loss menggema kencang. Begitu kencangnya sampai-sampai gaungnya lebih lantang daripada realitas sebenarnya. Ada apa?

terjadinya pandemi covid-19? Tentu saja jawabnya iya. Hanya saja kenapa gaungnya begitu lantang menyoal pandemi yang mengakibatkan terjadinya *learning loss*. Apalagi saat mendekati masa pemeringkatan PISA?

Kalau hanya pandemi, semua negara juga mengalami pandemi. Sekolahnya juga sama-sama tutup. Gurunya

sama-sama bingung mencari strategi. Muridnya juga sama-sama tak

tertangani. Lantas apa bedanya adanya pandemi dengan tak adanya pandemi terhadap *learning loss* bila semua juga mengalami kondisi yang sama? Dunia akan kembali setimbang karena semua negara *bareng-bareng* mengalami kemunduran.

Semestinya, yang khawatir *learning loss* justru negara-negara maju yang biasa *nangkring* di posisi atas dan sistemnya mengalami *stag* menghadapi pandemi. Kalau hanya untuk sebuah negara dengan survei terakhir posisi 74 dari 79 peserta PISA, *learning loss* apa yang ditakutkan. Negeri ini sudah lama mengalami “loss” sejak bertahun-tahun lalu. Sudah terbiasa dengan kondisi bawah, menggembel, dan mengalami subordinasi oleh orang-orang Barat.

Bukankah keterlibatan kita dalam PISA juga menjadi bagian dari keinginan kita untuk distandisasi orang Barat? Keinginan untuk “menghamba” pada Barat dengan membangun standar pendidikan Timur dengan indikator-indikator pendidikan Barat. Kita benar-benar gila pada sesuatu yang beraroma Barat. Seolah pelajaran logika jauh lebih baik daripada mempertajam intuisi. Seolah filfasat positivistik jauh lebih hebat dari filfasat fenomenologi. Dan seolah belajar material jauh lebih penting dibandingkan spiritual.

Ya, kita masih *tergopob-gopob* terhadap standardisasi Barat tanpa mau menilik Orientalisme yang digagas Edward Said; yang menyadarkan perlunya orang Timur memiliki standar sendiri, bukannya mengikuti selera Barat dalam membangun standar mereka terhadap Timur. Barat adalah negeri dengan tradisi, budaya, dan selera yang berbeda. Sedangkan Timur adalah negeri yang juga memiliki tradisi, budaya, dan selera yang berbeda. Mengenal tradisi bangsa lain memang perlu, tapi mengekor bangsa lain, janganlah.

Tapi bagaimana bila sudah terlamjur? Ada pepatah Jawa yang mengatakan “*yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani*”. Bila sudah terlanjur masuk ya masuklah dengan gagah berani. Apalagi bila pemimpin sudah memutuskan ikut terlibat PISA. Pemimpi harus selalu ingat; *sabda pandhita ratu tan kena wola-wali*; keputusan

seorang pemimpin tidak boleh berubah-ubah. Hadapi PISA dengan gagah. Jangan sampai tumbuh kecurigaan, niat menggaungkan *learning loss* akibat pandemi hanyalah untuk menyiapkan “kambing hitam” ketika tiba-tiba peringkat PISA kembali *anjlog*.

“Kambing Hitam”

Sudah menjadi rahasia umum, bangsa ini memiliki tradisi buruk untuk selalu mencari “kambing hitam” setiap kali masalah bermunculan. Orang takut bertanggung jawab terhadap apa yang dihadapinya, memilih menuding orang lain, dan mengorbankannya sebagai *biang kerok* dari setiap masalah yang timbul. Setiap pemimpin berusaha cuci tangan dari kesalahan. Bahkan, bila perlu setiap kali mengambil kebijakan, ada “kambing-kambing” yang telah disiapkan untuk antisipasi kalau-kalau nanti mengalami kegagalan.

Kepemimpinan “busuk” seperti ini telah terbentuk secara menahun, membudaya, bahkan genetiknya diwariskan secara turun-temurun. Akibatnya, masyarakat menjadi semakin jengah melihat *solah-polah* pemimpinnya. Kejengahan yang terus bertumpuk, mengeras dan membatu, pada akhirnya memicu pada terjadinya *social movement* yang biasanya berakhir pada penggulingan kekuasaan. Banyak pemimpin di negeri ini yang turun dengan tidak terhormat atau kekuasaannya berakhir dengan mendekam dalam penjara.

Kembali pada masalah *learning loss* akibat covid, ada sebuah upaya cerdas yang patut kita waspadai untuk memosisikan pandemi covid sebagai “kambing hitam” jikalau peringkat PISA Indonesia mengalami kemerosotan lagi. Hal ini terendus dari menguatnya isu *learning loss* memasuki tahun 2021. Tahun 2021 merupakan tahun periodik tiga tahunan bagi lembaga *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) untuk melakukan pemeringkatan PISA.

Uniknya, penggelontoran isu itu mendadak senyap, ketika tiba-tiba OECD memutuskan untuk menunda survei karena pandemi. Survei yang semestinya dilakukan pada tahun 2021 kisaran bulan Mei dan Juni, mesti ditunda sampai tahun 2022. Senyapnya isu *learning loss* seperti senyapnya lautan setelah suara terompet kapal menghilang. Yang lebih unik lagi, hasil survei PISA tahun 2022 yang semestinya sudah bisa diterima, sampai berganti tahun 2023 pun masih belum bisa ditemukan di laman resminya.

Semua bermain *patgulipat*, saling menyimpan batu dalam genggamannya, dan saling memotong dalam lipatan. Siapa akhirnya yang akan tergunting? ***

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA PASCA PANDEMI *COVID-19*

Uki Hares Yulianti

Bentuk pembelajaran yang dapat dijadikan salah solusi dalam masa pandemi Covid-19 adalah pembelajaran Daring (dalam jaringan). Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran (Moore, DicksonDeane, dan Galyen: 2011). Dengan memanfaatkan internet dan teknologi multimedia mampu mengubah cara penyampaian pengetahuan dan dapat menjadi alternatif pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas tradisional. Pembelajaran dalam kelas tradisional, sebelumnya dituntut untuk dapat menerapkan sistem pembelajaran era revolusi industri 4.0 yakni pembelajaran yang berbasis teknologi informatika. Tuntutan ini memiliki tantangan tersendiri bagi institusi pendidikan, para pendidik dan peserta didik dalam mewujudkannya.

Tantangan besar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah pun semakin kompleks sejak diumumkannya pembatasan sosial sebagai pencegahan penyebaran Covid-19. Di sinilah pembelajaran daring dimulai. Berbagai problematika pembelajaran yang dialami oleh pendidik dan peserta didik bermunculan. Pada tataran pelaksanaannya pembelajaran daring memerlukan dukungan perangkat mobile seperti gawai (telepon genggam berbasis android atau ios, laptop, dan tablet) yang dapat digunakan kapan saja untuk mengakses kapan saja dan dimana saja (Gikas dan Grant, 2013). Kebutuhan akan perangkat tersebut tentu tidak semua peserta didik

dapat memenuhinya karena keadaan ekonomi. Selain itu, dari sisi tenaga pendidik, kurang kemampuan dalam menggunakan perangkat mobile ini menjadi kendala. Bahkan, jika pendidik dan peserta didik berada di wilayah yang berada di luar jangkauan jaringan internet, tentu pembelajaran daring ini tidak akan terlaksana dengan baik.

Problematika pembelajaran daring bahasa dan sastra Indonesia di masa pandemi Covid-19 ini diperoleh dari hasil survei pendapat peserta didik. Peserta didik menyampaikan bahwa pembelajaran daring kini membosankan dan melelahkan karena hampir setiap guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tatap muka secara virtual (Arisuhud, 2020). Selain itu, permasalahan dalam melaksanakan pembelajaran daring yakni banyaknya tugas yang tidak menyesuaikan dengan waktu penyerahan tugas mengingat tugas yang diberikan tidak hanya dari guru bahasa Indonesia (Junior: 2020). Pernyataan senada juga muncul yakni penugasan yang sudah dipenuhi tidak memperoleh umpan balik dari guru, sehingga ia tidak mengetahui hasil yang diperoleh dari penugasan tersebut (Valentina, 2020). Beberapa kendala itu dialami oleh peserta didik yang harus segera diatasi. Di sisi lain, argumen dari rekan sejawat sebagai salah satu tenaga pendidik juga mengalami kendala dalam pemanfaatan media pembelajaran yang beragam sehingga harus tepat dalam menyalurkannya kepada peserta didik (Siswanto, 2020).

Berbagai latar belakang masalah di atas dapat menjadi kajian menarik untuk diteliti dan dikaji guna memperoleh solusi. Untuk itu, pendidik dan peserta didik perlu merevitalisasi pengetahuan dan kemampuannya dalam melaksanakan pembelajaran daring sehingga mencapai pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang maksimal.

Pelaksanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada masa pandemi Covid-19 terus mengalami pasang surut. Pada

beberapa kesempatan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia mengalami kendala dalam pemanfaatan sarana dan prasarana, kemampuan pedagogik guru, dan aspek sikap, pengetahuan serta keterampilan peserta didik. Pemanfaatan sarana dan prasarana oleh guru bahasa Indonesia dalam masa pandemi tengah diupayakan semaksimal mungkin. Sehingga, guru tidak hanya memanfaatkan satu media pembelajaran saja dalam pelaksanaan pembelajaran melainkan lebih dari satu media.

Tugas tambahan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dilakukan melalui pembuatan tugas-tugas proyek baik secara individu maupun kelompok yang berkaitan dengan topik atau materi ajar dan beberapa diantaranya diintegrasikan untuk edukasi menjaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

Kebijakan belajar dari rumah selama masa pandemi Covid-19 masih terus berlanjut hingga saat ini. Pemerintah pun tidak dapat memberikan kepastian, kapan belajar dari sekolah dapat dilakukan kembali? Para peserta didik dan guru tentunya sudah rindu untuk dapat bertatap muka langsung melaksanakan pembelajaran dengan maksimal. Namun, guru maupun peserta didik tidak boleh larut dengan keadaan dan suasana saat ini, melainkan terus semangat berinovasi menciptakan pembelajaran yang bermakna.

Berdasarkan hasil pengamatan, maka revitalisasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di masa pandemi Covid-19 ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang variatif. Pembelajaran tersebut guru dapat mengadopsi, memilih, dan mengkreasikan ke dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Praktik revitalisasi pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan media Zoom Cloud Meeting, YouTube, Instagram, Google Classroom, dan Google Form. Melalui revitalisasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan pemanfaatan media

pembelajaran di atas, peserta didik akan lebih mandiri dan memiliki motivasi belajar yang semakin meningkat. Meskipun sudah semaksimal mungkin untuk merevitalisasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia melalui lima media pembelajaran yang disebutkan dalam penelitian ini, tentu masih perlu untuk mengembangkan dan menganalisis lebih lanjut untuk mencapai kesempurnaan pembelajaran. Khususnya pada penggunaan berbagai aplikasi lainnya. Tentunya guru maupun peserta didik dapat menjadikan kelima aplikasi ini sebagai media pembelajaran dan penilaian dalam pembelajaran daring bahasa dan sastra Indonesia di masa pandemi Covid-19.

Ada empat indikator pembelajaran dapat ditemukan dalam pembelajaran, sebaga berikut.

1. Kemampuan guru mengelola pembelajaran tematik yang dilakukan tatap muka setelah adanya pandemi dapat dikatakan cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari guru yang mengajar di kelas tidak mengalami kesulitan untuk mengelola pembelajaran tematik secara tatap muka kembali, karena guru menganggap bahwa proses belajar siswa tetap dijalankan selama pandemi secara daring. Jadi tidak begitu sulit mengelola kelas kembali setelah adanya pandemi.
2. Aktivitas siswa saat pembelajaran tatap muka dalam pembelajaran tematik pasca pandemi dapat dikatakan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari suasana belajar yang tercipta di kelas dengan kegiatan belajar yang dilakukan antara guru dan siswa. Adanya semangat dari siswa untuk belajar kembali secara tatap muka di sekolah. Aktivitas aktif yang diamati selama belajar yaitu siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru, siswa dapat bertanya jika tidak paham, dan siswa mampu membuat kesimpulan dengan bahasa mereka sendiri.
3. Respon siswa terhadap pembelajaran tematik secara tatap muka adalah cukup positif. Hal tersebut dapat dilihat dari proses belajar siswa yang membuat perasaan senang saat belajar

pembelajaran tematik. Cara guru mengajar dengan baik di kelas membuat siswa merasa senang dan antusias dalam memulai kembali belajar secara tatap muka. Apalagi semangat dari siswa untuk bertemu dengan teman lainnya karena selama pandemi belajar di rumah yang membuat bosan.

4. Hasil belajar siswa setelah pembelajaran tatap muka khusus pada pembelajaran tematik dapat dikatakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan nilai yang terjadi saat pandemi yang menurun drastis dengan nilai setelah dilakukan pembelajaran tatap muka kembali yang meningkat. Hal ini membuktikan bahwa hasil belajar siswa akan berdampak baik jika proses belajar dilaksanakan secara tatap muka.

Pembelajaran tematik dapat efektif apabila dari empat indikator tersebut dapat ditemukan didalam proses pembelajaran tatap muka yang sedang berlangsung dengan baik.

BAB 2

**MANAJEMEN
PESERTA DIDIK**

MANAJEMEN PESERTA DIDIK BERBASIS KESEHATAN MENTAL BAGI REMAJA

Prabawati Nurhabibah

Isu mengenai kesehatan mental siswa jenjang pendidikan SMP dan SMA, merupakan isu yang menarik perhatian, sebab perilaku belajar yang baik didorong oleh kondisi mental yang sehat, baik, atau normal. (Lusi et al., 2009). Peserta didik yang memiliki permasalahan terkait dengan kesehatan mental akan menunjukkan prestasi belajar yang tidak maksimal (Lusi et al., 2009). World Health Organization (WHO) mencatat bahwa sebanyak 16% dari permasalahan kesehatan dunia berkaitan dengan kondisi kesehatan mental pada remaja usia 10-19 tahun. Selain itu, sebagian permasalahan kesehatan mental mulai muncul pada usia 14 tahun tetapi kebanyakan kasus tidak terdeteksi dan tidak tertangani (WHO, 2020). Hal ini juga didukung oleh pernyataan *National Alliance of Mental Health* yang menyatakan bahwa 50% gangguan kesehatan mental permanen dimulai saat seseorang berusia 14 tahun (Ali & Karyani, 2015). Secara global, permasalahan kesehatan mental yang paling banyak dialami kalangan remaja adalah depresi (Juliawan et al., 2020; WHO, 2020).

Melihat fenomena masalah kesehatan mental yang terjadi pada anak dan remaja di Indonesia pada masa pandemi, diperlukan upaya strategis dalam mengevaluasi sistem PJJ sekaligus memberikan dukungan kesehatan mental bagi anak dan remaja.

Penyediaan layanan dukungan sosial yang memberikan fasilitas layanan kesehatan mental (mental health) bagi para siswa melalui sekolah merupakan hal strategis yang perlu diperkuat pada era pandemi saat ini. Dengan adanya penyediaan layanan ini baik online maupun offline, baik melalui masyarakat maupun konseling sebaya, harapannya masyarakat dapat dengan mudah mengakses dukungan sosial jika diperlukan. Pemberian layanan kesehatan mental bagi anak dan remaja juga dapat diperkuat oleh sekolah. Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran jarak jauh, pihak sekolah selainnya memperhatikan kondisi para siswanya tidak hanya pada kualitas kemajuan pembelajarannya. Akan tetapi, hal yang lebih penting adalah memberikan perhatian lebih atas keamanan, kondisi kesejahteraan mental anak, dan hal lain terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh anak dalam proses pembelajaran di rumah.

Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS), survei kesehatan mental nasional pertama yang mengukur angka kejadian gangguan mental pada remaja 10 – 17 tahun di Indonesia, menunjukkan bahwa satu dari tiga remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental sementara satu dari dua puluh remaja Indonesia memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir.

Angka ini setara dengan 15,5 juta dan 2,45 juta remaja. Remaja dalam kelompok ini adalah remaja yang terdiagnosis dengan gangguan mental sesuai dengan panduan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* Edisi Kelima (DSM-5) yang menjadi panduan penegakan diagnosis gangguan mental di Indonesia.

Meskipun pemerintah sudah meningkatkan akses ke pelbagai fasilitas kesehatan, hanya sedikit remaja yang mencari bantuan profesional untuk masalah kesehatan mental mereka. Padahal, hampir 20% dari total penduduk Indonesia berada dalam rentang usia 10 – 19 tahun, sehingga populasi remaja dapat dikatakan memiliki peran penting bagi perkembangan Indonesia,

terutama untuk meraih bonus demografi dan merealisasikan visi Indonesia Emas 2024.

Temuan lain dari I-NAMHS adalah bahwa kebanyakan (38.2%) pengasuh remaja memilih untuk mengakses layanan kesehatan mental dari sekolah untuk remaja mereka. Di sisi lain, dari semua pengasuh utama yang menyatakan bahwa remaja mereka membutuhkan bantuan, lebih dari dua perlima (43.8%) melaporkan bahwa mereka tidak mencari bantuan karena lebih memilih untuk menangani sendiri masalah tersebut atau dengan dukungan dari keluarga dan teman-teman.

Berdasarkan temuan di atas, sudah sepantasnya seorang pendidik harus lebih memperhatikan kesehatan mental yang dialami oleh peserta didik. Permasalahan ini jangan dianggap lagi sebagai sesuatu yang tabu sama halnya seperti membicarakan persoalan seks bebas yang menimpa remaja di Indonesia. Sudah banyak kasusnya yang terjadi di sekolah kasus perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi yang merupakan tiga dosa besar Pendidikan. Ini semua bermuara pada kesehatan mental para peserta didik yang harus diperbaiki.

Banyak dari para pendidik yang menganggap bahwa kesehatan mental peserta didik terganggu disebabkan karena kurangnya ibadah. Padahal tidak ada korelasinya antara seseorang yang rajin ibadah dengan kesehatan mental yang terganggu. Mental yang Tangguh akan terbentuk dari pembiasaan yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah. Sehingga dari kebiasaan itulah yang nantinya akan membentuk karakter.

SUPERVISI KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU

Hetilaniar

Salah satu faktor yang terpenting dalam suatu lembaga atau organisasi adalah sumber daya manusia. Dengan demikian setiap lembaga atau organisasi harus selalu meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusianya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu lembaga atau organisasi. Salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan ialah melakukan pemberdayaan kepala sekolah. Sebab kepala sekolah merupakan motor penggerak bagi sumber daya sekolah terutama guru-guru dan karyawan sekolah. Peran kepala sekolah begitu besar dalam proses pencapaian tujuan pendidikan, sehingga bisa dikatakan bahwa sukses tidaknya kegiatan sekolah sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepala sekolah itu sendiri. Seluruh sumber daya harus didayagunakan sedemikian rupa. Guru-guru perlu digerakkan ke arah suasana kerja yang positif, menggairahkan dan produktif. Biar bagaimanapun guru adalah input yang pengaruhnya sangat besar pada proses belajar. Demikian pula dengan penataan fisik dan administrasi atau ketatalaksanaan perlu dibina agar disiplin dan semangat belajar yang tinggi bagi siswa. Semua ini mengisyaratkan perlunya penerapan kepemimpinan pendidikan oleh seorang kepala sekolah.

Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekolah ialah melalui program

supervisi. Supervisi memegang peranan penting karena sukses tidaknya program pengajaran di sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah. Sebagai pemimpin di sekolah kepala sekolahlah yang mengatur kebijaksanaan dan pelaksanaan program pendidikan secara keseluruhan. Kepala sekolah sebagai supervisor di sekolah mempunyai kemampuan untuk menciptakan situasi proses belajar mengajar yang sedemikian rupa agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di tangan kepala sekolah tanggungjawab pembinaan guru atau supervisi berada hal ini disebabkan karena pada kenyataannya kepala sekolah sekolah setiap hari bergaul dan bekerjasama dengan guru-guru. Seorang kepala sekolah bertanggungjawab penuh terhadap kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Kepala sekolah harus obyektif dalam mempelajari setiap masalah–masalah yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugasnya.

Kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional bertanggung jawab untuk memelihara dan meningkatkan kualitas program instruksional guna pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan pihak sekolah baik secara efektif dan efisien. Melaksanakan kegiatan supervisi kelas adalah salah satu tugas kepala sekolah teknik supervisi yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah salah satunya adalah teknik pengamatan kelas, dalam tesis ini disebut sebagai supervisi kelas. Dalam proses belajar mengajar kompetensi guru sangat penting karena guru merupakan garda terdepan dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan. Wujud dari pelaksanaan profesinya, yang mana pada dasarnya guru profesional adalah guru yang memiliki keterampilan, kompetitif, cakap dalam pengajaran serta memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan penyesuaian diri dalam masyarakat kompetensi yang dimiliki oleh guru. Kompetensi profesional guru sangat penting guna mewujudkan tujuan pendidikan untuk mencetak peserta didik yang cerdas dan mampu menjadi generasi penerus yang handal.

Kemampuan guru dalam melakukan tugas pembelajaran dan bertanggung jawab atas peserta didik yang dibimbingnya dengan meningkatkan prestasi belajar peserta didik merupakan

kinerja guru. Arti kinerja guru yaitu suatu kemampuan seorang guru dalam melakukan tugasnya dan menggambarkan suatu sikap atau perbuatan yang ditampilkan guru selama melaksanakan aktivitas pembelajaran.

Seluruh usaha guru untuk mengantarkan proses pembelajaran mencapai tujuan pendidikan disebut kinerja guru. Kinerja guru meliputi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan tugas profesionalnya sebagai guru dan tugas pengembangan pribadi guru. Tugas profesional guru adalah mencakup kegiatan berantai evaluasi. Tugas guru dimulai dari merencanakan pembelajaran, melaksanakan, mengevaluasi sampai dengan tindak lanjut selain itu guru juga dituntut untuk memiliki pemahaman wawasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik serta harus mampu mengembangkan potensi peserta didik. Sesuai dengan kepentingannya, kepala sekolah, guru, dan peserta didik diperbolehkan mengambil keputusan berdasarkan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memberikan kenyamanan bagi kepala sekolah, guru dan peserta didik untuk menerapkan suatu pembelajaran yang membangun inovasi dan kreativitas.

Kurikulum merdeka dapat dilaksanakan atas kebijakan kepala sekolah, dengan pilihan untuk mengganti bentuk dari kurikulum merdeka agar disesuaikan dengan kebutuhan. Pilihan bentuk penyesuaian kurikulum merdeka menawarkan keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan pendidikan dan mengembangkan berbagai alat bantu pembelajaran yang telah ada di satuan pendidikan sesuai dengan sekolahnya. Dalam menentukan Kurikulum Merdeka, kepala sekolah memainkan peran penting. Hal ini karena ide dasar Kurikulum Merdeka diambil dari komponen satuan pendidikan. Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam dan sekitar sekolah, serta prasarana fisik sekolah. Kurikulum Merdeka berisi ide-ide bermakna tetapi tidak memaksa sekolah untuk menggunakannya. Menurut infrastrukturnya, staf yang tersedia, dan lingkungan fisik, sekolah bebas memilih kategori Implementasi Kurikulum merdeka.

FORMULA PENDIDIKAN GENERASI ALFA

Meina Febriani

Arine (36 tahun) seorang ibu dari generasi Y memiliki seorang anak (9 tahun) yang masuk dalam kategori generasi Alfa. Sebagai orang tua, Arine mengatakan bahwa ia memiliki PR besar dalam menyiapkan masa depan terbaik bagi anaknya. “Menjadi apakah anakku kelak? Bagaimanakah pola pendidikan holistik untuk anakku?” merupakan pertanyaan-pertanyaan yang membayangi orang tua generasi Alfa.

Kegelisahan Arine juga dialami oleh Yusuf (48 tahun), seorang guru SD. Sebagai generasi X, dia menyadari bahwa cara belajar peserta didiknya haruslah adaptif terhadap perubahan. Sebab, menurut Yusuf, saat ini peserta didiknya (generasi Alfa) ditengarai memiliki kecenderungan karakteristik yang berbeda dengan generasinya. Yusuf bercita-cita kelak peserta didiknya tetap menjadi pribadi yang humanis walaupun akrab dengan teknologi canggih.

Besar kemungkinan, para orang tua dan guru juga mendapati problematika yang sama. Kita tentu memahami bahwa setiap rentang zaman telah melahirkan generasi yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Kemajuan teknologi yang makin masif ini berdampak signifikan terhadap gaya hidup dan pola pikir generasi Alfa (kelahiran tahun 2010-2024) yang merupakan generasi terakhir dalam rentang zaman saat ini.

Bagaimanakah karakteristik khas generasi Alfa? Generasi ini sudah sangat lekat dengan gawai dan internet. Boleh dikatakan, generasi Alfa tidak mengenal konsep gagap teknologi. Sebab, sejak

lahir mereka sudah disuguhi dengan tayangan bergambar dan segala rupa fitur teknologi digital. Justru itulah, diperlukan transformasi pola pendidikan generasi Alfa.

Gambaran profesi generasi Alfa pada masa depan perlu menjadi bahan refleksi dunia pendidikan untuk merumuskan formula pendidikan terbaik. Pola pendidikan semestinya selaras dengan kebutuhan zamannya. Sudah pasti, cara belajar antara *baby boom generation* (kelahiran 1946-1960) akan sangat berbeda dengan generasi Alfa. Bayangan keberagaman profesi versi *baby boom generation* yang hanya sebatas guru, dokter, tentara, polisi, dan seterusnya bisa jadi sudah tidak lagi berlaku bagi masa depan profesi generasi Alfa.

Tidak usah jauh-jauh, pada tahun 2025 mendatang, sekitar 85 juta lapangan kerja dilaporkan akan punah karena perkembangan teknologi digital. Selain itu, telah diprediksi bahwa 65% peserta didik saat ini, kelak akan bekerja pada profesi baru yang belum ada pada saat ini (Laporan survei pekerjaan masa depan dari Forum Ekonomi Dunia WEF, 2020). Transformasi zaman pada era *society* 5.0 telah berimplikasi pada munculnya kecerdasan buatan yang akan menghapus beberapa profesi yang bisa digantikan oleh robot. Begitu juga dengan munculnya profesi-profesi baru yang berorientasi pada kehidupan digital.

Generasi Alfa sebagai *digital native* telah terbiasa hidup dengan kondisi penetrasi digital yang masif. Informasi didapatkan dengan sangat mudah dengan menggunakan fitur internet. Ruang dan waktu tidak lagi menjadi batasan, jarak makin tidak berarti, pergaulan tidak lagi ditentukan dari faktor lokasi, bahkan pendidikan pun bisa dilakukan dalam jarak jauh melalui teknologi virtual. Besar kemungkinan generasi inilah yang terancam menjadi generasi yang individualis. Lalu bagaimana cara menyiapkan bekal pendidikan terbaik untuk generasi Alfa?

Meneropong Pola Pendidikan

Generasi Alfa mendapatkan kemudahan akses informasi melalui dunia digital. Kecenderungan itu telah mengonstruksi pemahaman baru bahwa kecerdasan bukan lagi kemampuan mengingat informasi dengan baik, melainkan bagaimana bisa berpikir kritis. Dapat dikatakan, generasi Alfa justru banyak belajar tentang pandangan hidup dari para *influencer* maupun tokoh-tokoh akademik di dunia maya. Pola interaksi secara virtual telah menjadi gaya komunikasi yang familier.

Berdasarkan karakteristik khas tersebut, perlu diramu formula pola pendidikan terbaik bagi generasi Alfa. Sebab, pendidikan adalah sebuah proposal kerja yang berimplikasi pada masa depan sebuah generasi. Ini menjadi hal yang penting sebab dinamika zaman telah berdampak sistemik terhadap pola kehidupan, termasuk paradigma pendidikan yang ditempuh. Formula tersebut perlu disikapi dengan bijak oleh orang tua sebagai pendidik di lingkup informal maupun guru sebagai pendidik di lingkup formal.

Penulis merekomendasi beberapa poin strategis sebagai formula pendidikan generasi alfa. Pembelajaran yang berpusat pada anak adalah poin yang esensial. Kita harus menyadari bahwa sumber informasi tidak lagi menjadi kendala pada sektor pendidikan saat ini dan kelak. Sebab, masifnya perkembangan teknologi digital telah membuat generasi alfa bisa mengakses informasi dari mana pun dengan jaringan internet.

Berikutnya, pemanfaatan teknologi digital sebagai sebagai sumber, media, dan wahana belajar dengan maksimal. Perkembangan teknologi semestinya direspons dengan terbuka pada sektor pendidikan, termasuk bagaimana perkembangan teknologi menjadi potensi yang menguntungkan, bukan bahaya yang merugikan. Misalnya, munculnya *chatbot AI* bertama ChatGPT yang dapat memproduksi bahasa manusia. Tentu menjadi hal menarik bagi dunia pendidikan yang tentunya harus disikapi dengan bijak dan strategis sesuai dengan prinsip-prinsip edukatif.

Selain itu, pemanfaatan laman-laman pendidikan seperti *google scholar* sebagai sumber belajar bisa ditempuh dalam pembelajaran di kelas. Fitur-fitur kreatif yang saat ini sudah disediakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi seperti Suara Edukasi Kemdikbud (<http://suaraedukasi.kemdikbud.go.id>), Portal Rumah Belajar (belajar.kemdikbud.go.id), TV edukasi Kemendikbud (tve.kemdikbud.go.id/live/), dan lain sebagainya bisa jadi alternatif pendidikan yang berpihak pada dunia digital. Pembelajaran pun bisa dilaksanakan secara daring, *blended*, maupun *hybrid* melalui *learning management system* (LMS), seperti Google Class Room.

Selanjutnya, pendidikan yang berbasis personal adalah pendekatan yang juga bisa ditempuh. Orang tua dan pendidik harus memahami bahwa anak adalah individu yang unik. Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa pendidikanlah yang harus fleksibel terhadap kondisi dan kebutuhan generasi alfa. Pendidikan berbasis personal menganggap bahwa anak memiliki kemandirian dalam belajar dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan. Pembelajaran disesuaikan dengan minat, kekuatan, kebutuhan setiap peserta didik, serta memberikan ruang waktu pelaksanaan pembelajaran yang fleksibel

Akses informasi yang masif menjadi dasar pertimbangan pemilihan prinsip pendidikan. Pendidikan yang berbasis pengalaman dan kolaborasi menjadi salah satu solusi yang bisa ditempuh. Dalam pembelajaran tersebut, anak akan dibebaskan untuk melakukan eksplorasi dalam mencari pengalaman sebanyak-banyaknya sehingga pembelajaran dilakukan secara inkuiri. Anaklah yang berhasil menjadi “penemu” dalam konsep-konsep yang sedang dipelajarinya. Selain itu, proses eksperimental tersebut dilaksanakan melalui strategi kolaboratif bersama rekan sejawat. Harapannya, dampak pengiring berupa tumbuhnya sikap menghargai dan mau bekerja sama dengan baik bisa tertanam pada generasi Alfa.

Terakhir, meningkatkan fokus pada peningkatan kecerdasan emosional dan spiritual. Generasi Alfa dikenal sebagai generasi

paling transformatif. Generasi tersebut dapat mengakses informasi dengan sangat cepat dan mudah. Oleh sebab itu, ihwal kompetensi literasi digital bukan lagi masalah yang krusial. Justru, candu digital itulah yang harus diantisipasi secara bijak. Komunikasi virtual yang intensif mungkin saja mereduksi jiwa-jiwa humanis generasi Alfa. Sebab, mereka akan lebih sering berhadapan dengan gawai daripada interaksi antarmanusia secara nyata. Oleh sebab itu, penguatan akhlak melalui peningkatan kecerdasan emosional dan spiritual menjadi hal krusial dalam formula belajar generasi Alfa.

Pada prinsipnya, kunci dari suksesnya pendidikan adalah adaptif terhadap perubahan. Oleh sebab itu, menyiapkan anak menjadi generasi literat yang adaptif menjadi bekal dalam menyongsong transformasi kehidupan yang berimbas pada hilang dan tumbuhnya berbagai profesi. Harapannya, dengan memproyeksikan formula pendidikan pada generasi Alfa, anak-anak tidak mengalami *culture shock syndrome* dan gegar teknologi. Hiduplah pada zamannya. (*MF*)

MENGELOLA KECERDASAN PADA ANAK

Imaniah Kusuma Rahayu

Salah satu peranan lembaga pendidikan yang tertuang dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 adalah mengembangkan kemampuan, membentuk karakter, mengembangkan peradaban, dan mencerdaskan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pendidikan mempunyai peran penting dalam rangka proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada dasarnya peningkatan kualitas pendidikan merupakan proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Untuk mencapai itu semua, diperlukan suatu usaha pengelolaan dan pengetahuan yang disebut dengan istilah manajemen.

Manajemen peserta didik adalah semua kegiatan yang berkaitan langsung dengan peserta didik, diawali dari proses seleksi, pembinaan peserta didik selama berada di sekolah baik yang berkaitan dengan akademik dan non akademik, sampai peserta didik menamatkan pendidikannya. Hal-hal yang berkenaan dalam penanganan peserta didik dibutuhkan keterampilan, kejelian, kepekaan, keseriusan, dan tekad yang kuat dalam rangka memberikan perhatian yang baik. Tugas sekolah sangat berat dan kompleks dalam mengelola dan membangun potensi, bakat dan minat peserta didik mengingat kemampuan peserta didik yang bervariasi. Kepala sekolah sebagai penentu kebijakan harus dapat

mengondisikan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan harus diterapkan dengan baik, kedisiplinan baik yang berkaitan dengan akademik maupun non akademik harus direncanakan dengan baik.

Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan psikomotorik peserta didik; menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum (kecerdasan), bakat dan minat peserta didik; menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik.

Manajemen peserta didik secara umum memiliki tiga tugas utama, yaitu berkaitan dengan penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin.

Berkaitan dengan pendidikan di Indonesia, selama ini lebih menekankan pada pentingnya nilai akademik. Menurut Gardner ada 9 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yaitu: kecerdasan bahasa, kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual dan spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musical, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial. Masing-masing kecerdasan memiliki karakteristik dan cara pengembangan kecerdasan yang berbeda. Oleh karena diharapkan orang tua dapat mengenali sejak dini kecerdasan yang dimiliki oleh anak mereka dan para guru memiliki kemampuan untuk melihat kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didiknya.

Mengembangkan Kecerdasan

Tipe kecerdasan yang pertama adalah visual spasial. Karakteristik dari kecerdasan ini adalah mampu menginterpretasikan gambar dan grafik dengan baik. Anak yang memiliki kecerdasan ini menikmati kegiatan menggambar, melukis, dan berbagai seni visual lainnya, serta dapat mengenali pola dengan mudah. Untuk dapat mengembangkan kecerdasan tipe ini, anak dapat diberi kesempatan

untuk melukis, mewarnai, dan mendesain. Selain itu, anak juga dapat diajak untuk menyelesaikan teka-teki atau aktivitas 3D lainnya.

Tipe kedua adalah kecerdasan verbal linguisti. Anak dengan kecerdasan ini mampu menggunakan kata-kata dengan baik ketika menulis maupun berbicara. Biasanya anak tersebut pandai dalam menulis cerita, menghafal, dan gemar membaca. Untuk mengembangkannya, dapat mendiskusikan cerita buku yang sudah pernah dibaca atau bermain kata.

Kecerdasan yang ketiga adalah logika matematika. Anak yang memiliki kecerdasan ini, akan dengan mudah mengenali pola, menggunakan logika, dan menganalisis masalah dengan logis karena cenderung berpikir secara konseptual terkait angka dan pola. Pengembangan kecerdasan ini dapat dilakukan dengan mendorong anak untuk menyelesaikan berbagai jenis teka-teki dan memberikan kebebasan pada anak untuk mengajukan pernyataan.

Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik yang memiliki pergerakan tubuh, aksi dan kekuatan fisik yang baik. Koordinasi tangan dan kaki serta ketangkasan yang bagus dimiliki oleh anak dengan kecerdasan ini. Libatkan anak dalam ekstrakurikuler olahraga adalah salah satu cara untuk mengembangkan kecerdasannya. Untuk melatih kemampuan motoriknya, ajarkan origami atau menyulam.

Anak dengan kecerdasan musical mampu memahami pola, ritme, dan nada. Anak-anak ini sangat menghargai music dan bisa menyusun serta menampilkan music dengan baik. Mendukung anak untuk memainkan alat music, menulis lagu, bergabung dengan kelompok music dapat membantu mengembangkan kecerdasan ini.

Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Anak ini pandai memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, mereka juga pandai menilai emosi, motivasi, keinginan, dan niat orang lain disekitarnya. Mendorong aktivitas kolaboratif anak bersama teman baik di dalam maupun luar sekolah dapat membantunya mengembangkab kecerdasan ini. Memperkenalkan

buku dan pengalaman lintas budaya, membantu belajar berbagi dan negosiasi juga dapat mengembangkan kecerdasan ini.

Kecerdasan ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Anak ini dapat memahami emosi, perasaan, dan memotivasi diri sendiri. Cenderung melakukan refleksi dan introspeksi juga kelebihan anak dengan kecerdasan ini. Membantu menetapkan tujuan dan membimbing untuk mencapainya dapat membantu dalam mengembangkan kecerdasan ini.

Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan naturalis, individu ini memiliki kecerdasan lebih selaras dengan alam, tertarik dalam memelihara dan mengeksplor lingkungan, serta lebih peka dengan perubahan alam sekitar. Dengan mengajak ke museum, pameran sains, dan kebun binatang dapat membantu mengembangkan kecerdasannya. Selain itu, mengajarkan untuk membuat buku catatan hasil observasi juga dapat dilakukan.

Kecerdasan terakhir adalah eksistensial yang sangat menikmati proses berpikir dan senang mempertanyakan hal-hal yang sudah ada. Yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasannya adalah bersabar dengan berbagai pertanyaan yang diajukan berulang kali. Selain itu dapat juga mengeksplor topic tersebut dan membahasnya sesuai usianya. Itulah berbagai kecerdasan yang ada dan bagaimana cara mengembangkannya. Dengan adanya Profil Pelajar Pancasila, yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kecerdasan tersebut.

MANAJEMEN PESERTA DIDIK SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN MUTU LULUSAN

Rizky Widia Kardika

Manajemen peserta didik merupakan salah satu strategi yang penting dalam meningkatkan mutu lulusan. Manajemen peserta didik mencakup berbagai aspek seperti pengaturan jumlah peserta didik, pengembangan kualitas pendidikan, dan peningkatan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam konteks ini, manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan mereka.

Salah satu aspek penting dari manajemen peserta didik adalah pengaturan jumlah peserta didik di kelas. Jumlah peserta didik yang terlalu banyak dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan, karena guru sulit memberikan perhatian individu kepada setiap siswa. Selain itu, jumlah peserta didik yang berlebihan juga dapat meningkatkan resiko penyebaran penyakit, terutama dalam situasi pascapandemi seperti saat ini. Oleh karena itu, pengaturan jumlah peserta didik yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perhatian dan pengajaran yang optimal.

Peningkatan mutu lulusan peserta didik merupakan tujuan utama dari setiap institusi pendidikan. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas

pendidikan. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu lulusan peserta didik.

Pertama, perlu dilakukan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan memenuhi standar mutu pendidikan. Kurikulum yang baik harus mampu mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang berkualitas dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, kurikulum juga harus dirancang dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi sehingga siswa mampu mengikuti perkembangan zaman.

Selain itu, manajemen peserta didik juga melibatkan pengembangan kualitas pendidikan. Hal ini meliputi pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan memenuhi standar mutu pendidikan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta pengembangan keterampilan guru dalam memberikan pengajaran yang efektif dan inovatif. Peningkatan kualitas pendidikan juga melibatkan pemberian perhatian pada aspek non-akademis seperti keterampilan sosial dan emosional siswa.

Kedua, institusi pendidikan juga perlu meningkatkan kualitas pengajaran yang diberikan. Guru harus memiliki keterampilan dan kompetensi yang cukup dalam mengajar agar mampu memberikan pengajaran yang efektif dan inovatif. Peningkatan kualitas pengajaran dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan guru dalam mengajar serta penggunaan teknologi yang relevan dalam pembelajaran.

Ketiga, institusi pendidikan juga perlu mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Dengan mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan belajar mengajar, diharapkan siswa akan lebih terpacu untuk belajar dan mencapai hasil yang lebih baik.

Manajemen peserta didik juga mencakup peningkatan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara seperti penggunaan metode pembelajaran yang inovatif, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang relevan, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan di sekolah. Dengan meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, diharapkan mereka akan lebih terpacu untuk belajar dan mencapai hasil yang lebih baik.

Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen peserta didik merupakan strategi penting dalam meningkatkan mutu lulusan. Upaya untuk mengatur jumlah peserta didik, meningkatkan kualitas pendidikan, dan meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dapat membantu memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, peran manajemen peserta didik dalam memastikan mutu lulusan sangat penting dan perlu terus diperhatikan oleh institusi pendidikan.

Peningkatan mutu lulusan peserta didik merupakan tujuan utama setiap institusi pendidikan. Untuk mencapai tujuan ini, institusi pendidikan perlu melakukan strategi yang efektif seperti pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa, meningkatkan kualitas pengajaran, dan mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan strategi yang tepat, diharapkan mutu lulusan peserta didik akan terus meningkat dan mampu bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif.

PERPUSTAKAAN DIGITAL MEMOTIVASI SISWA BERLITARASI

Hayatun Nufus

Pasca pandemi Pendidikan di Indonesia kian berbenah diri. Banyak hikmah yang didapat dari wabah yang datangnya tidak dapat diprediksi. Kehadirannya yang tiba-tiba menyebabkan perekonomian masyarakat menurun. Tidak hanya itu, dunia Pendidikan pun mengalami kemunduran hal ini disebabkan diberlakukannya pembelajaran jarak jauh (PJJ). PJJ ini bertumpu pada internet sementara penyebaran jaringan internet belum merata di wilayah Indonesia. Kita belum siap dengan situasi ini, karena sebelumnya kita belum akrab dengan internet untuk pembelajaran. Keadaan ini menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik.

Adanya wabah Covid 19 telah merubah kebiasaan di dalam pembelajarn, penggunaan internet mulai akrab di dalam dunia Pendidikan kita. Salah satunya adalah penggunaan perpustakaan digital. Menurut Wikipedia, perpustakaan digital atau *digital library* adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi buku sebagian besar dalam bentuk format digital dan bisa diakses dengan komputer. Dengan adanya perpustakaan digital ini, peserta didik tidak perlu ke gedung perpustakaan jika membutuhkan informasi. Peserta didik cukup membuka aplikasi perpustakaan digital yang terdapat di internet.

Beberapa aplikasi perpustakaan digital yang tersedia di internet baik itu gratis maupun berbayar. Menurut *IDN Times* ada 6 aplikasi perpustakaan digital yang mudah diakses yaitu pertama *iPusnas*, *iPusnas* dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Semua buku yang diakses di aplikasi ini gratis. Buku-buku yang disajikan dalam perpustakaan ini berbentuk buku elektronik atau *e-book*. Kedua *Gramedia Digital*, rata-rata masyarakat Indonesia mengenal *took* buku *gramedia*, aplikasi ini tidak diakses dengan gratis. Jika ingin memanfaatkan *gramedia* digital kita harus membayar untuk dapat membaca buku disini. Menurut berita pada *IDN Times* harga membaca secara elektronik lebih murah daripada membeli buku-buku yang sudah dicetak. Ketiga yaitu *Rakata*, aplikasi ini berbeda dengan perpustakaan digital lainnya, karena dilengkapi dengan aplikasi menulis selain membaca. Keempat yaitu *Amazon Kindle*, aplikasi perpustakaan digital ini berasal dari mancanegara. Tidak hanya menyediakan bahan bacaan aplikasi ini juga menjual alat-alat tulis yang dijual dengan menggunakan mata uang dolar. Meski berjualan alat tulis, aplikasi ini menyediakan aplikasi perpustakaan digital secara gratis. Kelima yaitu *Google Play Books dan Audiobooks*, aplikasi ini menyediakan bacaan ringan yang gratis dan bisa diunduh. Keenam, *IBI Library*, aplikasi yang dikembangkan oleh Bank Indonesia Institut memiliki keunikan tersendiri. Pengunjung perpustakaan ini bisa berinteraksi dengan pembaca lain, mirip dengan media sosial yang menyediakan tempat untuk berkomunikasi.

Membuat Perpustakaan Digital Menggunakan *Google Sites*

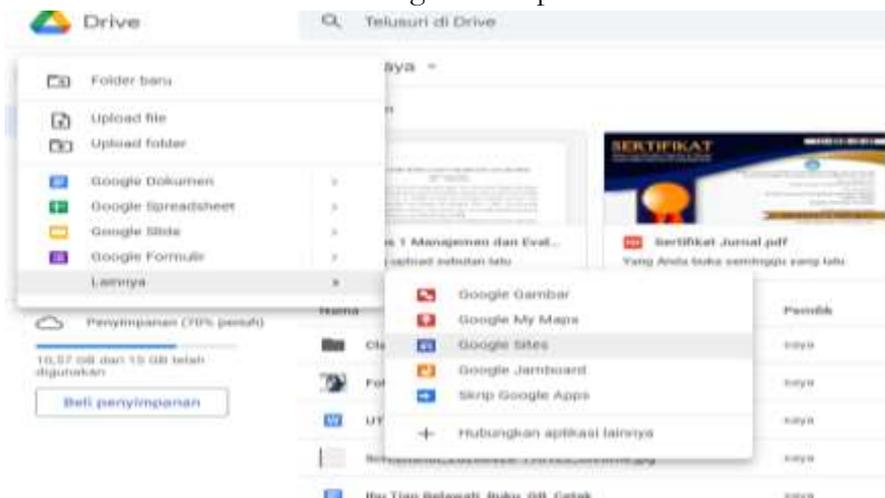
Membuat perpustakaan digital sederhana dapat kita lakukan sendiri. Petunjuk dan langkah-langkah membuatnya terdapat dalam internet atau *Youtube* dengan menggunakan *Google Sites*. Berikut tutorial membuat perpustakaan digital dengan *google sites* atau *web*. Syarat utama membuat aplikasi ini yaitu kita wajib memiliki akun

pada google, yaitu *google drive*. Adapun langkah-langkah membuat perpustakaan digital tersebut adalah sebagai berikut. Sebelum membuat perpustakaan digital, pastikan bahwa Anda memiliki akun *Google Mail* atau *Gmail* sebuah layanan email yang dimiliki oleh google.

Masuk ke google chrome, setelah itu klik *google drive*.

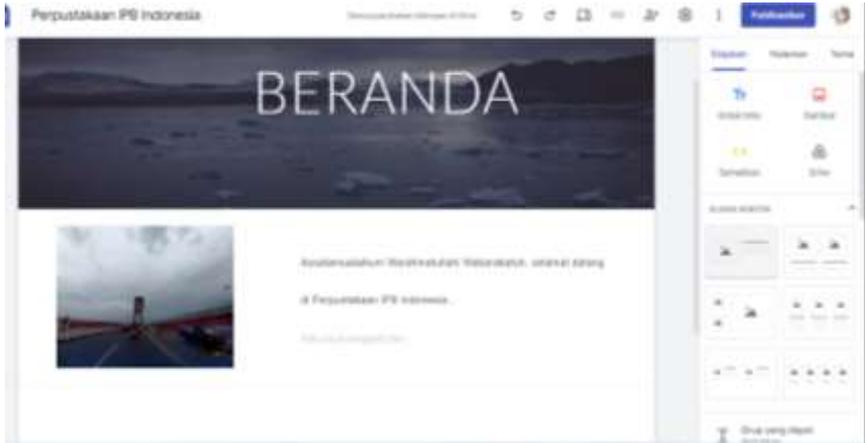


Setelah masuk ke dalam google drive, klik *folder baru*, maka akan muncul gambar seperti di bawah ini.

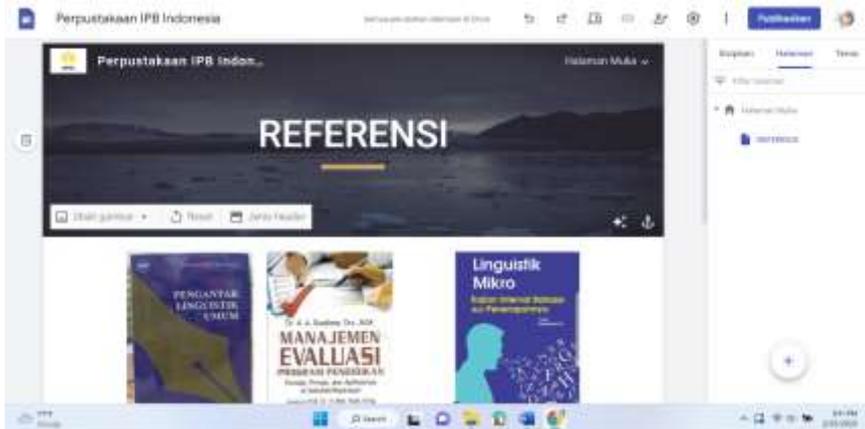


Setelah *folder baru* ditekan, akan muncul beberapa aplikasi, pilih “lainnya” kemudian di sebelah kanan akan muncul lagi beberapa aplikasi dan pilih *google sites*.

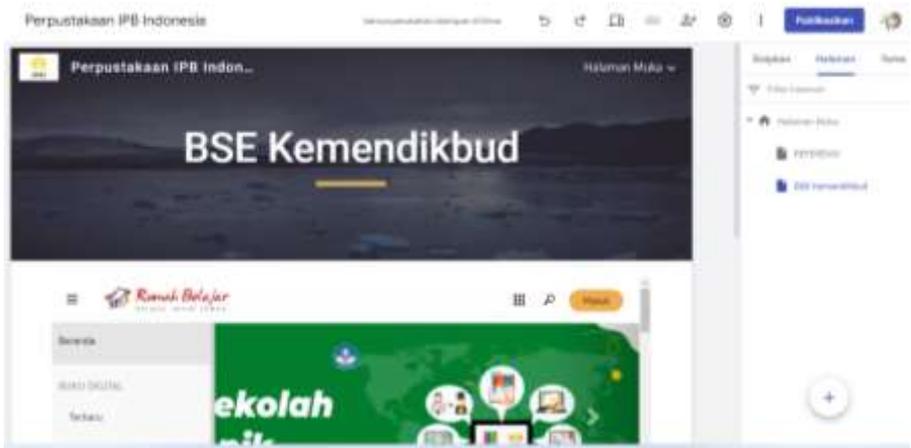
Setelah google sites dipilih akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini.



Untuk menambah halaman pilih “halaman” kemudian beri judul halaman tersebut. Pada gambar di bawah terlihat halaman berikutnya yang diberi nama “referensi” . Pemberian nama ini ditulis sesuai keinginan kita. Pada halaman ini ditampilkan gambar sampul buku yang terdapat dalam perpustakaan ini.



Halaman selanjutnya diberi nama “BSE Kemendikbud”, penamaan ini dikarenakan *e-book* yang digunakan diambil dari akun Kemendikbud berikut link buku-bukunya. Jika ingin mengambil buku-buku dari platform lain, langkah-langkah yang digunakan tetap sama.



Demikianlah langkah-langkah membuat perpustakaan digital yang mudah dilakukan. Untuk lebih jelasnya, berikut *link* video Youtube langkah-langkah membuat perpustakaan digital.

<https://www.google.com/search?tbm=vid&sxsrf=AJOqlzWPKmqLrLLFu5Y7ayUFtm5jsK-QcQ:1677331216678&q=cara+membuat+perpustakaan+digital+dengan+google+site&sa>

Perpustakaan Digital Menumbuhkan Minat Baca Siswa

Kemampuan literasi adalah kemampuan membaca, menulis, dan mencari informasi. Meski minat membaca siswa di Indoensia masih rendah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Program for International Students Assesement* (PISA) tahun 2019, minat membaca warga Indonesia berada pada peringkat ke-62 dari

70 negara, hal ini diperparah dengan adanya Covid 19. Kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia kehilangan kemajuan setara satu semester. Berkunjung ke Gedung perpustakaan mungkin membosankan bagi siswa sehingga keberadaan perpustakaan digital dapat menambah gairah siswa untuk membaca, dan menulis.

Dewasa ini literasi tidak hanya diperoleh melalui buku namun dapat dilakukan dengan menggunakan *e-book* atau buku elektronik. Keberadaan perpustakaan digital membawa angin segar bagi Pendidikan di Indonesia. Perpustakaan ini memberikan nuansa baru dalam pencarian informasi yang mudah dilakukan. Pengunjung tidak harus berada di dalam gedung perpustakaan untuk mendapatkan informasi, Pemanfaatan bahan pustaka dapat dilakukan dimana saja. Kebiasaan menggunakan gawai oleh siswa dapat dimanfaatkan guru dalam mendorong siswa untuk berliterasi. Dengan Guru berperan aktif dalam menumbuhkan minat baca pada siswa. Agar dapat memotivasi siswa gurupun harus terlebih dahulu membudayakan literasi pada dirinya, karena dengan literasi yang baik maka akan dapat mendorong siswa untuk berliterasi dengan ilmu dan wawasan yang dimilikinya.

Membudayakan literasi memang tidak mudah, namun kita harus optimis agar kebiasaan ini dapat tumbuh dalam diri pelajar. Sebagai contoh pada SMPN 30 Palembang, sebelum pembelajaran dimulai siswa diwajibkan untuk membuka perpustakaan digital dan membaca buku yang tersedia di dalam platform tersebut. Setelah membaca buku selesai siswa diminta untuk melaporkan apa yang telah dibaca secara lisan dan tertulis. Guru mendengarkan dan memeriksa tulisan siswa berdasarkan buku yang dibaca. Pelaporan oleh siswa kepada guru dilakukan secara bergiliran antara lisan dan tertulis. Jika dilakukan terus menerus, kegiatan ini dapat menciptakan karakter baru dalam diri siswa yaitu budaya membaca. Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika semua pihak bekerja sama dan bahu membahu dalam menanamkan kebiasaan berliterasi.

INTERNALISASI PENDIDIKAN MORAL PESERTA DIDIK SECARA KOMPREHENSIF

Qurrota Ayu Neina

Berbincang mengenai peserta didik di sekolah tidak lepas dari segala permasalahan yang melingkupinya. Salah satu yang senantiasa menjadi sorotan adalah berkaitan dengan pendidikan moral. Topik ini selalu menjadi dasar penentuan suatu kemajuan dalam proses pendidikan. Hal ini dikarenakan keberhasilan proses pendidikan dapat dilihat dari perubahan sikap dan perilaku peserta didik yang baik pula. Oleh karena itu, pendidikan moral perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk membangun generasi bangsa yang berkualitas.

Bila merujuk pada hakikat pendidikan yang dikonsepsikan oleh Ki Hajar Dewantara, maka persoalan moral ini merupakan tanggung jawab pendidikan. Ki Hajar Dewantara (1962) menyebutkan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (kognitif), dan tubuh anak (psikomotor). Hal tersebut ditegaskan dalam UU No 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, penguasaan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Secara tersirat, undang-undang tersebut mengungkapkan bahwa terciptanya kondisi

masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan hamonis yang dilandasi dengan karakter bangsa. Dengan demikian, kewajiban untuk mendidik anak-anak muda agar bermoral baik sekaligus pintar secara intelektual merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Akhir-akhir ini banyak berita di media cetak dan elektronik yang menggambarkan bahwa moral, perangai, atau watak generasi muda Indonesia makin memprihatinkan. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat beberapa perilaku negatif remaja saat ini yang begitu meresahkan, antara lain: 1) meningkatnya tindak kekerasan atau pertengkaran di kalangan remaja, bahkan sampai menyentuh anak usia sekolah dasar; 2) makin maraknya pacaran peserta didik yang melampaui batas-batas norma agama, dan bahkan ada diantaranya yang telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah; 3) maraknya anak-anak dan remaja yang gemar melihat gambar-gambar dan atau menonton film, dan situs porno; 4) membudayanya ketidakjujuran dan rasa tidak hormat peserta didik kepada orang tua dan guru; 5) menurunnya minat baca, semangat belajar, etos kerja, kedisiplinan, dan meningginya kecenderungan untuk memperoleh hidup yang mudah tanpa kerja keras; 6) menurunnya rasa tanggung jawab peserta didik, baik terhadap diri, keluarga, lingkungan masyarakat, maupun bangsa dan negara; 7) membudayanya nilai hedonisme di kalangan peserta didik; dan 8) makin maraknya penggunaan narkoba serta minuman alkohol.

Berkait dengan hal tersebut, diperlukan usaha yang dilakukan secara komprehensif untuk mengurangi serta mencegah perilaku negatif peserta didik, mulai dari lingkungan terdekatnya yaitu keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Penumbuhan moral peserta didik akan efektif dilakukan melalui internalisasi budi pekerti luhur, dan prosesnya membutuhkan model karakter yang ditampilkan, terutama orang-orang yang dekat dengan peserta didik di sekolah maupun di rumah. Model karakter yang ditampilkan pendidik dan

tenaga kependidikan di sekolah, demikian model karakter yang dilihat peserta didik dari kedua orang tua dan saudara-saudaranya di rumah merupakan proses internalisasi nilai-nilai kebaikan yang tiada henti pada diri peserta didik.

Proses pendidikan moral secara komprehensif ini dapat dilakukan dengan empat strategi, antara lain: 1) pembiasaan moral di rumah; 2) pembiasaan moral di sekolah; 3) integrasi materi dalam proses pembelajaran; dan 4) pembelajaran ekstrakurikuler.

Pertama, strategi pembiasaan moral di rumah. Proses pembiasaan di rumah dapat dilakukan dengan keteladanan dan pembiasaan diri. Memberi contoh dan teladan kepada anak dinilai sebagai strategi paling efektif dalam pembentukan moral anak karena mengajarkan sesuatu yang disertai contoh dan bukti nyata justru lebih menunjukkan hasil yang signifikan. Adapun proses pembiasaan dapat dikembangkan secara berkesinambungan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan positif yang dibangun oleh orang tua yang bersinergis dengan kebiasaan positif dari sekolah.

Kedua, strategi pembiasaan moral di sekolah. Penumbuhan budi pekerti melalui pembiasaan di sekolah, yaitu melalui pembudayaan kehidupan keseharian di sekolah. Pendidikan karakter melalui pembiasaan peserta didik berperilaku yang merefleksikan budi pekerti luhur. Pembiasaan tersebut diupayakan melalui gerakan pembudayaan karakter di sekolah yang dimulai sejak dari masa orientasi peserta didik baru sampai dengan tamat pendidikannya di sekolah. Serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, komite sekolah, alumni, dan orang tua peserta didik yang bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan yang baik dan membentuk generasi berkarakter Pancasila.

Ketiga, prinsip integrasi materi dalam proses pembelajaran. Proses pengintegrasian ini dapat dilakukan dengan mengaitkan nilai-nilai moral melalui tema-tema tertentu dalam seluruh mata pelajaran. Misalnya materi pendidikan budi pekerti dalam kaitan hubungan peserta didik dengan Allah SWT, sikap dan perilaku peserta didik

kepada orang tua dan guru, dapat diintergrasikan ke dalam materi pelajaran Pendidikan Agama.

Keempat, strategi pembelajaran ekstrakurikuler. Penumbuhan moral dengan strategi ini dapat dilakukan melalui kegiatan pramuka, olahraga, seni budaya dan pembelajaran ekstrakurikuler lainnya. Pembelajaran ekstrakurikuler pramuka misalnya, sangat efektif dalam membina budi pekerti peserta didik. Melalui Gugus Depan Gerakan Pramuka dapat diselenggarakan atau berpangkalan di sekolah, peserta didik dibina untuk melaksanakan sepuluh kebajikan (Dasa Dharma).

Melalui keempat strategi ini harapannya model pendidikan moral dapat diterapkan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dengan adanya program-program yang bersinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat harapannya dapat menumbuhkan generasi-generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab dan mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

MANEJEMEN PESERTA DIDIK MELALUI PENGEMBANGAN KEGIATAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

Prasetyo Yuli Kurniawan

Manajemen peserta didik adalah sebuah proses yang kompleks yang melibatkan pengelolaan berbagai aspek dalam situasi pendidikan. Selama bertahun-tahun, telah banyak strategi yang digunakan untuk memfasilitasi pengembangan akademik dan non akademik siswa. Kegiatan akademik dan non-akademik menjadi sangat penting dalam membentuk karakter siswa dan mempersiapkan mereka untuk berinteraksi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Bagaimana pengembangan kegiatan akademik dan non-akademik dapat sejalan dengan manajemen peserta didik?

Pertama-tama, pendekatan manajemen peserta didik yang efektif memperhitungkan perbedaan individual. Setiap siswa memiliki keunikan mereka sendiri dalam hal kepribadian, kemampuan dan bakat. Dalam hal ini, pengembangan kegiatan akademik dan non-akademik harus melibatkan pendekatan yang berbeda untuk setiap siswa. Ada sejumlah program yang tersedia di sekolah yang bertujuan untuk memperhatikan perbedaan individu, seperti program remediasi untuk siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dalam pelajaran, atau program pengembangan bakat untuk siswa yang memiliki bakat khusus dalam bidang tertentu.

Kedua, manajemen peserta didik yang baik juga memperhatikan keseimbangan antara kegiatan akademik dan non-

akademik. Siswa perlu memiliki pengalaman yang menyenangkan di luar kelas untuk membantu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka. Oleh karena itu, kegiatan non-akademik seperti olahraga, seni, musik, dan kegiatan sosial harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah.

Ketiga, manajemen peserta didik yang efektif juga memperhatikan metode pengajaran yang inovatif dan efektif. Siswa harus diberi kesempatan untuk belajar dengan cara yang berbeda, yang dapat mempertahankan minat mereka dan memotivasi mereka untuk belajar. Teknologi telah mengubah cara kita belajar dan mengajar, dan manajemen peserta didik yang efektif harus memasukkan penggunaan teknologi dan media yang tepat ke dalam pembelajaran mereka.

Keempat, manajemen peserta didik yang baik juga memperhatikan pengawasan dan pengendalian siswa. Siswa harus diberikan pengawasan dan pengendalian yang memadai untuk membantu mereka tetap fokus pada tugas mereka dan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Hal ini dapat meliputi aturan dan peraturan yang jelas, sistem hukuman dan penghargaan yang efektif, serta pengawasan staf yang terlatih.

Kelima, manajemen peserta didik yang efektif juga memperhatikan hubungan antara orang tua dan sekolah. Siswa yang memiliki dukungan orang tua yang tepat lebih mungkin berhasil di sekolah, dan manajemen peserta didik yang baik harus mengembangkan komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dengan orang tua.

Terakhir, manajemen peserta didik yang efektif juga menerapkan strategi yang efektif untuk mengelola perilaku siswa yang sulit. Ini termasuk mengidentifikasi dan menangani situasi yang menantang secara proaktif, meningkatkan interaksi positif antara siswa dan staf, serta memberikan dukungan emosional dan sosial yang memadai untuk siswa yang mengalami kesulitan.

Secara keseluruhan, manajemen peserta didik yang efektif sangat penting untuk membantu siswa mencapai potensi mereka

dan sukses di sekolah. Dengan kombinasi strategi yang tepat dan komitmen pada kualitas pengajaran dan pembelajaran, manajemen peserta didik yang baik dapat membangun lingkungan yang mendukung dan memadai untuk semua siswa.

MANAJEMEN STRESS PESERTA DIDIK: PERALIHAN PEMBELAJARAN *NEW NORMAL*

Mei Fita Asri Untari

Hampir dua tahun Indonesia mengalami situasi pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap sistem dan manajemen pendidikan di Indonesia. Pembelajaran yang awalnya dilakukan di sekolah secara tatap muka, selama pandemi pembelajaran “dipaksa” dilakukan secara virtual/daring/online. Hal ini tentunya mendapatkan "teriakan" dari para guru dan orang tua karena terdapat berbagai kendala yang dialami peserta didik.

Kondisi tersebut memberikan sisi positif dan sisi negatif. Melalui kegiatan daring pendidik dan peserta didik hanya cukup duduk di depan PC/laptop/HP untuk menerima materi pembelajaran. Artinya, jarak tidak menjadi peghalang, tidak membutuhkan transportasi, dan tidak memerlukan Gedung atau kelas seperti biasanya. Akan tetapi, sisi negatif pembelajaran ini adalah tidak adanya interaksi secara langsung, tidak dapat bersentuhan fisik dengan teman sehingga membuat peserta didik cepat bosan dan lelah. Yang lebih mencengangkan lagi adalah kondisi tersebut menyebabkan *loss learning* karena dipandang tidak maksimalnya pembelajaran yang diselenggarakan oleh pendidik.

Manajemen Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan strategi pembelajaran di era new normal/pasca pandemi Covid-19 merupakan upaya, kesiapan yang matang, pembelakalan baik dari segi keterampilan Teknologi Informasi maupun kemajuan pembelajaran daring. Maka solusi yang dapat ditawarkan adalah

pembelajaran *blended* atau perpaduan pembelajaran daring dan luring. Peserta didik, terutama anak usia sekolah dasar lebih membutuhkan interaksi langsung secara fisik/tatap muka agar dapat membentuk ikatan emosional dengan pendidik, sehingga kebosanan anak dalam belajar dapat diminimalisasi.

Manajemen Stress Peserta Didik

Seiring dengan menurunnya tingkat penyebaran virus covid-19, pembelajaran secara tatap muka (PTM) mulai diberlakukan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Agama (Kenag) bersama-sama telah menetapkan Keputusan Bersama (SKB Empat Menteri) mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 pada keputusan Nomor 01/KB/2022 yang dijadikan rujukan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembelajaran Tatap Muka.

PTM diberlakukan secara bertahap sesuai dengan level PPKM pada masing-masing daerah, sehingga di beberapa daerah masih diberlakukan pembelajaran *blended*. Perubahan sistem pembelajaran dari daring ke luring mengharuskan peserta didik untuk beradaptasi kembali karena selama pandemi mereka sudah terbiasa dengan belajar dari rumah, menggunakan perangkat dan platform tertentu. Waktu pembelajaran pun terhitung fleksibel tidak seperti tatap muka. Kebiasaan yang telah melekat inilah membuat peserta didik agak sulit untuk menerima pembelajaran *new normal*. Rutinitas sekolah yang harus bangun pagi, bersiap lebih awal, perjalanan ke sekolah, piket kebersihan kelas, upacara/apel pagi, mengerjakan tugas, dan lainnya kini tidak lagi dilakukan secara fleksibel. Oleh karena itu, peserta didik memerlukan penyesuaian dan adaptasi untuk menghadapi pembelajaran daring ke luring.

Peralihan tersebut membuat peserta didik dituntut untuk memiliki pola respon penyesuaian secara psikologis dan fisik. Berdasarkan review beberapa berita, fenomena di sekolah,

wawancara dengan guru diperoleh hasil bahwa banyak siswa yang mengalami gangguan keseimbangan secara psikologis dan fisik atau disebut dengan stress belajar yang memiliki arti sebagai respon fisik atau psikis karena ketidakmampuan dalam mengubah tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan seperti: menganalisis, merangkai, menggambar, mencermati, mengobservasi, menggabungkan, mengadopsi, sebagai dampak dari ketidaksesuaian ataupun tekanan antara kemampuan yang dimiliki dengan tuntutan yang diterima.

Manajemen stress adalah kemampuan untuk menghadapi penyebab stress (stesor), gangguan, kekacauan dengan cara mengatur atau mengontrol respon atau tanggapan terhadap stressor tersebut. Tujuan dari manajemen stress adalah memperbaiki kualitas hidup baik dari aspek perasaan, pikiran, perilaku, maupun fisik. Yang dapat dilakukan untuk mengelola stress belajar menurut Lestari (2022) adalah

- (1) Membuat rencana belajar yang rasional dan manajemen waktu. Peserta didik diharapkan mengenal waktu efektif belajar agar mampu menyusun rencana belajar yang rasional. Waktu dan metode efektif belajar setiap siswa berbeda-beda, oleh karena itu setiap siswa perlu mengenal diri sendiri agar bisa mengetahui waktu dan zona nyaman saat belajar. Peserta didik juga seharusnya mampu membagi waktu berdasarkan skala prioritas sehingga dapat mengetahui kegiatan mana yang harus didahulukan.
- (2) Mengatur pola makan dan mengkonsumsi makanan bergizi. Peserta didik memerlukan makanan yang bergizi dan pola makan yang teratur agar otak mampu berpikir dengan optimal. Pola makan teratur dan makanan yang bergizi selain mampu menambah energi pada tubuh, juga mampu mempertahankan daya ingat saat belajar.
- (3) Melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik seperti berolahraga, membantu pekerjaan rumah tangga, bermain di luar ruangan, atau berekreasi diperlukan peserta didik agar tidak merasa jenuh

dan bosan. Jenuh dan bosan meningkatkan kemungkinan peserta didik terserang stres dan depresi. Aktivitas fisik membantu peserta didik menjaga pola tidur yang teratur.

- (4) Mengatur pola tidur dan melakukan relaksasi. Peserta didik sebaiknya tidak serta merta untuk terus menerus belajar tanpa henti. Tidur dan istirahat yang cukup diperlukan agar peserta didik tidak kelelahan dan menjadi sakit. Selain itu peserta didik juga perlu belajar menikmati waktu luang sebagai wujud relaksasi agar bisa memaknai materi belajar atau praktek kerja yang telah dilakukan.

Pengembangan Kapasitas Peserta Didik

Stres dalam hal belajar pada masa pandemi COVID-19 di kalangan peserta didik merupakan fenomena yang umum dijumpai saat ini. Situasi ini mengakibatkan peserta didik mengalami kelelahan, kebosanan, dan stress karena menumpuknya tugas pada pembelajaran masa pandemi. Stres yang didapatkan ketika proses pembelajaran disebut dengan stress akademik, yaitu tekanan-tekanan yang berhubungan dengan belajar dan kegiatan sekolah, misalnya waktu pengerjaan PR, menjelang ujian, pengumpulan tugas, proses pembelajaran yang menguras tenaga dan pikiran, dan hal-hal yang lain. Dengan adanya permasalahan tersebut maka sekolah perlu berkolaborasi dengan orang tua untuk menciptakan suasana yang nyaman untuk meminimalisasi stress peserta didik.

Semua sekolah memiliki kewajiban untuk mengembangkan potensi kecerdasan peserta didik secara maksimal. Sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu memberikan layanan kepada peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dengan memahami potensi peserta didik, guru dapat memberi gambaran yang tepat tentang kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan peserta didik, serta mengetahui potensi yang perlu ditingkatkan dan kelemahan yang perlu diminimalisasi. Setiap peserta didik dianugerahi potensi (potential ability) atau kapasitas (capacity).

Terdapat keragaman atau perbedaan potensi yang dimiliki peserta didik yang satu dengan yang lainnya, baik dalam jenis potensi yang dimiliki dalam kualitas potensi.

Guru dapat mengidentifikasi kemampuan intelektual atau kecerdasan umum, kecerdasan majemuk, bakat, dan kreativitas peserta didik melalui cara berikut. (1) mengidentifikasi kemampuan intelektual atau kecerdasan. Melalui hal ini dapat memberi kontribusi kepada guru untuk melakukan penyesuaian yang memadai terhadap kondisi objektif peserta didik. Identifikasi ini dapat mengamati kemampuan intelektual dan kecerdasan umum peserta didik, dan menganalisis hasil ulangan atau tes, tugas, wawancara, analisis himpunan data prestasi sebelumnya, sikap perilaku, dan hasil psikotes. (2) mengidentifikasi kecerdasan majemuk dan bakat, sehingga guru mengetahui kemampuan dan bakat peserta didik. Hal tersebut dapat digunakan untuk menentukan model dan metode pembelajaran. (3) mengidentifikasi kreativitas peserta didik, dapat menggunakan cara pengamatan ketika peserta didik membuat karya kreatif, menganalisis tes, dan menganalisis karya kreatif dan inovatif.

Dalam pengembangan potensi peserta didik guru dapat melakukan dengan (1) memberikan waktu bebas dalam menemukan ide dan mempraktikkannya; (2) memberikan kesempatan tersendiri untuk mengembangkan kehidupan imajinatif yang bebas dari tekanan kelompok lain; (3) memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi; (4) memberikan sarana untuk memaksimalkan potensinya; (5) ciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung potensinya.

Dengan demikian stress akademik yang dimiliki peserta didik akan berangsur hilang karena peserta didik diberi kepercayaan dan dikembangkan sesuai dengan kecerdasan, potensi, dan bakatnya. Peserta didik juga diberi ruang untuk diapresiasi dengan baik oleh lingkungan belajarnya, baik di sekolah dan di rumah. Guru dan orang tua dapat berkolaborasi dalam melakukan manajemen

stress kepada peserta didik dengan menyelenggarakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan.

MANAJEMEN PESERTA DIDIK DALAM KACAMATA ALTHUSSERIAN

Zainal Arifin

Ada dua kondisi mencolok ketika kedua reproduksi ini tidak diterapkan secara seimbang. Pendidikan yang mengedepankan reproduksi submission akan melahirkan lulusan yang sangat patuh pada sistem kerja, sangat disiplin mengikuti aturan kerja, tapi sayangnya akan mengalami ketumpulan ketika diminta untuk

Jauh-jauh hari Louis Althusser— seorang pemikir ideologi—telah mengingatkan tentang perlunya penyeimbangan proses reproduksi submission (kepatuhan) dan reproduksi keahlian. Reproduksi submission berkaitan dengan kepatuhan seseorang terhadap sistem kerja. Sedangkan reproduksi keahlian berkaitan dengan keterampilan, kecekatan, dan kecerdasan seseorang dalam pekerjaan. Semua sistem reproduksi tersebut kini berada di tangan institusi yang disebut pendidikan.

mengeluarkan ide-ide kreatif. Pendek kata, reproduksi submission cenderung menghasilkan generasi penurut.

Sebaliknya, reproduksi keahlian cenderung akan menghasilkan generasi yang cakap dalam kerja, memiliki *problem solving* yang baik, cerdas dalam menyelesaikan masalah, tapi sayangnya akan cenderung *rebel*

terhadap sistem kerja yang membelenggu kreativitas. Peserta didik yang dibentuk dari pendidikan yang cenderung mengedepankan reproduksi keahlian akan melahirkan generasi yang susah diatur.

Dalam dunia industri, dua reproduksi ini akan membawa manfaat penting ketika perusahaan dalam kondisi kritis atau kondisi stabil. Bila perusahaan dalam kondisi kritis, orang-orang yang cenderung dominan keahliannya perlu diperbanyak untuk menduduki posisi manajemen supaya kekritisannya mereka mampu menyelamatkan perusahaan. Pun demikian, ketika perusahaan sedang dalam kondisi pengembangan atau sedang berekspansi pada pasar yang lebih luas, kehadiran mereka dalam perusahaan akan membawa banyak keuntungan.

Sebaliknya, ketika kondisi perusahaan dalam keadaan stabil atau perusahaan dalam posisi sehat dan terdapan, orang-orang yang dengan submission baguslah yang diperlukan dalam perusahaan. Orang-orang dengan submission dominan akan cenderung menstabilkan kondisi perusahaan dan membuat perusahaan menjadi lebih kokoh dan berkarakter.

Lantas di manakah posisi orang berkeahlian diletakkan ketika perusahaan dalam posisi stabil? Posisinya berada di bagian divisi pengembangan dan inovasi. Sebaliknya ketika perusahaan sedang posisi kritis atau butuh ekspansi, orang-orang bersubmission dominan sebagainya disimpan dalam sistem layanan umum atau kinerja tata usaha.

Untuk dapat membaca dua keterampilan ini secara nyata mungkin kita bisa meminjam kisah putera pemilik PO Haryanto, Rian Mahendra. Rian Mahendra adalah manusia yang dominan pada keahliannya daripada submissionnya. Ketika PO Haryanto sedang membangun atau berekspansi, Rian adalah “*right man in the right place*”. Tidak mengherankan bila kemudian PO Haryanto menjadi *leader* dalam perusahaan otobus Indonesia. Kibaran benderanya sangat kencang dengan Rian Mahendra sebagai senopatinya.

Tapi apa yang terjadi ketika PO Haryanto sudah dalam keadaan stabil dan semangat ekspansifnya dikendalikan? Rian Mahendra yang eksplosif menjadi kehilangan orientasi, memilih langkah-langkah yang dianggap destruktif pada perusahaan, dan pada akhirnya bapaknya sendiri harus memecatnya dari perusahaan. Mestinya Rian Mahendra harus segera dirotasi—diposisikan dalam bidang inovasi dan pengembangan—dan segera mengangkat senopati baru yang cenderung submissif. Keterlambatan rotasi membuat kekacauan dalam sistem perusahaan.

Kehilangan Rian Mahendra mungkin tidak akan berdampak signifikan pada lima tahun ke depan. Tapi sepuluh tahun ke depan, ketika perusahaan mulai mengarah pada kurva menurun, PO Haryanto akan mencari-cari orang yang sepadan Rian Mahendra untuk kembali memegang kendali. Kenapa bisa demikian, karena setiap perusahaan pasti akan memiliki alur seperti gelombang, akan mengalami puncak gunung gelombang dan akan mengalami ceruk kurva gelombang. Ini adalah contoh konkrit dari potensi-potensi yang bisa timbul karena masalah reproduksi submission dan reproduksi keahlian.

Peran Pendidikan

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dunia pendidikan yang menanggung pembentukan dua reproduksi ini harus menjalankan berperan? Pertanyaan ini sangat penting diajukan mengingat, dunia pendidikanlah yang bertanggung jawab pada manajemen pembentukan karakter peserta didik. Biru putihnya produk pendidikan bergantung pada bagaimana para guru dan sekolah mengelola reproduksi submission dan reproduksi keahlian pada peserta didik.

Pentingnya pembentukan dua reproduksi ini secara tersirat sangat disadari dalam ruh Kurikulum Merdeka. Pada Kurikulum Merdeka, para guru di Indonesia sudah mulai dikenalkan tentang pendidikan berdiferensiasi, bahwa setiap peserta didik merupakan pribadi unik yang harus diperlakukan secara berbeda-beda oleh seorang guru. Artinya, para guru sebenarnya sudah dibekali pemahaman mengenai potensi peserta didik diperlakukan secara berbeda sesuai dengan bakat dan potensinya.

Seorang anak yang memiliki kecenderungan atau potensi mengarah pada reproduksi submission harus dibentuk submissionnya secara baik. Keunggulan-keunggulan submissionnya harus terus dipupuk supaya menjadi karakter yang mumpuni dalam hal kedisiplinan dan kepatuhan dalam mengikuti sistem kerja. Sebaliknya, anak-anak yang memiliki kecenderungan yang mengarah pada reproduksi keahlian, keterampilannya harus terus ditingkatkan supaya mereka juga mumpuni dalam kecakapan kerja.

Siapkah sekolah dan guru-guru kita? ***

MANAJEMEN PESERTA DIDIK MELALUI PENGEMBANGAN *SOFT SKILL* PROYEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA

Uki Hares Yulianti

Perubahan kurikulum yang terjadi sebuah keniscayaan. Saat ini diberlakukannya kurikulum merdeka belajar sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi segala hal dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Pada Kurikulum Merdeka Belajar proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi guru tidak lagi menjadi pusat sumber informasi, tetapi sebagai fasilitator. Saat ini gurulah yang berusaha memenuhi kebutuhan belajar yang dibutuhkan peserta didik. Walau guru sebagai fasilitator tapi proses pembelajaran pada Kurikulum Merdeka tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya peran guru. Disinilah peran manajemen peserta didik proses pembelajaran menjadi hal yang penting untuk mengembangkan kemampuan siswa.

Menurut Kazenky (dalam Imron, 2011: 6) manajemen peserta didik atau *personnel administration* merupakan proses administrasi pendidikan yang memusatkan perhatiannya kepada peserta didik dari pengaturan, pengawasan layanan siswa baik di dalam maupun di dalam kelas. Pada intinya manajemen peserta didik berhubungan sejak peserta didik masuk hingga lulus dari sekolah untuk dapat mengembangkan kemampuan siswa secara maksimal.

Pada Kurikulum Merdeka Belajar memang lebih memperhatikan bakat dan minat dari peserta didik. Peran guru dan

pihak sekolah harus bisa memfasilitasi pengembangan minat dan bakat mereka. Selain itu, peserta didik juga harus dapat belajar dengan memperhatikan pembelajaran yang telah disesuaikan dengan minat dan juga bakat mereka. Hal ini diharapkan agar peserta didik nantinya dapat bersaing dalam dunia internasional tanpa melupakan nilai-nilai dari Pancasila. Oleh karena itu, hal tersebut tertuang dalam proyek profil Pelajar Pancasila.

Soft skill merupakan keterampilan kecakapan hidup yang sangat dibutuhkan seseorang untuk bisa beradaptasi dengan tuntutan saat ini. Menurut Illah (2008: 19) “*Soft skill* adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (*inter-personal skill*) dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri (*intra-personal skill*) yang mampu mengembangkan secara maksimal untuk kerja (*performans*) seseorang”. Peserta didik dituntut memiliki kecakapan yang berhubungan dengan keterampilan belajar dan inovasi, keterampilan teknologi dan media informasi, serta kecakapan hidup dan karir (Darsono, 2011; World Economic Forum, 2016). Jadi bisa dikatakan *soft skills* diartikan sebagai kemampuan di luar kemampuan teknis dan akademis, yang lebih mengutamakan kemampuan intra dan interpersonal.

Pentingnya untuk mengembangkan *soft skill* pada peserta didik maka perlunya ada pelatihan yang tepat untuk hal tersebut. Kurikulum Merdeka Belajar menerapkan adanya Profil Pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebhinekaan global, mandiri, dan kreatif. Pada proses proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai pengembangan *soft skill* peserta didik, terdapat tujuh tema pembelajaran yang diajarkan dalam setiap fase. Guru dapat mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase pembelajaran. Adapun 7 tema dalam Profil Pelajar Pancasila, sebagai berikut:

1. Gaya hidup berkelanjutan
2. Suara Demokrasi
3. Kearifan lokal
4. Bhineka tunggal ika
5. Bangun Jiwa dan raganya
6. Rekaya dan Teknologi

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada tiap tema akan menghadirkan isu penting yang aktual dan meminta peserta didik untuk dapat melakukan aksi nyata dalam menyelesaikan isu-isu tersebut sesuai dengan fase pembelajaran. Hal ini akan menjadikan peserta didik bernalar kritis dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitarnya.

Kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila nantinya tidak hanya menghasilkan produk saja, tetapi juga pelaporan dan evaluasinya. Peran guru disini dapat mengarahkan kelompok peserta didiknya untuk menghasilkan suatu karya atau memecahkan permasalahan yang ada. Misalnya pada tema Bangunlah jiwa dan raganya, peserta didik dapat melakukan pameran karya. Karya yang dihasilkan peserta didik tidak harus selalu dalam bentuk material yang dapat disentuh, dapat juga dibuat dalam bentuk kajian yang disesuaikan dengan salah satu tema yang sudah ditentukan, misal tentang *digital bullying* yang kini tengah marak di kalangan remaja. Karya peserta didik dapat memberi alternatif solusi untuk bijak bersikap dan bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan sosial media. Karya yang dihasilkan bisa berupa poster, atau media sosial yang berisi penentangan *bullying* dan solusinya, bisa juga berupa pameran dalam bentuk jurnalistik yang berisi *stop bullying*, bahkan bisa juga dalam bentuk film pendek. Hal ini akan membuat peserta didik dalam menyelesaikan proyek bisa bekerja sama dengan timnya dan disesuaikan dengan era saat ini yang memanfaatkan teknologi.

Keterampilan peserta didik harus terus diasah agar bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Dengan adanya proyek penguatan profil pelajar pancasila proses penguatan karakter dan pengembangan keterampilan akan dapat terus terasah, tidak hanya fokus di bagian pencapaian akademik saja. Pada era saat ini, pengembangan *soft skill* sangat dibutuhkan disamping penguasaan pengetahuan. Keterampilan akan mampu menjadi bekal hidup peserta didik dikala mereka terjun langsung dalam kehidupan masyarakat.

BAB 3

MANAJEMEN PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN

MENJADI GURU METAL (MELEK DIGITAL)

Prabawati Nurhabibah

Paradigma manajemen tenaga pendidik dan kependidikan saat ini adalah mengembangkan dan mengembangkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pengembangan dan pemberdayaan yang sistematis agar sumber daya manusia dapat berfungsi secara profesional dan berkembang. Kualitas tenaga pendidik merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pendidikan. Pendidik sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi sekolah secara profesional. Artinya, pendidik harus mampu mengajar dan melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Dalam melaksanakan tugas pendidikan, pendidik perlu memperoleh pengetahuan dan metode yang diajarkan serta mengenal anak didiknya secara fisik dan mental.

Pengembangan sumber daya manusia mengacu pada ketersediaan dan pengembangan kesempatan belajar dan penciptaan program pelatihan. Hal ini termasuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program ini. Pengembangan sumber daya manusia adalah penggunaan terpadu dari pendidikan, pelatihan, pengembangan karir, dan pengembangan organisasi untuk meningkatkan efektivitas individu dan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya terencana dan terus menerus dari suatu organisasi untuk meningkatkan kemampuan karyawannya dan kinerja organisasi melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan.

Beberapa bentuk program pelatihan Guru dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan. Salah satu program pelatihan yang dapat diberikan pada para tenaga pendidik di antaranya pelatihan literasi digital atau bisa disebut dengan Guru Metal (melek digital). Media berbasis teknologi menjadi kebutuhan pokok Guru di era digital. Media kini berkembang dengan kombinasi digital teks, grafik, animasi, audio, dan gambar. Pengembangan teknologi membuat multimedia semakin mudah. Beberapa Situs ini juga menawarkan template khusus yang memungkinkan pengguna untuk berhubungan Guru tinggal menggeser atau menambahkan foto Multimedia siap pakai. Berbagai perangkat lunak juga dapat Guru gunakan untuk merancang multimedia.

Masyarakat yang tidak memiliki kesiapan dalam menerapkan teknologi informasi, dan juga yang tidak melek terhadap informasi yang dibawa media menimbulkan berbagai permasalahan seperti masalah fisik dan psikis. Bagi pelajar yang tidak bijak terhadap media digital dapat menimbulkan tindakan konsumtif seperti kecanduan menonton televisi, bermain games baik online maupun offline, bersosial media tanpa batas waktu, mengakses situs pornografi, dan informasi lain yang kurang bermanfaat. Sebagian besar pelajar lebih cenderung menginternalisasi pesan-pesan media dan mengintegrasikannya dalam pembentukan diri, sehingga dapat menumbuhkan sifat individualis, radikal dalam berpikir dan lebih eksis di dunia maya dari pada di dunia nyata. Banyak pelajar menganggap bahwa citra yang muncul di televisi adalah sesuatu hal yang nyata, sehingga mereka mencitrakan diri sebagai tokoh-tokoh sinetron dan penyanyi, mulai dari gaya berpakaian, potongan rambut, hingga perilaku sehari-hari.

Kemudian bagi orang tua selain menjadi konsumtif, tidak melek media dapat mencontohkan perilaku kecanduan konten media pada anak, sampai dengan menyerahkan pengasuhan anak pada TV. Gagap dengan teknologi Informasi ini telah menyebabkan beberapa kejadian yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu,

Literasi digital dalam masyarakat sekolah, khususnya guru dan siswa sangat diperlukan untuk memfilter informasi yang ada. Literasi digital memahami, menganalisis, mengevaluasi, mengatur, Mengevaluasi informasi secara digital. Ketidakmampuan siswa dan guru untuk menafsirkan dampak keterampilan digital dari sikap dan karakter. Jadi solusi terbaik untuk melakukannya menerapkan pembelajaran keterampilan digital di lingkungan sekolah

PERAN MANAJEMEN PESERTA DIDIK DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR PESERTA DIDIK

Hetilaniar

Manajemen peserta didik keberadaanya sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan karena siswa merupakan subjek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu dan ketrampilan. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan akan sangat bergantung dengan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari siswa itu masuk sampai dengan keluar dari suatu sekolah. Manajemen peserta didik tidak semata pencatatan data peserta didik tetapi meliputi aspek yang lebih luas yaitu dapat membantu upaya pertumbuhan anak melalui proses pendidikan di sekolah.

Peserta didik adalah subjek sekaligus objek dalam proses perubahan pengetahuan dan keterampilan, manajemen peserta didik sangat penting dalam institusi pendidikan. Tumbuhnya potensi fisik, kecerdasan intelektual, keterampilan sosial, emosional, dan psikologis peserta didik akan sangat menentukan pelaksanaan pendidikan. Manajemen siswa adalah pengorganisasian dan perencanaan kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik, dimulai dari peserta didik itu masuk sampai keluar sekolah. Manajemen peserta didik mencakup lebih dari sekadar melacak data

peserta didik juga mencakup upaya untuk membantu perkembangan anak melalui proses pendidikan di sekolah.

Peran strategis dalam memaksimalkan potensi peserta dimainkan oleh manajemen siswa, yang merupakan salah satu alat yang digunakan dalam manajemen pendidikan dan interaksi tatap muka dengan peserta didik. Fokus utama manajemen sekolah adalah pada peserta didik. Semua kegiatan yang berkaitan dengan sekolah, baik yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada peserta didik, difokuskan untuk memberikan layanan pendidikan yang dapat dipercaya kepada semua peserta didik. Tingkat sumber daya manusia guru memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan peserta didik dalam prestasi akademik. Tingkat pendidikan yang dicapai oleh setiap orang yang membentuk suatu negara menentukan kualitas sumber daya manusianya. Sekolah visioner dengan tujuan yang jelas akan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Untuk menjaga proses belajar peserta didik dan menciptakan hasil yang sesuai, pengelolaan peserta didik harus menjadi prioritas utama. Tanggung jawab dan kewajiban instruktur seringkali tidak dilaksanakan dengan sukses dan efisien, khususnya dalam bidang pengelolaan peserta didik di sekolah. Masih banyak guru yang gagal dalam mengelola kelasnya atau kepentingan peserta didiknya sehingga menyebabkan kurangnya organisasi.

Memprioritaskan manajemen pendidikan diperlukan untuk pendidikan yang berkualitas. Sistem pendidikan dapat diarahkan dan diatur oleh prinsip-prinsip tertentu, antara lain prinsip efektifitas, adaptabilitas, efisiensi, dan relevansi. Pengembangan konsep pendidikan tentunya akan menghasilkan lembaga pendidikan yang berkualitas. Sistem manajemen yang efektif dan efisien harus digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Mengelola pendidikan secara efektif adalah salah satunya. Manajemen pendidikan mengawasi dan mengendalikan setiap aspek penyelenggaraan pendidikan. Untuk membantu proses pendidikan, mulai dari kurikulum, sumber daya manusia, biaya, sarana dan prasarana, peserta didik, hubungan masyarakat, layanan khusus dan

perencanaan strategis. Salah satu manajemen peserta didik yang perlu dan paling utama diperhatikana adalah bidang kurikulum. Saat ini manajemen kurikulum sudah mulai terarah dan sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum yang berlaku yaitu kurikulum merdeka.

Pembelajaran utama kurikulum merdeka adalah berpusat pada peserta didik. Penekanan kurikulum merdeka pada kebutuhan peserta didik akan lebih besar dalam hal pembelajaran. Sekarang ada lebih banyak sumber informasi selain guru. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam kurikulum merdeka. Akibatnya, guru harus mengakomodir tuntutan belajar peserta didik tersebut. Guru juga harus lebih memperhatikan keterampilan dan minat peserta didik serta memberikan kesempatan untuk mereka mengembangkan dan memfokuskan minat dan bakat yang dimiliki. Peran guru sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus mahir dalam *soft skill* yang dapat membantu pencapaian siswa dalam kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka adalah program pembelajaran intrakurikuler yang luas yang materinya akan disesuaikan untuk memberikan waktu yang cukup bagi peserta didik untuk memahami topik dan mengembangkan kompetensi. Guru dapat memilih dari sejumlah bahan ajar sehingga pengajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masing-masing peserta didik. Sebuah proyek dibuat untuk meningkatkan prestasi peserta didik dalam Pancasila berdasarkan topik tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum Merdeka, program dengan tiga keistimewaan, antara lain berbasis pembelajaran, diprediksi mampu melakukan pemulihan dalam pembelajaran. Belajar tentang informasi penting, inisiatif untuk meningkatkan soft skill dan karakter, dan kerangka kurikulum yang lebih mudah beradaptasi.

Merdeka belajar bukan berarti mempunyai kebebasan yang tidak terbatas atau kebebasan yang dapat dilakukan oleh setiap pembuat kebijakan, termasuk administrator, guru, dan pemangku kepentingan sekolah lainnya. Dalam pengambilan keputusan manajemen pengembangan sekolah dan manajemen pembelajaran, semua pemangku kepentingan sekolah harus tetap berpegang pada

kriteria atau protokol tertentu dalam pelaksanaannya. Namun dalam konsep merdeka belajar, selama menjalankan amanat sesuai dengan norma, aturan, atau protokol yang ada, semua pelaksana kebijakan pendidikan harus bebas dari rasa takut akan hukuman.

SIAPA INGIN MENJADI GURU?

Meina Febriani *

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap peserta ujian nasional (UN) tahun 2019, hanya terdapat 11% peserta didik yang berminat menjadi guru (Antara News, 2019). Sebagian besar peserta didik bercita-cita menjadi pengusaha, YouTuber, dan presiden. Mirisnya, peserta didik yang memiliki cita-cita menjadi guru justru memiliki nilai ujian nasional Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia yang lebih rendah daripada peserta didik yang memiliki cita-cita yang lain.

Bergayut dengan hal tersebut, sebuah studi kasus kecil-kecilan juga diadakan oleh Ibu Guru Arina, seorang guru di SMA berkelas internasional yang sebagian besar kursi peserta didik diisi oleh masyarakat berekonomi menengah ke atas. Dalam sebuah pembelajaran, dilakukan survei mengenai cita-cita masa depan peserta didik. Hasilnya, hanya satu di antara 25 peserta didik (4%) yang mengaku memiliki cita-cita menjadi seorang guru.

Dalam studi kasus yang diadakan oleh Ibu Guru Arina, setidaknya kita bisa melihat sebuah miniatur kondisi peserta didik saat ini. Mereka yang notabene berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah atas ternyata hanya 4% yang memiliki cita-cita menjadi seorang guru. Ada apa yang terjadi? Apakah guru tidak dianggap sebagai profesi yang menjanjikan pada masa kini dan nanti?

Cerita selanjutnya datang dari Ibu Tika. Beliau merupakan seorang lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

dan telah menyandang gelar Sarjana Pendidikan. Ketika menjadi *fresh graduate*, Ibu Tika meniti karier sebagai seorang guru honorer di sebuah SMP swasta. Namun, penghasilan yang beliau dapatkan ternyata tidak cukup untuk menopang biaya hidup karena beliau hanya menerima gaji sebesar Rp400.000 per bulan. Akhirnya, setelah satu tahun bekerja, beliau memutuskan berhenti. Saat ini Ibu Tika berprofesi sebagai pegawai bank.

Tiga fenomena tersebut menjadi sebuah tamparan bagi masa depan profesi guru. *Pertama*, bisa jadi itu sebuah auto-kritik bagi guru yang kurang dalam memotivasi peserta didik. Logikanya, gurulah yang hampir setiap hari bertemu dengan peserta didik tapi justru guru tidak bisa memberikan inspirasi kepada peserta didiknya untuk meneruskan perjuangannya dalam dunia pendidikan. Artinya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah sebenarnya guru tidak menginginkan peserta didiknya mengulang “nasib” yang sama dengan dirinya. Atau, justru peserta didik telah menemukan fenomena sosial yang membuatnya tidak menginginkan untuk menjadi guru?

Kedua, bayangan bahwa guru masa depan akan diisi oleh para juara kelas ternyata belum bisa terwujud. Guru sebagai garda depan pendidikan justru semestinya diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas akademik yang mumpuni. Sebab, guru memiliki tugas menjadi fasilitator dalam proses transfer pengetahuan, pola berpikir, dan nilai-nilai kehidupan dalam mengonstruksi kecerdasan yang holistik bagi peserta didik. Sesungguhnya, ihwal menyiapkan calon guru bukanlah hal yang sederhana sebab guru memegang posisi yang esensial dalam konstelasi dunia pendidikan. Namun, mengapa fenomena tersebut justru terjadi?

Ketiga, standardisasi penggajian guru sebagai tenaga honorer ternyata masih jauh dari kata layak. Hal tersebut tentu kontradiktif dengan standardisasi Upah Minimum Regional (UMR) yang diberlakukan bagi karyawan perusahaan, Namun, sayangnya UMR itu tidak diterapkan pada Guru Tidak Tetap (GTT).

Mendefinisi *High Class Profession*

Dalam tatanan kehidupan global yang berorientasi pada industri, saat ini sektor pendidikan justru mendapat tantangan besar untuk senantiasa berbenah dan adaptif terhadap perubahan. Memasuki tahun-tahun kelahiran generasi alfa sebagai *digital native*, jenis profesi pun mulai beragam dan tidak terbatas. Ketika dulu generasi *baby boomers* hanya mengenal segelintir jenis profesi seperti guru, polisi, tentara, dokter, perawat. Saat ini muncul beragam variasi profesi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Bahkan, ada pula profesi yang eksistensinya telah tergantikan oleh kerja komputer melalui teknologi kecerdasan buatan. Justru itulah eksistensi guru sebagai *high class profession* makin tersisihkan oleh profesi lain.

Apa yang dimaksud *high class profession*? Untuk mendefinisi ini, kiranya kita perlu memikirkan konteks yang terjadi pada zamannya. Saat ini *high class profession* seringkali diartikan sebagai profesi impian yang memiliki indikator pada empat hal, yakni penghasilan yang di atas rata-rata, kuasa dan citra yang baik di mata masyarakat, dan jenis pekerjaan yang tidak memerlukan kerja fisik yang berat, dan tidak bisa diraih oleh sembarang orang (Flemmen, 2012; Muslu, 2022)

Dalam konteks guru sebagai sebuah pekerjaan yang profesional. Perlu dikaji bersama dampak personal maupun sosial sebagai indikator *high class profession* pada guru. Apakah saat ini guru sudah mendapat penghasilan yang layak. Bagaimana respons masyarakat pada citra guru di ranah sosial. Bagaimana beban kerja guru. Serta, bagaimana atmosfer serta sistem rekrutmen guru.

Guru sebagai *High Class Profession*, Mungkinkah?

Menyoal guru sebagai *high class profession*, perlu dipikirkan langkah kerja operasional serta piranti strategis untuk mencapai indikator-indikator yang diharapkan. Adapun tiga strategi yang bisa diupayakan antara lain.

Pertama, kebijakan mengenai penghasilan guru perlu dipertimbangkan kembali. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi telah menerapkan kebijakan guru profesional melalui program sertifikasi guru. Alhasil, guru mendapat bonus penghasilan setara dengan satu gaji pokok setiap bulannya. Namun, apakah akumulasi penghasilan tersebut sudah mumpuni untuk sebuah label *high class profession*?

Selain itu, penataan kebijakan penggajian bagi guru honorer juga perlu dilakukan. Saat ini fenomena penggajian GTT memang menuai reaksi luar biasa dari masyarakat. Tidak sedikit guru yang digaji jauh di bawah UMR. Oleh sebab itu, penting kiranya kebijakan strategis berupa upaya perlindungan GTT agar mendapatkan penghasilan yang layak. Coba kita kaitkan dengan standar kebutuhan hidup saat ini. Apalagi, kalau kita juga melakukan komparasi dengan profesi-profesi lain yang juga kredibel seperti dokter, pengusaha, pengacara, arsitek, dan lain-lain.

Kedua, penguatan kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Sedangkan, yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Penguatan kompetensi tersebut sebenarnya sudah dilakukan pada Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang merupakan sebuah program sebagai upaya peningkatan kapasitas profesional guru. Program tersebut diikuti oleh guru dalam masa jabatan dan prajabatan melalui proses seleksi. Namun, program tersebut bagi

beberapa pihak seringkali hanya dianggap sebagai “ritual” memperoleh gelar keprofesionalan guru (Gr.) saja tanpa semangat belajar berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan. Alhasil, kinerja guru di mata masyarakat terkadang dipandang sebelah mata sebagai profesi yang mengerjakan tugas secara berulang setiap harinya.

Ketiga, penyelenggaraan program kedinasan bagi guru terpilih melalui seleksi kenegaraan seperti halnya sekolah kedinasan yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Apabila proses rekrutmen berjalan dengan ketat, calon-calon guru yang kelak menjadi penerus pendidik Indonesia pun akan tersaring dengan kualitas yang optimal. Harapannya, selain kualitas input yang mumpuni, citra guru di mata masyarakat pun meningkat karena adanya atmosfer persaingan yang ketat.

Harapannya, upaya menjadikan guru sebagai *high class profession* dapat berdampak signifikan terhadap minat generasi selanjutnya untuk meneruskan perjuangan dalam bidang pendidikan dengan menjadi guru. (*MF*)

***Artikel pernah dimuat di surat kabar Suara Merdeka
1 Maret 2023**

KURANGNYA GURU DI DAERAH TERPENCIL

Imaniah Kusuma Rahayu

Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia, baik bagi diri sendiri, bangsa, ataupun Negara. Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 3, Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan juga modal pokok dalam kehidupan, sehingga pembangunan dan pemerataan pendidikan perlu dilaksanakan secara sinergis dan berkualitas. Oleh karena itu perlu dukungan dan komitmen yang kuat untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif. Berbagai potensi wilayah alam dan potenasasi sumber daya manusia perlu dikelola dengan baik, jelas, dan terarah agar menjadi investasi jangka panjang (*long term investment*) pembangunan manusia dan peradaban bangsa yang besar.

Faktanya, pemerataan pendidikan belum terjadi di semua wilayah Indonesia. Salah satunya adalah kekurangan guru di daerah terpencil yang biasanya menjadi penghambat pendidikan. Guru sebagai tenaga pendidik mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Dalam pasal 39 Ayat (2) Undang-undang

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga Negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Kekurangan guru terjadi karena masih terjadi penumpukan tenaga guru di daerah perkotaan, sebaliknya, di daerah terpencil masih banyak ditemukan kekurangan guru. Guru berstatus ASN juga terkadang hanya sedikit. Selain itu, ketika ada proses seleksi untuk menjadi guru, ketika guru tersebut diterima dan mengetahui lokasi di mana akan mengajar yang notabene adalah daerah terpencil calon guru tersebut mengundurkan diri.

Untuk mengatasi hal tersebut, kepala sekolah selaku pimpinan sekolah akan mengambil keputusan untuk meminta masyarakat setempat yang tidak memiliki basic pendidikan yang tepat untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah tersebut. Dari segi ilmu tidak mumpuni, dari segi kompetensi pun tidak memenuhi kualifikasi. Akibatnya, dapat berpengaruh terhadap capaian pendidikan peserta didik karena kemampuan mengajar yang rendah.

Hal tersebut tentu saja tidak boleh dibiarkan terus-menerus karena anak-anak di daerah terpencil juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Problematika inilah yang masih sering dijumpai di daerah terpencil dan menjadi tantangan bagi kita semua untuk tetap melayani pendidikan anak-anak Indonesia dimanapun berada.

REVOLUSI GURU DARI MASA KE MASA

Rizky Widia Kardika

Sejak manusia mulai memperoleh pengetahuan dan keterampilan, guru telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Mereka telah menjadi penjaga dan pengantar pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh manusia selama berabad-abad. Guru telah mengalami revolusi sejak masa ke masa, dari cara mereka mengajar hingga peran mereka dalam masyarakat. *Pertama*, pada zaman kuno, guru disebut sebagai "guru" di India kuno dan "*Sophists*" di Yunani kuno. Mereka sering kali menjadi figur penting dalam masyarakat dan dianggap sebagai pemimpin spiritual. Mereka mengajarkan filsafat, logika, dan etika kepada para siswa mereka, dan juga memberikan pelajaran tentang agama dan moralitas.

Kedua, zaman pertengahan mengalami perkembangan dalam sistem pendidikan di Eropa, dan para guru mulai menjadi semakin terorganisir dan terstruktur. Mereka mengajarkan pelajaran seperti matematika, astronomi, dan teologi, serta membantu menyebarkan pengetahuan tentang agama Kristen. Para guru di Eropa juga menjadi semakin terbuka untuk memberikan pendidikan kepada orang-orang biasa dan bukan hanya untuk para pemimpin gereja.

Ketiga, zaman modern awal melihat perubahan besar dalam pendidikan dan pengajaran. Dalam Revolusi Industri, kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil meningkat pesat, sehingga dibutuhkan pendidikan formal untuk memenuhi permintaan tersebut. Hal ini mendorong munculnya sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, dan membuat para guru menjadi lebih terorganisir dan terlatih.

Keempat, zaman modern adalah saat di mana para guru memiliki akses ke teknologi modern, seperti komputer dan internet, yang memudahkan mereka dalam mengajar dan berbagi pengetahuan dengan cara yang lebih efektif. Peran guru juga semakin berubah, dari menjadi pemberi pengetahuan menjadi seorang fasilitator dan pembimbing. Para guru di zaman modern juga harus menghadapi tantangan baru, seperti bagaimana mengajarkan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dalam masyarakat yang semakin global dan terhubung.

Kelima, era digital adalah era di mana teknologi terus berkembang dengan pesat, dan hal ini memiliki dampak besar pada dunia pendidikan. Para guru harus terus mengikuti perkembangan teknologi dan menggunakannya secara efektif dalam pengajaran. Mereka harus belajar bagaimana menggunakan perangkat lunak pembelajaran dan media sosial untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa.

Revolusi guru dari masa ke masa telah membawa perubahan besar pada sistem pendidikan dan cara mengajar. Para guru di masa kini harus memperhatikan perkembangan teknologi dan memastikan bahwa mereka terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Selain itu, peran mereka dalam masyarakat juga semakin beragam dan kompleks, dan mereka harus terus menghadapi tantangan baru untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan membawa manfaat bagi masyarakat.

Dalam era Revolusi Industri keempat (Revolusi 4.0), teknologi terus berkembang dengan pesat, dan hal ini membawa dampak besar pada berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Guru masa kini menjadi penggerak utama dalam menghadapi perubahan yang terjadi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut.

Pertama, guru masa kini harus memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan teknologi yang cukup untuk mengajar dan membimbing siswa. Hal ini berarti mereka harus belajar dan terus mengembangkan kemampuan mereka dalam menggunakan

teknologi pembelajaran, seperti perangkat lunak pembelajaran, media sosial, dan video konferensi, untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa.

Kedua, guru masa kini juga harus mampu menyesuaikan kurikulum dan pengajaran mereka dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja yang semakin kompleks. Mereka harus mengajarkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja masa kini, seperti keterampilan digital dan keterampilan interpersonal, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi.

Ketiga, sebagai penggerak revolusi 4.0, guru masa kini juga harus mampu memotivasi dan menginspirasi siswa untuk menjadi pribadi yang mandiri dan berkontribusi pada masyarakat. Hal ini berarti mereka harus berperan sebagai mentor dan pembimbing yang membantu siswa dalam menemukan minat dan bakat mereka, serta membimbing mereka dalam membangun karir dan mencapai tujuan mereka di masa depan. Dengan cara ini, para guru masa kini menjadi penggerak revolusi 4.0 dan membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan dan masyarakat.

MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU MELALUI PPG

Hayatun Nufus

Mutu Pendidikan di Indonesia tak kunjung membaik, banyak faktor penyebabnya baik itu secara internal maupun eksternal. salah satunya adalah rendahnya kompetensi guru di Indonesia. Jika kompetensi guru rendah, hal ini akan berimbas kepada kualitas anak didik. Selaras dengan UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 7 mengamanatkan bahwa pemberdayaan profesii guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajuemukan bangsa, dan kode etik profesi. UU ini menjelaskan bahwa guru diberi ruang untuk meningkatkan kompetensi dengan tidak memandang perbedaan latar belakang yang dimiliki, artinya semua pendidik berhak untuk mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi.

Berdasarkan Sukmadinata dalam Musfah (2012: 10), “Cara peningkatan kompetensi guru adalah melalui Pendidikan pra-jabatan (*pre service education*) dan Pendidikan dalam jabatan (*in service training*)”. Sejalan dengan kutipan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru. Pelaksanaan PPG dibagi menjadi dua jenis yaitu PPG Prajabatan dan PPG dalam jabatan. Kedua jenis PPG ini memiliki perbedaan. *Berdasarkan Info Edukasi*

<https://www.infoduniaedukasi.com/2020/01/perbedaan-ppg-prajabatan-dengan-ppg>. PPG Prajabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan Starata Satu (S1) Kependidikan dan S1/DIV nonkependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan PPG dalam jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan guru nonpegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Penyelenggaraan PPG ini dibantu oleh perguruan tinggi selaku instansi Pendidikan resmi yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan PPG yang ditetapkan oleh Menteri hingga mendapatkan sertifikat pendidik.

Mengikuti pelatihan, workshop, atau bimbingan teknis merupakan salah satu cara agar pendidik menjadi profesional. PPG merupakan bagian dari pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud guna mempersiapkan calon atau guru agar mempunyai kompetensi khusus sebagai pendidik. Seorang guru harus memahami pedagogik karena dalam proses pembelajaran seorang pendidik tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan secara formalitas sajaakan tetapi juga harus memahami karakter siswa sebagai bagian dari mulusnya transfer ilmu kepada murid.

Proses pembelajaran di PPG ini mencakup perkuliahan, praktik, dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang selama pelaksanaannya diawasi secara intensif oleh dosen. PPG Dalam Jabatan bertujuan untuk mencetak pendidik yang telah mengajar agar lebih profesional dan memiliki kompetensi dalam menyamapikan ilmu kepada murid. Menurut laman Kemendikbud Direktorat PPG , “ Program PPG Dalam Jabatan dirancang secara

sistematis dan menerapkan prinsip mutu mulai dari seleksi, proses pembelajaran, dan penilaian, hingga uji kompetensi, sehingga diharapkan akan menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional yang dapat menghasilkan lulusan unggul, kompetitif, dan berkarakter, serta cinta tanah air dan dalam waktu yang bersamaan, diharapkan mampu menjawab permasalahan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. PPG juga dirancang agar mampu membekali kemampuan problem solving, kritis, dan kreatif kepada calon guru profesional, melalui implementasi model pembelajaran dan kegiatan berbasis masalah (*problem-based learning*) dan proyek (*project-based learning*)”.

Materi dan proses pembelajaran PPG dalam Jabatan dapat meningkatkan kompetensi pendidik karena bertujuan untuk menyiapkan guru yang berorientasi kepada masa depan sebagai pembelajar mandiri, guru yang reflektif dan guru yang memiliki pola pikir berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Berdasarkan Pedoman Program Pendidikan Profesi Guru, secara garis besar materi yang disampaikan dalam pelaksanaan PPG yaitu a) pendalaman materi, kegiatan Pendalaman Materi melalui belajar mandiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri, b) pengembangan perangkat pembelajaran. Tahap pengembangan perangkat pembelajaran bertujuan mengembangkan perangkat pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TPACK yang memanfaatkan sumber belajar ICT dan berorientasi pada HOTS, serta membuat rekaman video pembelajaran berdasarkan perangkat pembelajaran yang telah disusun. Salah satu aktivitas dalam sesi ini adalah mengembangkan perangkat pembelajaran meliputi pembuatan RPP, bahan ajar digital, LKPD) Lembar Kegiatan Peserta Didik), media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. C) lokakarya Reviu perangkat pembelajaran. Kegiatan ini meriviu perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran yang telah dibuat mahasiswa pada tahap pengembangan perangkat pembelajaran, d) uji komprehensif, tujuan

kegiatan ini adalah untuk menilai kemampuan mahasiswa tentang teori pedagogik dan pengetahuan bidang studi, e) Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

Materi-materi yang diajarkan diharapkan dapat menghasilkan guru-guru yang profesional sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul serta dapat bersaing dalam dunia kerja yang dapat mengikuti perkembangan. Setelah mahasiswa dapat mengikuti semua program PPG dan dinyatakan lulus, seorang guru dapat dikatakan sebagai guru yang profesional.

Tujuan PPG seperti tercantum dalam Permendiknas Nomor 8 tahun 2009 Pasal 2 yaitu a) menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, b) menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik., c) untuk melakukan penelitian dan pengembangan profesional secara berkelanjutan.

REFORMASI BIROKRASI TATA KELOLA PENERIMAAN TENAGA PENDIDIK INDONESIA

Qurrota Ayu Neina

Tata kelola merupakan sistem yang mengelola seluruh aspek dalam manajemen sumber daya manusia secara komprehensif. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat permasalahan mengenai tata kelola dalam pemenuhan guru baru yang tidak selaras dengan jumlah guru yang memasuki masa pensiun. Moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan selama masa pemerintahan Jokowi-JK dianggap sebagai salah satu penyebab tidak sehatnya siklus ketenagakerjaan guru. Kondisi ini berakibat pada kekurangan guru hingga lima tahun ke depan yang diprediksi mencapai lebih dari satu juta orang guru. Padahal, seperti yang diketahui bersama bahwa pemenuhan kebutuhan guru profesional merupakan salah satu kunci penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, persebaran guru yang tidak merata akibat perpindahan guru tanpa disesuaikan dengan kebutuhan daerah juga turut menambah permasalahan guru.

Akan tetapi, kompleksnya permasalahan guru ini tidak menjadikan para lulusan LPTK (calon guru) untuk berhenti melamar sebagai pendidik, baik di sekolah negeri maupun swasta. Memang ironis bahwa semenjak diberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), profesi guru menjadi lebih menarik dengan adanya penambahan penghasilan melalui sertifikasi. Namun, pemberian sertifikasi ini nyatanya tidak dapat meningkatkan kualitas profesionalisme guru.

Hasil uji kompetensi guru menunjukkan bahwa rata-rata skor kompetensi guru adalah 57 (dari 100). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak guru yang belum memiliki kompetensi memadai untuk mengajar. Padahal, berbagai penelitian menyebutkan bahwa kualitas guru dapat memengaruhi kemajuan pendidikan suatu negara (Rice, 2003; Quin, Hemphill, & Heerde, 2017; Francis et al., 2019).

Patut diduga bahwa titik awal rendahnya kualitas guru dimulai dari buruknya proses rekrutmen guru. Disebutkan dalam *Research on Improving Systems of Education (RISE)*, sistem perekrutan guru yang selama ini dilakukan tidak berorientasi pada kualitas (Revina, 2020). Proses yang berjalan menunjukkan tidak adanya komitmen pemerintah terhadap sistem perekrutan guru yang efektif, tumpang-tindih kewenangan, adanya pengaruh kepentingan berbagai pihak, dan berkembangnya stigma bahwa status sebagai PNS lebih penting daripada kualitas. Perekrutan guru yang ada juga selalu mengikuti pola penerimaan CPNS secara umum, yang belum tentu cocok dengan pola/sistem pekerjaan pendidik. Kelemahan penerimaan CPNS adalah selalu berfokus pada lulusan baru dengan penerapan batas usia dan tidak memberikan kesempatan bagi mereka yang sudah berada di tengah karier tetapi telah melewati usia 35 tahun. Akibatnya, mereka yang sudah memiliki pengalaman mengajar justru tidak dapat mengikuti seleksi CPNS.

PPPK, Solusi Permasalahan Guru?

Proses penyiapan guru, seleksi, rekrutmen, dan retensi harus dipandang sebagai suatu yang sistem yang berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan berkait perbaikan tata kelola guru, penyelesaian isu guru honorer, dan tentunya peningkatan kualitas layanan publik sebagai bentuk reformasi birokrasi.

Sebagai bahan rujukan, *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)* (2005) memberikan panduan mengenai proses rekrutmen, seleksi, dan bagaimana mempekerjakan guru dalam pengembangan kebijakan, antara lain:1) seleksi guru harus

meliputi wawancara, persiapan rencana pembelajaran, dan demonstrasi keterampilan mengajar; 2) memprioritaskan antusiasme, komitmen, dan sensitivitas terhadap kebutuhan peserta didik dibandingkan senioritas; 3) calon guru perlu menjalani masa percobaan selama satu atau dua tahun sebelum dapat diangkat; 4) memberikan lingkungan sekolah yang stabil dan penuh dukungan bagi calon guru; 5) memperhatikan bahwa lamanya waktu pengabdian akan memengaruhi insentif yang diterima agar guru terus mengulus dan meningkatkan keterampilan profesinya; 6) mempertimbangkan perlunya guru memperbarui sertifikat mengajarnya setiap lima hingga tujuh tahun untuk memastikan kompetensi tersebut masih sesuai dengan yang dipersyaratkan; dan 7) memastikan sistem evaluasi.

Berkait dengan hal tersebut, pemerintah meyakini bahwa seleksi terbuka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan salah satu langkah strategis dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan penyelesaian masalah guru honorer. Pastinya pilihan ini harus dijalankan dengan sistem dan manajemen yang tepat agar pemenuhan guru tidak hanya merupakan pemenuhan dari sisi status kepegawaian, tetapi juga disertai dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya. Namun, apakah masalah tersebut selesai sampai di sini?

Pada satu sisi, sistem rekrutmen PPPK ini memang memiliki sisi kelebihan. *Pertama*, pelaksanaan seleksi guru PPPK memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk melamar menjadi guru sebagai pegawai pemerintah tanpa batasan usia sebagaimana dalam penerimaan CPNS. *Kedua*, formasi guru PPPK dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan disinkronkan dengan jumlah kekurangan guru pada data pokok pendidikan. Dan *ketiga*, guru PPPK juga akan mendapatkan kesejahteraan seperti PNS. Namun, tidak dipungkiri bahwa pelaksanaan sistem rekrutmen PPPK ini juga menyisakan beberapa masalah. Berkait dengan kelebihan pertama, terdapat kekurangan bahwa guru honorer yang sudah lama mengabdikan menjadi kurang diprioritaskan dan dianggap masa

pengabdianya tidak dihargai. Lalu, berkait dengan sisi kelebihan kedua, terdapat keresahan untuk para pelamar PPPK karena terdapat persaingan yang ketat, bukan saja dengan sesama honorer yang berusia di atas 35 tahun, tetapi juga dengan lulusan PPG yang tidak mengajar. Selain itu, terdapat celah untuk KKN melalui sistem titip menitip calon. Adapun berkait dengan sisi kelebihan yang ketiga, meskipun mendapatkan gaji yang sama dengan PNS, guru PPPK -secara praktis- tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karier dan tidak bisa menjadi PNS. Oleh karena itu, perbaikan seleksi dan rekrutmen menjadi penting untuk menghindari berlanjutnya permasalahan guru honorer ke depan.

Perbaikan total dalam sistem seleksi dan rekrutmen guru menjadi krusial dengan pertimbangan: 1) berdasarkan data kebutuhan guru; 2) pengondisian penerimaan calon guru yang diproduksi oleh LPTK harus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan; serta 3) mengutamakan kompetensi dan kualifikasi calon guru. Rekrutmen guru PPPK yang diwacanakan Kemendikbud merupakan langkah awal untuk perbaikan kualitas masukan guru. Kekhawatiran akan tes yang dapat menjadi hambatan untuk menyaring guru berkualitas perlu diperbaiki dan disesuaikan metode pengukurannya. Masih absennya payung hukum mengenai pengelolaan guru perlu menjadi perhatian karena banyak permasalahan yang terjadi di lapangan tidak bisa hanya mengacu pada UUGD. Oleh karena itu, perlu adanya undang-undang yang mengatur kepastian hukum terkait pengelolaan dan perekrutan sehingga dapat memastikan kualitas, distribusi, pengembangan, hingga kesejahteraan guru. Dalam undang-undang tersebut juga perlu memuat proses seleksi guru khusus dan terbuka, peningkatan kesejahteraan guru, tata kelola, dan kewajiban mengajar guru di lokasi yang ditetapkan.

GURU PROFESIONAL MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL

Prasetyo Yuli Kurniawan

Dalam era digital seperti sekarang ini, banyak orang yang memilih untuk mengakses informasi dan pembelajaran melalui media digital. Akibatnya, guru dituntut untuk bertransformasi dan menjadi profesional dalam penggunaan teknologi. Guru profesional tidak hanya mengajar secara konvensional, tetapi juga menerapkan teknologi dalam metode pembelajaran mereka. Dalam hal ini, guru profesional dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, menarik dan efektif bagi siswa.

Pertama-tama, guru profesional yang terampil dalam penggunaan teknologi dapat menggunakan multimedia untuk membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Misalnya, guru dapat menggunakan video pembelajaran untuk mengilustrasikan penjelasan yang sulit, sehingga siswa dapat memahami dengan mudah. Selain itu, guru dapat menggunakan gambar, grafik, dan diagram untuk menunjukkan ilustrasi dari konsep-konsep yang diperlukan untuk dipahami.

Selanjutnya, guru profesional dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kelas dengan mengadakan aktivitas yang melibatkan teknologi. Misalnya, guru dapat menggunakan aplikasi polling atau platform diskusi online untuk memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dengan materi dan satu sama lain dalam kelas.

Hal ini akan meningkatkan partisipasi siswa dan membuat mereka lebih terlibat dalam proses pembelajaran.

Guru profesional yang terampil dalam penggunaan teknologi juga dapat memberikan umpan balik secara instan pada kinerja siswa. Dengan menggunakan alat komunikasi seperti pesan atau email, guru dapat memberikan peringatan atau umpan balik yang lebih cepat pada siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang mempelajari pelajaran.

Guru profesional dapat menggunakan teknologi untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan dan pengalaman mereka sebagai pendidik. Misalnya, guru dapat mengikuti kursus online, podcast, atau webinar untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang tertentu. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran yang mereka berikan kepada siswa.

Secara keseluruhan penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat memberikan banyak manfaat bagi siswa dan guru. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, siswa dapat meningkatkan keterampilan digital mereka dan memperluas akses mereka ke sumber daya pendidikan yang lebih luas. Guru juga dapat meningkatkan efektivitas pengajaran mereka dan memberikan keterampilan baru untuk siswa untuk masa depan mereka.

Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan teknologi harus digunakan secara bijak dan seimbang. Teknologi hanya dapat menjadi alat bantu dan pendukung, bukan pengganti interaksi yang dibutuhkan siswa dan guru dalam pengalaman belajar yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi guru dan siswa untuk mencari keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi sosial di kelas.

HADAPI KURIKULUM MERDEKA: GURU BERBEKAL LITERASI DIGITAL

Mei Fita Asri Untari

Pendidikan merupakan program yang tersusun dari beberapa elemen seperti kurikulum, sarana dan prasarana, metode, peserta didik dan pendidik yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan. Di antara elemen-elemen tersebut yang dipandang penting adalah elemen guru. Dalam sebuah pendidikan terdapat proses pembelajaran yang memerlukan elemen guru dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya pendidikan, seseorang dapat mempunyai pengetahuan serta pemahaman tentang sesuatu secara kritis dalam berpikir dan bertindak. Akan tetapi kegiatan belajar mengajar sempat tersendat ketika adanya pandemi covid-19. Semua lembaga pendidikan harus menyelenggarakan pendidikan dalam jaringan dalam meminimalisasi penyebaran virus. Pada tahun berikutnya, penyebaran virus mulai melandai dan lembaga pendidikan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran dengan tatap muka. Hal ini menyebabkan adanya adaptasi yang harus dilakukan oleh semua pihak, baik pendidik dan peserta didik serta orang tua.

Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim telah mencetuskan konsep Pendidikan Merdeka Belajar. Konsep merdeka belajar merupakan baguan dari lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang di dalamnya terdapat unsur fleksibilitas terhadap kebebasan dan keterbukaan diri sebagai institusi pendidikan yang

berkontribusi untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa di era revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0 (Suhartono, 2021).

Implementasi konsep merdeka belajar mendorong peran guru baik dalam mengembangkan kurikulum yang berlaku juga dalam proses pembelajaran. Kontribusi guru dalam proses pengembangan kurikulum penting dilakukan untuk menyesuaikan isi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik di masyarakat. Selain sebagai salah satu sumber belajar, peran guru dalam konsep kurikulum yaitu sebagai fasilitator pembelajaran dimana hal tersebut dapat didukung oleh kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang refleksinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak yang tercakup dalam kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial.

Dalam menyongsong kurikulum merdeka guru perlu memiliki kemampuan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dewasa ini perkembangan teknologi informasi semakin meningkat, arus informasi yang masuk tidak dapat dibendung lagi. Semuanya diterima dengan begitu cepat dan perubahan paradigma ini berdampak pada semua bidang tidak terkecuali bidang pendidikan. Menurut Perdani dan Andayani (2021) menyatakan bahwa jika guru menguasai teknologi maka guru tersebut memiliki kesiapan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Jadi, penguasaan teknologi sangat penting dimiliki oleh seorang guru. Meskipun dalam pelaksanaannya guru akan menemui tantangan, tetapi seorang guru mau tidak mau harus siap segala resikonya dan tetap harus bersikap secara profesional.

Keterampilan Guru Abad 21

Keterampilan yang harus dimiliki guru pada abad 21 menurut (Trilling dan Fadel, 2009) yaitu (1) *life and career skills* (keterampilan hidup dan berkarir) seperti mengatur diri sendiri, interaksi sosial dan budaya produktivitas kepemimpinan serta tanggung jawab, (2) *learning and Innovation skills* (keterampilan belajar dan berinovasi) seperti berpikir kritis, dapat mengatasi masalah,

berkomunikasi dan berkolaborasi kreativitas dan informasi, (3) *information media dan teknologi skills* (keterampilan teknologi dan media informasi) dalam hal ini berarti kita semua harus memiliki literasi informasi literasi media dan literasi ICT. Dari penjelasan tersebut, tentu pada proses pembelajaran abad 21 harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai yang mendukung pembelajaran abad 21 tentu penggunaan komputer, handphone, dan jaringan internet adalah hal yang paling utama baik untuk peserta didik dan tentu untuk gurunya sendiri. Walaupun sebetulnya dunia pendidikan kita masih mencari model yang tepat untuk digunakan di Indonesia saat ini, melihat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang luas dengan segala keragamannya. Terdapat beberapa kelompok yaitu (1) Kelompok konservatif, dalam kelompok ini memandang bahwa teknologi banyak menimbulkan dampak negatif. Sehingga peserta didik tidak diperbolehkan menggunakan gawai. (2) Kelompok integratif atau konvergen, kelompok ini berpikir bahwa pendidikan tradisional dan pendidikan digital adalah solusi yang baik. Dalam pelaksanaannya kelompok ini memandang bahwa menjaga tradisi yang baik masa lalu dan menganggap digital adalah pengetahuan dan keterampilan baru yang harus dimiliki. (3) Kelompok fully digital atau digital penuh yang berpikir bahwa digital adalah solusi pendidikan saat ini, namun perlu dipertimbangkan juga terhadap sikap, karena aspek afektif tidak dapat diselesaikan atau digantikan dengan digital.

Desain Pembelajaran Merdeka Belajar

Dalam kurikulum merdeka guru dituntut dapat mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan kecakapan abad 21 pula. Maka guru perlu mendesain pembelajaran yang mengarah pada kemampuan tersebut. Desain pembelajaran yang dapat diterapkan adalah *project Based Learning*, *problem based Learning*, dan *Cooperative Learning*.

1. *Project Based Learning*

Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berlandaskan teori belajar konstruktivistik. Strategi pembelajaran yang menonjol dalam pembelajaran konstruktivistik antara lain adalah strategi belajar kolaboratif, mengutamakan aktivitas siswa daripada aktivitas pengajarnya. Strategi instruksional untuk menghadirkan pembelajaran berbasis *project based learning* dapat diwujudkan melalui kegiatan laboratorium, pengalaman lapangan, studi kasus, pemecahan masalah, panel diskusi, diskusi, *brainstorming*, dan simulasi.

2. *Problem Based Learning*

Desain pembelajaran *problem based learning* adalah mempersiapkan siswa untuk berpikir kritis dan analitis, untuk mencari serta menggunakan sumber pembelajaran yang sesuai. Sebagai langkah intruksional, awal pembelajaran siswa diberikan masalahmasalah dalam konteks dunia nyata yang memiliki keterkaitan langsung dalam kehidupan siswa. Kemudian siswa diarahkan untuk bekerja sama dalam mengurai permasalahan yang diajukan. Proses pembelajaran ini mendorong siswa untuk memecahkan masalah dengan kemampuan yang dimiliki, dan sekaligus mencari informasi-informasi baru yang relevan.

3. *Cooperative Learning*

Menurut Slavin sebagaimana dituliskan oleh Isjoni bahwa “*In cooperative learning methods, students work together in four member teams to master ma-terial initially presented by the teacher*”. Hal ini menegaskan berarti bahwa *cooperative learning* atau pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja kelompok-kelompok kecil ber-jumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang peserta didik lebih bergairah dalam belajar (Isjoni, 2011). Model pembelajaran ini tentunya akan menunjang kecakapan anak didik untuk bekerja sama dan berkolaborasi.

Literasi Digital bagi Guru

Untuk dapat menyelenggarakan desain pembelajaran merdeka belajar yang maksimal guru dapat memanfaatkan media digital untuk mengakses informasi sebagai pemantik permasalahan yang dapat dipecahkan oleh peserta didik. Maka guru perlu memiliki literasi digital yang memadai. Penguatan literasi digital bagi guru dimaksudkan agar guru memiliki kemampuan dalam memanfaatkan media digital untuk meningkatkan profesionalitas guru. Penguasaan literasi digital oleh guru dapat digunakan oleh guru untuk menyelesaikan tugas-tugas guru lainnya. Manfaat literasi digital untuk guru adalah (1) Guru dapat menambahkan internet sebagai sumber belajar untuk menunjang buku-buku cetak yang digunakan dalam pembelajaran. (2) penggunaan teknologi digital untuk media pembelajaran berbasis teknologi digital. Di era industri 4.0 media pembelajaran lebih bervariasi dengan memanfaatkan internet. Adanya media berbasis *Augmented Reality*, *Virtual Reality*, atau *Artificial Intellegency* yang banyak beredar di media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. (3) penggunaan teknologi digital untuk pengawasan terhadap peserta didik dengan cara mengawasi akun sosial media para peserta didik. (4) penggunaan teknologi digital untuk mengakses informasi secara cepat. Guru dapat mengupdate pengetahuan dan perjalanan kurikulum merdeka melalui website kemdikbud, laman ditpsd, Instagram kemdikbud, dll. (5) penggunaan teknologi digital untuk mempublikasikan karya dan informasi mengenai penerapan kurikulum merdeka yang telah dilakukan oleh guru atau sharing dengan guru lain. (6) penggunaan teknologi digital untuk promosi sekolah dengan cara membuat informasi tentang profil sekolah dan kegiatan sekolah secara online sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas.

Literasi digital yang dimiliki guru dalam menerapkan kurikulum merdeka dapat digunakan untuk merencanakan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Selain itu, kemampuan literasi digital guru dapat digunakan untuk mengembangkan diri dan sekolah.

KEKURANGAN GURU, SEBUAH KECEROBOHAN SISTEMIK

Zainal Arifin

Bertahun-tahun wacana ancaman itu digaungkan, tapi baru tahun 2017 masalah ini diakui oleh pemerintah. Ya baru diakui setelah beberapa ledakan “bom pensiun” terjadi tiap tahun dan mencapai puncaknya pada tahun 2019 lalu. Ini adalah kekonyolan luar biasa dari Kementerian Pendidikan yang “orang-orang di dalamnya” entah sibuk melakukan apa sampai-sampai masalah sebesar ini tidak terpetakan oleh mereka.

Masalah menjadi melebar ketika sekolah-sekolah emngangkat guru honorer untuk mengatasi masalah guru. Hal ini dilakukan karena sektor pendidikan adalah sektor yang tak boleh berhenti prosesnya. Sektor ini tidak seperti sektor lain yang bisa ditunda dan dikerjakan lain waktu. Pendidikan adalah perkara kotinuitas yang tak bisa dihentikan. Setelah terkena bom pensiun, rerata tiap sekolah dasar guru PNS-nya hanya 2 orang guru pada setiap satuan pendidikan. Selebihnya adalah guru honorer yang kadang hanya digaji 150 ribu per bulan.

Masalah kekurangan guru yang mengancam Indonesia sudah diingatkan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sejak awal tahun 2000-an. Akan adanya “bom pensiun” yang akan datang bertahap satu dekade mendatang, bila tidak ditangani secara baik bisa menjadi ancaman bagi pendidikan Indonesia.

Guru-guru honorer inilah yang menjadi “ambulance” ketika sekolah-sekolah negeri nyaris pecat nyawa dihantam bom pensiun. Guru-guru honorer ini pula yang ikut

menyangga dunia pendidikan biar tidak runtuh. Jumlahnya sangat besar dan ketika diakumulasi dengan kekosongan guru, jumlahnya mencapai 3 juta guru yang harus diangkat.

Ketika masalah kekurangan guru mulai diakui, muncul masalah baru karena pemerintah ternyata tak mampu mengangkat guru baru setelah tahu jumlah kekosongan mencapai 3 juta guru di seluruh sekolah negeri. Kemenkeu mengatakan pemerintah tidak mampu mengangkat guru karena ekonomi yang masih belum memungkinkan untuk mengangkat 3 juta guru baru.

Masalah ketidakmampuan pemerintah untuk mengangkat 3 juta guru ini juga sempat menjadi lelucon saat saya bertemu dengan Bupati Wonogiri Joko Sutopo untuk membicarakan masalah ini. Bupati Joko mengatakan pemerintah pusat itu aneh-aneh saja, *lha wong* yang pensiun 3 juta guru itu gajinya sudah tinggi, *kok* tidak mampu mengangkat lagi 3 juta pengganti yang gajinya malah lebih rendah. Alokasi dari gaji 3 juta guru yang pensiun itu “hilang” kemana?

Pemerintah memang terkesan setengah hati dalam memenuhi kebutuhan guru. Kendati setengah hati, sampai tahun 2021 lalu, pemerintah melakukan rekrutmen cukup masif yang membuat jumlah kekurangan guru tinggal 1 juta guru, dan pada tahun 2023 ini tinggal menyisakan 600 ribu formasi yang kosong. Harapannya sampai akhir 2023 semua kekurangan guru mulai terpenuhi.

Sistem gaji guru dan berbagai masalah kesejahteraan lainnya juga masih menjadi masalah. Rumusnya sudah jelas, bila ingin mendapatkan generasi yang bermutu, pendidikanya harus disejahterakan. Di negara ASEAN sendiri, gaji guru di Indonesia termasuk rendah dan lebih rendah dari Vietnam yang sepuluh tahun masih compang-camping mengatasi masalah pendidikan. Jangankan menyamai negara-negara maju dalam menggaji tinggi para guru, *take home pay* guru saja masih lebih rendah daripada pegawai baru di Kemenkeu.

Kalaupun ditopang oleh sertifikasi guru, masalah sertifikasi juga masih menjadi tunjangan yang sering “diincar” untuk dihilangkan. Seperti halnya beberapa waktu lalu, pengajuan RUU Sisdiknas dengan sengaja akan menghilangkan frasa tunjangan profesi yang akan berdampak pada hilangnya payung hukum untuk meyejahterakan guru. Bila tunjangan profesi hilang, pemerintah bisa saving sekitar 80 triliun per tahun. Angka yang terlihat fantastis, tapi bila dibagi rata dengan jumlah guru yang ada nilainya sangat kecil sekali.

Dengan dana yang sekecil itu, masih saja tunjangan itu tidak lancar pencairannya. Dibandingkan dengan Kemenag, setelah dilakukan reformasi birokrasi, sebagian besar wilayah Kemenag sudah lancar mengeluarkan gaji tiap satu bulan sekali. Sebaliknya, penggelontoran tunjangan profesi Kemendikbud selalu tidak bisa satu bulan sekali oleh suatu sebab yang tak bisa dijelaskan. Bagaimana pendidikan kita akan mampu bersaing dengan pendidikan di negeri lain bila cara memperlakukan guru saja sangat tidak manusiawi.

Compang-campingnya pengelolaan guru sampai membuat kekurangan guru yang akut seperti ini merupakan indikasi dasar “orang-orang Kemendikbud” tidak memiliki kemampuan bagus dalam memproyeksikan apa yang akan terjadi ke depan. Hal ini juga perlu menjadi perhatian bagi Irjen Kemedikbud dan MenPAN RB untuk mengevaluasi kinerja pegawai-pegawai kemendikbud yang cenderung hanya menjalankan pekerjaan rutinitas saja. Padahal, tiap lima tahun sekali mereka harus membuat peta jalan pendidikan. Jangan-jangan peta jalan pendidikannya hanya *copy paste* dari peta jalan sebelumnya dan diutak-atik sedikit saja.

Hal lain yang perlu menjadi catatan dari munculnya masalah kekurangan guru adalah perlunya dunia pendidikan menata ulang semua proses rekrutmen guru setelah semua kebutuhan guru terpenuhi. Proses tata ulang ini akan terkait dengan transformasi pendidikan, sistem test, dan target-target pendidikan yang harus tetap dijalankan. Cara ini juga akan membuat sistem pengelolaan pendidikan tidak menjadi sistem yang stagnan melainkan menjadi sistem yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu. ***

PELATIHAN PEMBELAJARAN DIGITALISASI BAGI GURU

Uki Hares Yulianti

Pada era industri 4.0 perkembangan teknologi makin canggih. Pada era ini mengubah segala kebiasaan menjadi serba digital. Tidak heran penerapan digitalisasi di bidang pendidikan juga memengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Dalam dunia pendidikan saat ini, guru tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan yang sudah diraih saat kuliah saja atau hanya mengandalkan teori yang didapatkan saja. Akan tetapi, guru juga harus merespon perubahan yang terjadi di bidang teknologi ini. Tidak sedikit guru yang tidak mampu merespon perubahan dikarenakan tidak ada dukungan dari pihak sekolah dalam melakukan pengajaran yang intensif. Seperti penyediaan peralatan praktikum siswa yang memadai, pelatihan yang mampu mengembangkan ilmu yang didapatkan di kelas dari gurunya, atau fasilitas kenyamanan bagi siswa dan guru untuk bisa eksplor dunia luar dengan mudah. Oleh karena itu, guru wajib melakukan pelatihan dalam menggunakan teknologi digital supaya proses belajar tetap berjalan dengan lancar.

Kualitas Guru di Indonesia

Kualitas pendidikan di Indonesia yang masih rendah disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah belum sejahteranya para guru. Dari tahun 2012 hingga 2015, sebanyak 1,3 juta dari 1,6 juta guru yang mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) yang mengukur kompetensi mengelola pembelajaran dan pemahaman atas mata pelajaran yang diampu bahkan tidak mencapai nilai minimum.

Menurut *Research on Improving Systems of Education* (RISE) dalam studi kualitatif yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa fokus perekrutan guru ialah memenuhi kebutuhan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan dikarenakan profesionalitas gurunya telah memadai. Lebih dari 50% guru di Indonesia merupakan pegawai negeri sipil dan 90% tumpuan belajar ada pada mereka, padahal kualitas mereka belum bisa terjamin dengan baik.

Manajemen perekrutan ASN sebagai guru tiap tahun memang berangsur lebih baik, tetapi yang menjadi masalah apakah yang lolos ASN memiliki kompetensi yang baik menjadi pendidik. Guru perlu memiliki motivasi kuat, *soft skill* dan *hard skill* yang baik untuk menjalankan tugasnya. Guru profesional yang ditandai oleh empat macam kompetensi (paedagogik, kepribadian, sosial dan profesinal).

Meningkatkan kompetensi guru merupakan upaya untuk memenuhi standar profesionalitas guru agar sesuai dengan tuntutan profesi, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains. Upaya tersebut perlu dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru adalah melalui pelatihan.

Pelatihan Digitalisasi bagi Guru

Pelatihan untuk guru adalah pelatihan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk menjadi profesional dan memaksimalkan kegiatan pembelajaran di kelas. Latihan ini biasanya mencakup teknik merencanakan pengajaran hingga cara meningkatkan pembelajaran yang efektif. Pada era saat ini mengikuti pelatihan lebih mudah karena dapat mengakses teknologi dan informasi bisa dilakukan kapan saja. Guru dapat mengikuti pelatihan secara luring, maupun pelatihan secara daring (melibatkan sarana teknologi/digital).

Beberapa manfaat yang didapatkan guru mengikuti pelatihan digitalisasi sebagai berikut.

1. Meningkatkan kompetensi dan kualitas guru
Melalui pelatihan digitalisasi, guru dapat meningkatkan kualitas kompetensi diri supaya dapat mengajar dengan baik dan menyampaikan materi yang dibutuhkan para siswa. Seorang guru harus cepat beradaptasi dan terus menerus belajar, baik dari komponen hingga struktur pembelajaran berbasis *daring*. Hal ini dikarenakan guru sebagai fasilitator yang dibutuhkan siswa dalam memperoleh materi pengajaran selama mengikuti sesi pembelajaran.
2. Guru dapat memanfaatkan konten digital dalam pembelajaran
Guru dapat memanfaatkan konten digital untuk memaksimalkan pembelajaran yang disediakan oleh sekolah, seperti menggunakan buku sekolah elektronik, melakukan latihan melalui bank soal, hingga memanfaatkan kelas *daring* dengan mengandalkan *video conference*. Penerapan digitalisasi di sekolah, sebaiknya proses pelatihan juga dibarengi fasilitas yang memadai, misalnya saja dengan melakukan optimasi *server* resmi untuk menunjang pembelajaran digital di sekolah.

Memalui pelatihan yang diikuti, guru juga dibimbing oleh pelatih yang sudah ahli dan berkecimpung cukup lama (berpengalaman) di dunia pendidikan. Selama proses hingga selesai mengikuti pelatihan, guru akan di-*monitoring* dan mendapatkan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kompetensi yang sudah dikuasai. Setelah mengikuti pelatihan, guru diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dalam proses mengajar pada anak didiknya. Sehingga kegiatan pembelajaran bisa terlaksana dengan efektif, menyenangkan juga berkualitas. Pelatihan merupakan salah satu upaya meningkatkan kompetensi dan kualitas guru dengan jangka waktu yang singkat, namun tetap komprehensif. Bukan sekedar ilmu teoritis yang akan diperoleh, guru juga mendapatkan ilmu praktis atau aplikatif yang dapat diterapkan saat mengajar.

Dapat disimpulkan guru profesional di era digital adalah guru yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana disebutkan di atas berbasis pada penggunaan jaringan yang didukung teknologi digital. Penggunaan teknologi digital tidak hanya dalam kegiatan belajar mengajar saja, melainkan juga dalam melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti dalam pengelolaan administrasi pendidikan, pemberian tugas-tugas, pelaksanaan evaluasi dan lain sebagainya. Selain itu, guru yang dibutuhkan di era digital adalah guru yang memiliki kemahiran dalam menilai penggunaan teknologi yang edukatif dan non edukatif. Guru hendaknya terus mengevaluasi kemampuan siswa yang dibutuhkan untuk bersaing dalam ekonomi global. Ia juga harus menjadi pembelajar seumur hidup dan harus bersedia untuk belajar tidak hanya dari rekan-rekan mereka, tetapi juga dari siswa mereka juga.

BAB 4

MANAJEMEN KURIKULUM

URGENSI PEMBELAJARAN SASTRA DALAM KURIKULUM MERDEKA

Prabawati Nurhabibah

Suatu hari dalam sebuah seminar seorang sastrawan bertanya kepada para peserta “Apa korelasinya para koruptor yang ditangkap oleh KPK dengan pengalamannya semasa kecil yang tidak pernah dibacakan dongeng? Seketika ruanganpun menjadi hening. Peserta hanya bisa menebak-nebak dalam hatinya. Kemudian sastrawan tersebut menjelaskan dengan interpretasinya hubungan antara para pejabat yang ditangkap KPK karena kasus korupsi dengan orang yang seumur hidupnya tidak pernah berkenalan dengan dunia sastra. Menurutnya, sastra itu memperhalus rasa, menciptakan imajinasi atau angan-angan. Sedangkan orang-orang yang ditangkap KPK karena kasus korupsi itu adalah sekelompok orang yang tidak punya imajinasi, tidak bisa membayangkan berapa banyak kehidupan yang Ia rampas haknya dari hasil kejahatan yang dilakukan. Dia (koruptor) juga tidak bisa membayangkan bahkan berpikir panjang ke depan masa depan keluarga dan karirnya akan hancur jika praktik kejahatan yang Ia lakukan diketahui oleh pihak berwajib bahkan seluruh dunia.

Sastrawan itu kemudian melanjutkan penjelasannya mengenai korelasi antara dongeng dan koruptor. Ia bercerita bahwa dahulu masa kecilnya dipenuhi dengan kebahagiaan karena sering mendapat cerita dongeng dari orang tuanya. Lihatlah betapa jauh berbedanya masa dahulu dan sekarang. Sekarang orang tua sudah

sangat disibukkan dengan pekerjaan dan mencari dunia. Orang tua sekarang menganggap dongeng itu tidak penting. Bahkan Sebagian menganggap itu hanyalah tugas dari guru di sekolah. Ia berpendapat bahwa mungkin orang-orang yang saat ini mendekam dalam penjara karena kasus korupsi adalah orang-orang yang pada saat masa kecilnya tidak pernah dibacakan dongeng oleh orang tuanya. Hal ini menyebabkan para koruptor ini tidak memiliki empati dan kemampuan untuk berkhayal maupun berimajinasi mengenai masa depan serta dengan mudahnya mengambil jalan pintas dengan cara berkorupsi.

Seperti yang kita ketahui dongeng adalah cerita yang telah menjadi bagian dari kebudayaan manusia sejak zaman dahulu kala. Dalam budaya Indonesia, dongeng dikenal sebagai cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi secara lisan. Dongeng sering kali digunakan sebagai sarana hiburan untuk mengisi waktu luang atau sebagai media untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan mengembangkan imajinasi anak-anak.

Dalam dongeng, terdapat berbagai macam karakter yang mewakili sisi kehidupan manusia, baik sisi positif maupun negatif. Ada karakter-karakter yang selalu menjadi pahlawan dan menunjukkan kebaikan hati dan kemampuan luar biasa dalam mengatasi masalah, seperti tokoh Si Kancil dalam cerita rakyat Jawa, atau tokoh-tokoh dalam dongeng klasik Eropa seperti Cinderella atau Snow White. Di sisi lain, ada juga karakter antagonis seperti penyihir jahat atau monster yang selalu ingin mengacaukan hidup pahlawan dan menghalangi pencapaian tujuannya.

Dalam setiap dongeng, terdapat pesan moral atau pelajaran yang dapat diambil oleh pembaca atau pendengar. Pesan moral tersebut dapat berupa nilai-nilai positif seperti kebaikan hati, kerja keras, ketekunan, dan keberanian, atau sebagai peringatan terhadap kelemahan manusia seperti keserakahan, keangkuhan, dan nafsu duniawi.

Dalam konteks kebudayaan modern, dongeng masih tetap relevan dan seringkali diangkat menjadi inspirasi dalam film dan literatur. Beberapa contoh karya yang diangkat dari dongeng klasik seperti "Alice in Wonderland" karya Lewis Carroll atau "The Wizard of Oz" karya L. Frank Baum.

Namun, peran dongeng dalam masyarakat tidak hanya sebagai sarana hiburan atau pelajaran moral. Dongeng juga berfungsi sebagai media untuk mempertahankan identitas budaya dan membantu mengajarkan nilai-nilai kearifan lokal. Beberapa dongeng dari daerah tertentu di Indonesia, seperti Malin Kundang atau Bawang Merah Bawang Putih, menjadi cerita yang membangun identitas budaya masyarakat setempat.

Dalam era digital saat ini, dongeng masih tetap diminati dan bahkan semakin mudah diakses melalui berbagai platform seperti buku elektronik, audiobook, dan video animasi. Semua ini menunjukkan bahwa dongeng masih memiliki tempat di hati masyarakat dan akan terus menjadi bagian dari kebudayaan manusia di masa depan.

Permasalahan selanjutnya adalah dalam kurikulum di dunia Pendidikan Indonesia, sastra justru dianggap tidak penting dan dianaktirikan keberadaannya. Hal ini terlihat dari pembelajaran sastra yang hanya mendapat sedikit porsi di berbagai tingkatan mulai dari Pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Padahal Kurikulum mempunyai peran yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan dan keberhasilan pendidikan. Kualitas pendidikan dapat dicapai jika kurikulum yang dibuat juga berkualitas.

Pengembangan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan pendidikan yang bisa memberi kesempatan dan pengalaman kepada subjek didik mengembangkan semua potensi diri yang dimiliki supaya dapat dicapai prestasi yang unggul. Proses pendidikan harus

3 memperhatikan tingkat perkembangan berpikir, minat, bakat, motivasi, dan semua karakteristik yang dimiliki subjek didik.

Kurikulum yang saat ini sedang hangat diperbincangkan adalah Kurikulum Merdeka yang merupakan sebuah inisiatif yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Indonesia untuk memberikan kebebasan pada sekolah-sekolah untuk mengembangkan kurikulum mereka sendiri. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan kebebasan pada sekolah untuk menentukan jenis pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa mereka.

Kurikulum Merdeka berbeda dengan kurikulum yang sudah ada sebelumnya, di mana kurikulum yang sudah ada memiliki standar dan kurikulum nasional yang harus diikuti oleh semua sekolah di seluruh Indonesia. Dalam Kurikulum Merdeka, sekolah memiliki kebebasan untuk menentukan jenis kurikulum yang ingin mereka terapkan, baik berupa kurikulum yang lebih spesifik atau kurikulum yang lebih umum.

Kurikulum Merdeka juga memberikan kebebasan pada sekolah untuk menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti pembelajaran online atau blended learning, yang lebih sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. Selain itu, Kurikulum Merdeka juga menekankan pada pembelajaran yang lebih praktis dan terintegrasi dengan dunia kerja, sehingga siswa dapat memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

Namun, meskipun memberikan kebebasan pada sekolah, Kurikulum Merdeka tetap harus memenuhi standar kurikulum nasional yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Selain itu, sekolah juga harus memperhatikan kebutuhan siswa dan karakteristik masyarakat di sekitar sekolah dalam menentukan jenis kurikulum yang sesuai. Kurikulum Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan

bagi siswa serta membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kenyataan yang ada saat ini, kurikulum merdeka hanyalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013. Dalam materi pembelajaran baik di buku guru maupun buku siswa tidak jauh berbeda dengan buku pegangan yang diedarkan pada saat kurikulum 2013 berlaku. Semuanya masih sama, bahkan porsi sastra juga hanya mendapat perhatian yang sangat sedikit dari kebijaksanaan Menteri Pendidikan kita saat ini.

Lantas, akan dibawa kemana masa depan anak didik kita jika porsi sastra yang seharusnya mendapat tempat lebih banyak justru semakin terdegradasi dalam kurikulum di Pendidikan kita yaitu Kurikulum Merdeka?

KURIKULUM MERDEKA, AKANKAH MERDEKA?

Hetilaniar

Peran penting dalam pendidikan ada pada kurikulum. Kurikulum sangat penting karena berhubungan langsung dengan arah, substansi dan proses pendidikan, yang mempengaruhi jenis dan kepercayaan lulusannya. Kurikulum memuat rencana dan pelaksanaan pendidikan yang bermutu dan terarah. Di Indonesia, kurikulum telah mengalami modifikasi yang cepat. Hingga saat ini, perubahan kurikulum terus terjadi. Perubahan kurikulum merupakan akibat dari faktor-faktor termasuk psikologi. Pemerintah selalu memunculkan ide-ide baru untuk membuat pendidikan lebih efektif dan efisien. Upaya pemerintah untuk memodifikasi kurikulum tentu saja dimaksudkan untuk menghasilkan warga negara yang kompeten dan bermoral. Saat ini pendidikan memberlakukan kurikulum merdeka.

Kurikulum merdeka sebagai pilihan satuan kurikulum pendidikan yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat dalam rangka pemulihan pembelajaran tahun 2022–2024. Krisis pembelajaran yang berkepanjangan di Indonesia tampaknya menjadi kekuatan pendorong di balik kurikulum merdeka. Saat ini siswa dapat memilih mata pelajaran yang ingin diambil berdasarkan minat dan bakatnya. Kurikulum merdeka juga dikenal sebagai kurikulum *prototipe*, dibuat sebagai kerangka kerja yang lebih mudah beradaptasi untuk kurikulum yang berkonsentrasi pada minat, pengembangan karakter dan kebutuhan siswa. Merdeka belajar adalah salah satu

yang sedang diupayakan dan diajukan oleh Mendiknas. Program yang mendorong proses belajar siswa secara mandiri atau bebas sesuai dengan kepribadian dan minatnya dikenal dengan inisiatif merdeka belajar. Kurikulum ini berfokus pada kebebasan untuk belajar secara mandiri dan kreatif.

Kurikulum Merdeka menawarkan metode pengajaran yang fleksibel dan juga membebaskan kemampuan setiap anak untuk mengembangkan kemampuannya yang unik. Dengan kurikulum merdeka, guru merancang pelajaran berdasarkan potensi dan minat masing-masing siswa. Siswa belajar dengan terlibat dalam kegiatan langsung yang ditawarkan kepada mereka, memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi dan mengungkap potensi dari apa yang diajarkan kepada mereka secara verbal atau visual. Setiap siswa memiliki bakat dan minat yang unik, sehingga seseorang tidak dapat dipaksa untuk mempelajari hal-hal yang tidak mereka sukai hal ini merupakan prinsip dari panduan di balik pengembangan konsep kurikulum merdeka. Dalam kurikulum ini siswa dapat lebih mengeksplorasi minat dan bakat mereka melalui kegiatan pembelajaran. Kurikulum merdeka mencakup berbagai studi intrakurikuler. Dengan kurikulum ini, pembelajaran akan lebih maksimal sehingga siswa memiliki waktu yang cukup untuk menggali ide dan mengembangkan kompetensinya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan kurikulum Merdeka Belajar untuk menjawab tuntutan sistem pendidikan di era revolusi industri 4.0. Secara teori, belajar mandiri digunakan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi dunia pendidikan di era revolusi industri 4.0. Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang, terutama infrastruktur pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka ini. Senada dengan hal tersebut, gagasan belajar mandiri secara keseluruhan membawa revolusi pendidikan di semua tingkat sekolah. Penciptaan kurikulum merdeka dilakukan dengan cara yang lebih fleksibel, dengan penekanan pada pengajaran konsep-konsep penting siswa dan membangun karakter siswa. Akibatnya, kurikulum merdeka

memanfaatkan kualitas khusus yaitu pendidikan berbasis proyek yang menganut Profil Pelajar Pancasila yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dan *soft skill* yang dimiliki siswa. Pembelajaran yang diutamakan dalam kurikulum merdeka ini yaitu literasi dan numerasi.

Program Merdeka Belajar hanya dapat terwujud jika prakarsa regulasi pemerintah dan intervensi lainnya berhasil membawa perubahan di masing-masing lembaga pendidikan. Kurikulum Merdeka jelas sangat menjanjikan dari sudut pandang konseptual dan ideologis. Siswa akan menjadi pusat pembelajaran berkat daya pikat kurikulum baru seperti saat ini. Sekolah atau organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum merdeka harus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu caranya adalah dengan memberikan pelatihan kepada guru yang akan menghadapi kurikulum merdeka ini. Materi mendasar dalam pelatihan yang perlu diberikan kepada guru adalah kurikulum, konsep, dan tahap pengaplikasian. Selain itu pengalaman dunia nyata juga harus membantu guru untuk mengembangkan kurikulum merdeka. Tujuannya untuk memberikan pemahaman yang bermanfaat sekaligus pengetahuan yang lebih mendasar.

Kurikulum merdeka sebenarnya masih perlu disosialisasikan kepada para pendidik, karena terkadang pendapat yang diberikan setiap individu itu berbeda. Ada yang bisa menerima kurikulum ini namun ada juga yang kesulitan dalam mengimplementasikannya. Merdeka atau tidaknya kurikulum ini diterapkan tergantung dengan peran pendidik yang menerapkannya. Dengan demikian, selain kurikulum berubah pemerintah juga perlu menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan yang dibutuhkan kurikulum tersebut.

NASIB PENDIDIKAN SASTRA

Meina Febriani *

Alkisah seorang peserta didik di tingkat SMP bertanya kepada gurunya, “Dari mana kita bisa belajar sastra?”

Sang guru tidak segera menjawab. Dia mencari buku di atas mejanya, ditemukan sebuah buku teks pelajaran berjudul “Bahasa Indonesia”. Tidak hanya itu, masih belum cukup yakin, sang guru pun berlanjut mencari tempelan jadwal mata pelajaran di kelas itu. Lalu ditemukanlah nama mata pelajaran yang tertera adalah “Bahasa Indonesia”. Pantas benar, sang guru tidak bisa menjawab pertanyaan itu, sebab tidak tertera pula nama “sastra” dalam nomenklatur mata pelajaran di Indonesia. Di manakah pendidikan sastra?

Tertahan selama puluhan tahun tepatnya sejak Kurikulum 1994 diberlakukan di Indonesia. Kita tidak lagi menemukan kata sastra dalam nomenklatur mata pelajaran. Pendidikan sastra telah terintegrasi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia secara implisit alih-alih bahasa dianggap sebagai wahana bersastra.

Cerita berlanjut, peserta didik itu kembali bertanya kepada gurunya, “Untuk apa belajar sastra?” Tidak menunggu lama, dengan penuh keyakinan, sang guru pun menjawab bahwa sastra adalah salah satu media penanaman budi pekerti yang penting diberikan dalam masa-masa perkembangan kepribadian peserta didik. Sastra bukanlah tulisan imajinatif yang tidak punya makna sama sekali. Bahkan, sering kali diremehkan eksistensinya. Justru melalui sastralah kita bisa “melihat dunia” dari berbagai sudut pandang. Hal tersebut sangat bermanfaat untuk mengasah aspek humanis berupa kepekaan batin dan berpikir kritis dalam menghadapi fenomena perubahan zaman.

Sebuah contoh nyata, kenangan cerita monumental seperti Malin Kundang, Si Kancil, dan Sangkuriang sebagai gambaran hitam-putihnya realitas kehidupan dalam bingkai imajinasi. Cerita-cerita sebagai salah satu wujud karya sastra adalah artefak ingatan yang menghiasi masa kecil kita. Dari situlah sesungguhnya kita menyadari bahwa karya sastra adalah karya kreatif bernilai edukasi yang disampaikan dengan wahana bahasa.

Oleh sebab itu, Horace menganggap bahwa karya sastra yang baik harus memenuhi dua kriteria yaitu *dulce et utile* yang artinya sastra harus indah dan memberikan manfaat (Darma dalam buku *Pengantar Teori Sastra*, 2004). Namun, hal tersebut dikritik oleh Citraningtyas (2010; 2013) bahwa karya sastra dalam ranah pendidikan sesungguhnya lebih berorientasi pada *utile et dulce*. Pertukaran konsep tersebut diorientasikan bahwa sastra tidak melupakan entitas yang netral. Artinya, pada aspek pendidikan, kriteria bermanfaat/mendidik merupakan aspek yang esensial.

Pada segmen yang berbeda, seorang dosen bertanya kepada mahasiswanya di Jurusan Sastra, “Berapa banyak buku sastra yang telah dibaca semasa duduk di bangku sekolah?” Tidak banyak yang menjawab lantang, hanya beberapa mahasiswa mengaku tahu beberapa judul puisi karya sastrawan Indonesia dan pernah membaca 1-2 novel ketika duduk di bangku SMA. Selebihnya tidak pernah membaca karya sastra dengan serius.

Fenomena itu, membuat kilas balik pengalaman Taufiq Ismail (sastrawan Indonesia) bahwa pendidikan sastra di Indonesia terlantar menjadi benar adanya. Menurut beliau, peserta didik AMS Hindia Belanda (1929-1942) diwajibkan membaca 15-25 buku sastra selama tiga tahun. Jumlah tersebut setara dengan jumlah buku sastra yang harus dibaca oleh peserta didik di negara-negara maju seperti Jerman, Prancis, Belanda, Jepang, Swiss, dan Amerika Serikat. Rupanya negara dengan sistem pendidikan yang maju telah menyadari betul manfaat pendidikan sastra (Suryaman, dalam *Pengalaman Membaca Karya Sastra dalam Perspektif Pembelajaran* tahun 2018).

Fenomena itu menggugah pertanyaan kritis mengenai implementasi pendidikan sastra. Apakah proporsi sastra di pendidikan formal sudah diprioritaskan? Berdasarkan telaah yang telah dilakukan, proporsi pendidikan sastra di mata pelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 yang berbasis teks, ditemukan 27,2 persen teks sastra dan 72,8 persen teks nonsastra pada jenjang SMP, serta 43 persen teks sastra dan 57 persen teks nonsastra pada jenjang SMA. Sedangkan, pada Kurikulum Merdeka ditemukan 35 persen teks sastra dan 65 persen teks nonsastra pada jenjang SMP, serta 43 persen teks sastra dan 57 persen teks nonsastra pada jenjang SMA.

Dari hal tersebut, dapat dipersepsikan bahwa tidak banyak yang menganggap sastra adalah hal penting. Oleh sebab itu, beberapa pihak seringkali menyatakan bahwa sastra mengalami diskriminasi dalam linikehidupan masyarakat dan pendidikan.

Sastra di Kurikulum

Perubahan kurikulum adalah sebuah keniscayaan. Setiap perubahan tentu membawa harapan bagi para pelaku kurikulum seperti guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat Indonesia secara umum. Hal itu juga terjadi bagi para pemerhati sastra, harapan atas keberpihakan terhadap pendidikan sastra di dunia persekolahan masih terus membara.

Berbagai tulisan mengenai kritik pembelajaran sastra yang seperti “dianaktirikan” telah terbit sejak puluhan tahun lalu. Sesungguhnya upaya perhatian terhadap pendidikan sastra sudah mulai diupayakan seperti program yang pernah dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di antaranya program sastrawan masuk sekolah, gerakan cinta sastra, pengadaan produk literasi sastra (buku cerita anak, seri antologi fabel nusantara, buku sastrawan berkarya, dll). Namun, apakah upaya itu sudah cukup efektif sebagai proses internalisasi budi pekerti melalui sastra?

Upaya literasi sastra melalui strategi integrasi pendidikan formal adalah salah satu jalan terbaik yang perlu ditempuh. Oleh sebab itu, berikut adalah lima strategi upaya yang bisa

dipertimbangkan untuk memperbaiki nasib sastra di pendidikan formal.

Pertama, mulai dari ranah nomenklatur dengan menyertakan kata sastra di dalam nomenklatur mata pelajaran yang diberlakukan pada pendidikan formal. Hal tersebut adalah simbol keberpihakan pemerintah melalui nomenklatur Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai mata pelajaran. Dalam rumpun ilmu humaniora, kelompok studi bahasa (linguistik) dan sastra memiliki kedudukan yang setara. Untuk itu, penting pula kiranya nomenklatur mata pelajaran dikembalikan pada Bahasa dan Sastra Indonesia.

Kedua, proporsi yang seimbang antara bahasa dan sastra. Berdasarkan telaah pemetaan materi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi sastra selalu mendapat proporsi kurang dari 50 persen. Keseimbangan proporsi teks sastra dan nonsastra juga perlu diperhatikan dalam sebaran materi.

Ketiga, pemilihan karya sastra sebagai materi ajar sastra dilakukan melalui proses yang serius. Oleh sebab itu, karya sastra yang muncul sebagai materi ajar adalah karya sastra terpilih yang bernilai edukasi dan sesuai dengan perkembangan psikologi peserta didik.

Keempat, kelengkapan keterampilan bersastra yang komprehensif meliputi aspek apresiasi dan ekspresi (kreasi) yang seimbang. Lebih dari itu, harapannya kegiatan bersastra dapat disajikan dengan kreatif, kekinian, sesuai perkembangan zaman, bahkan merambah ranah teknologi digital.

Kelima, adanya kewajiban membaca buku sastra perlu ditegaskan kembali. Pada tahun 2022 tercatat sejumlah 42.460 perpustakaan telah berdiri di Indonesia (Perpusnas, 2022). Jumlah tersebut tentu saja sudah sangat cukup sebagai “rumah ilmu” bagi peserta didik. Namun, mirisnya tingkat literasi peserta didik Indonesia berdasarkan Program for International Student Assessment (PISA) justru berada di peringkat 62 dari 70 negara (Kemkopmk, 2022).

Pendidikan sastra, diharapkan menjadi salah satu jembatan bagi peserta didik Indonesia untuk menjadi pribadi yang tidak hanya berilmu tapi juga humanis dan beradab. (*MF*)

***Artikel pernah dimuat di Surat Kabar Suara Merdeka
8 Maret 2023**

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERORIENTASI EKONOMI KREATIF

Imaniah Kusuma Rahayu

Baru-baru ini, marak berbagai *content creator* di berbagai *platform* digital. Hal ini menjadikan popularitas profesi tersebut kian menanjak. Orang berlomba-lomba untuk menciptakan berbagai konten yang dapat menarik perhatian penonton. Topiknya pun beragam, mulai dari kecantikan, fashion, kuliner, hingga *daily blog*.

Content creator merupakan sebutan bagi seseorang yang melahirkan berbagai materi konten baik tulisan, gambar, video, suara maupun gabungan dua materi atau lebih. Nah konten-konten inilah yang dibuat oleh para *content creator* untuk dimuat di *platform digital* seperti *YouTube*, *Instagram*, dan *TikTok*.

Seorang *content creator* harus mempunyai ide-ide orisinal agar materi yang dihasilkan baru serta berbeda sehingga dapat diterima dan laku di masyarakat. Konten yang dibuat pun diharapkan bisa menjadi *trend-setter*. Untuk menjadi seorang *content creator* yang handal, dibutuhkan kemampuan dan keterampilan yang baik dalam menulis, mengambil foto, merekam gambar, maupun menyunting video. Para *content creator* biasanya banyak dibutuhkan pada industri kreatif, namun ada pula yang bekerja secara mandiri.

Para *content creator* juga dituntut untuk memiliki beberapa keahlian. Salah satu diantaranya adalah memiliki kemampuan *copywriting* yang baik. Apa itu *copywriting*? *Copywriting* adalah teknik menjual produk lewat tulisan yang akan membujuk *audiens* (pemisra)

untuk membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Jadi, jika skill *copywriting* baik, akan banyak produk yang bisa dijual.

Terkait kemampuan *copywriting*, pada mata pelajaran bahasa Indonesia capaian pembelajaran pada fase e dan f sudah memfasilitasinya. Pada fase e yang umunya untuk kelas X SMA/ MA/ Program Paket C) pada elemen menulis, terdapat capaian pembelajaran yang berisi: peserta didik mampu mengalihwahkanakan satu teks ke teks lainnya untuk tujuan ekonomi kreatif. Selain itu, peserta didik mampu untuk menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Sedangkan pada fase F yang umunya untuk kelas XI dan XII SMA/ MA/ Paket C) masih pada elemen yang sama, yaitu menulis, terdapat capaian pembelajaran yang menyatakan bahwa peserta didik mampu memodifikasi/ mendonstruksikan karya sastra untuk tujuan ekonomi kreatif. Selain terdapat juga capaian pembelajaran bahwa peserta didik mampu menerbitkan tulisan hasil karyanya di media cetak maupun digital.

Dengan adanya capaian pembelajaran yang bertujuan untuk ekonomi kreatif diharapkan para siswa nantinya sudah terbiasa berpikir secara kreatif dan dapat membuka lapangan pekerjaan secara mandiri. Hal ini tentu saja berdampak baik bagi perekonomian Negara. Kurikulum yang disusun sudah memfasilitasi untuk tujuan ekonomi kreatif, nah tinggal bagaimana implementasinya di sekolah-sekolah. Apakah dapat mengembangkan berbagai skill yang dimiliki oleh siswa-siswinya atau tidak.

KURIKULUM MERDEKA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI ABAD 21

Rizky Widia Kardika

Pada abad ke-21, pendidikan Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dengan diterapkannya kurikulum merdeka dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Revolusi kurikulum merdeka telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di Indonesia. Artikel ini akan membahas tentang bagaimana revolusi kurikulum merdeka memberikan pengaruh besar terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia pada abad ke-21.

Pengenalan Kurikulum Merdeka

Kurikulum merdeka adalah pendekatan pendidikan yang diterapkan di Indonesia yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran dan mengatur belajar mereka sendiri dengan lebih mandiri. Kurikulum merdeka dirancang untuk memberikan siswa kebebasan dalam mengeksplorasi minat dan kemampuan mereka, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kreatif.

Penerapan Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia

Dalam penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, siswa memiliki kebebasan untuk memilih topik yang mereka ingin pelajari dan metode belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Hal ini memungkinkan siswa untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan dapat memperluas wawasan mereka dalam bidang Bahasa Indonesia.

Dalam kurikulum merdeka, siswa juga diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Melalui pembelajaran Bahasa Indonesia, siswa diajak untuk mengembangkan keterampilan menulis, membaca, berbicara, dan mendengarkan dalam Bahasa Indonesia dengan lebih baik. Dalam hal ini, siswa juga diharapkan dapat lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat dan ide mereka dalam Bahasa Indonesia.

Manfaat Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia

1. Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa

Salah satu manfaat utama dari kurikulum merdeka adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam kurikulum merdeka, siswa memiliki kebebasan untuk memilih topik yang mereka tertarik dan sesuai dengan minat mereka. Hal ini membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar dan dapat memperdalam pemahaman mereka dalam Bahasa Indonesia.

2. Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Indonesia

Dalam kurikulum merdeka, siswa memiliki kebebasan untuk memilih topik yang ingin mereka pelajari dan lebih memfokuskan diri pada aspek bahasa tertentu yang ingin mereka kuasai. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia siswa karena mereka lebih terfokus pada topik yang paling menarik bagi mereka.

3. Meningkatkan Kreativitas Siswa

Kurikulum merdeka memberikan kebebasan bagi siswa untuk memilih metode belajar yang paling cocok dengan diri mereka sendiri. Hal ini dapat membantu siswa menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mempelajari Bahasa Indonesia.

4. Menyediakan pengalaman belajar yang lebih menarik

Kurikulum merdeka dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik bagi siswa karena mereka memiliki kebebasan untuk memilih topik dan metode belajar mereka sendiri. Siswa dapat memilih topik yang lebih relevan dengan kehidupan mereka dan belajar dengan cara yang lebih menarik dan menantang.

5. Membantu mengembangkan keterampilan hidup

Dalam kurikulum merdeka, siswa memiliki kebebasan untuk memilih metode belajar yang paling cocok dengan diri mereka sendiri. Hal ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan hidup seperti kemandirian, inisiatif, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik.

Meskipun Kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan yang lebih kreatif dan adaptif dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para guru dan siswa dalam penerapannya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pelatihan dan sumber daya untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara efektif. Guru harus memahami dengan baik konsep dan tujuan dari Kurikulum Merdeka agar dapat mengembangkan materi pembelajaran yang relevan dan efektif untuk siswa. Sementara itu, siswa juga harus dilibatkan dalam proses pembelajaran dan diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan minat mereka dalam bahasa Indonesia.

Tantangan lainnya adalah adanya perbedaan dalam kondisi dan lingkungan belajar antara daerah yang berbeda di Indonesia. Beberapa daerah masih mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya, seperti akses terhadap teknologi dan buku-buku teks yang

relevan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman. Hal ini juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, dan masyarakat setempat.

MATA PELAJARAN BAHASA (DAN SASTRA) INDONESIA DALAM KURIKULUM MERDEKA

Hayatun Nufus

Sejak diluncurkan pada Februari 2022 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), kurikulum ini mulai diterapkan di sekolah-sekolah. Kurikulum ini menggantikan Kurikulum Prototipe yang merupakan penyederhanaan kurikulum 2013.

Seperti diketahui, pada masa Pandemi Covid 19, terjadi *learning loss* dalam dunia Pendidikan di Indonesia terutama mengenai literasi dan numerasi. Penyebab terjadinya *learning loss* adalah berubahnya pembelajaran tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). PJJ dilaksanakan dengan berbagai media seperti zoom, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, dan lain sebagainya. Masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan pembelajaran secara online karena beberapa faktor seperti jaringan internet yang belum memadai di pelosok Indonesia, tidak adanya perangkat untuk melakukan pembelajaran secara *online* seperti laptop ataupun gawai.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan

Nomor 008/KR/2022.

Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan:

1. Akhlak mulia dengan menggunakan bahasa Indonesia secara santun;
2. Sikap pengutamaan dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia;
3. Kemampuan berbahasa dengan berbagai teks multimodal (lisan, tulis, visual, audio, audiovisual) untuk berbagai tujuan (genre) dan konteks;
4. Kemampuan literasi (berbahasa, bersastra, dan bernalar kritis-kreatif) dalam belajar dan bekerja;
5. Kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang cakap, mandiri, bergotong royong, dan bertanggung jawab;
6. Kepedulian terhadap budaya lokal dan lingkungan sekitarnya; dan
7. Kepedulian untuk berkontribusi sebagai warga Indonesia dan dunia yang demokratis dan berkeadilan.

Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari oleh setiap jenjang Pendidikan. Mata pelajaran ini merupakan muatan wajib dalam kurikulum Pendidikan di Indonesia. Dalam Kurikulum Merdeka, keberhasilan pembelajaran diukur dengan Capaian Pembelajaran dan dicapai pada setiap Fase. Adapun fase-fase dalam Kurikulum Merdeka adalah fase A (kelas 1 dan 2), fase B (kelas 3 dan kelas 4), fase C (kelas 5 dan kelas 6), fase D (kelas 7,8, dan 9 SMP), fase E (kelas 10), dan fase F (kelas 11 dan kelas 12).

Perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka dikarenakan ketertinggalan literasi pelajar Indonesia. Literasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia terdapat pada elemen menyimak, membaca dan memirsra, menulis, berbicara, dan mempresentasikan. untuk berbagai tujuan berbasis genre yang terkait dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan. Berdasarkan

Keputusan Kepala BSKAP Nomor 008/KR/2022 Pengertian kemampuan berbahasa diuraikan sebagai berikut.

Elemen	Deskripsi
Menyimak	Berbicara adalah kemampuan peserta didik untuk menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk lisan dengan santun. Mempresentasikan merupakan kemampuan memaparkan gagasan atau tanggapan secara fasih, akurat, bertanggung jawab, mengajukan dan/atau menanggapi pertanyaan/pernyataan, dan/atau menyampaikan perasaan secara lisan sesuai konteks dengan cara yang komunikatif dan santun melalui beragam media (visual, digital, audio, dan audiovisual). Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam berbicara dan mempresentasikan di antaranya kepekaan terhadap bunyi bahasa, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa (tata bahasa), makna, dan metakognisi.
Membaca dan Memirsa	Membaca adalah kemampuan peserta didik untuk memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksi teks sesuai tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan potensinya. Memirsa merupakan kemampuan peserta didik untuk memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksi sajian cetak, visual dan/atau audiovisual sesuai tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan potensinya. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam

	membaca dan memirsa di antaranya kepekaan terhadap fonem, huruf, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa (tata bahasa), makna, dan metakognisi.
Berbicara dan Mempresen- tasikan	Berbicara adalah kemampuan peserta didik untuk menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk lisan dengan santun. Mempresentasikan merupakan kemampuan memaparkan gagasan atau tanggapan secara fasih, akurat, bertanggung jawab, mengajukan dan/atau menanggapi pertanyaan/pernyataan, dan/atau menyampaikan perasaan secara lisan sesuai konteks dengan cara yang komunikatif dan santun melalui beragam media (visual, digital, audio, dan audiovisual). Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam berbicara dan mempresentasikan di antaranya kepekaan terhadap bunyi bahasa, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa (tata bahasa), makna, dan metakognisi.
Menulis	Menulis adalah kemampuan menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk tulis secara fasih, akurat, bertanggung jawab, dan/atau menyampaikan perasaan sesuai konteks. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam menulis di antaranya penggunaan ejaan, kosakata, kalimat, paragraf, struktur bahasa, makna, dan metakognisi dalam beragam jenis teks.

Pada dasarnya ranah pembelajaran bahasa Indonesia untuk fase A sampai dengan fase F elemennya mencakup empat keterampilan berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.

Alokasi waktu mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kurikulum merdeka tidak sama dengan kurikulum 2013. Pada Kurikulum Merdeka alokasi waktu terdapat pengurangan waktu pembelajaran. Berikut perbandingan alokasi waktu kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka.

Jenjang	Kurikulum 2013						Fase	Kurikulum Merdeka	
	I	II	III	IV	V	VI		I	II
SD/MI	8	9	10	7	7	7	A (Kls 1-2) SD/MI	6	7
							B (kls 3-4) SD/MI	6	
							C (Kls 5-6) SD/MI	6	
SMP/MTs	6		6		6		D (kls1-3) SMP/Mts	5	
SMA/MA	4		4		4		E (kls X) SMA/MA	3	
							F(kls XI-XII) SMA/MA	3	

Berdasarkan tabel di atas, pada Kurikulum 2013 jumlah alokasi waktu (perminggu) pada jenjang Sekolah Dasar yaitu pada kelas 1 sebanyak 8 JP, kelas 2 yaitu 9 JP, kelas 3 yaitu 10 JP, kelas 4 yaitu 7 JP, kelas 5 yaitu 7 JP dan kelas 6 yaitu 7 JP. Untuk jenjang

SMP, pada kelas 1, 2, dan 3 yaitu 6 JP perminggu, jenjang SMA yaitu 4 JP.

Pada kurikulum Merdeka Belajar alokasi waktu untuk pembelajaran bahasa Indonesia mengalami pengurangan jumlah waktu, hal ini dapat dilihat pada tabel di atas. Pada fase A (kelas 1 yaitu 6JP, kelas 2 yaitu 7JP), fase B (kelas 3-4 yaitu 6JP tiap jenjang), fase C (kelas 5-6 yaitu 6JP, fase D (kelas 1,2,3 yaitu 5 JP tiap jenjang), fase E (kelas X yaitu 5 JP, dan fase F (kelas XI dan XII yaitu masing-masing 3 JP).

Berdasarkan data di atas, untuk jenjang SD atau fase A,B,C terdapat pengurangan waktu sebanyak 12 JP, jenjang SMP atau fase D terdapat pengurangan alokasi waktu sebanyak 3 JP, dan pada jenjang SMA atau fase E dan F terdapat pengurangan alokasi waktu sebanyak 3 JP. Jadi pada kurikulum Merdeka Belajar, alokasi waktu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk semua jenjang terdapat pengurangan jam pembelajaran.

Pengurangan alokasi waktu untuk mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada Kurikulum Merdeka menimbulkan sebuah pertanyaan, mengapa alokasi waktu pembelajaran Bahasa Indonesia lebih rendah dibandingkan pada Kurikulum 2013 padahal salah satu alasan perubahan kurikulum adalah karena ketertinggalan pembelajaran di Indonesia setara satu semester terutama bidang literasi dan “rumah” literasi itu adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia.

MENGEMBALIKAN PORSI SASTRA DALAM KURIKULUM MELALUI PROGRAM SASTRAWAN MASUK SEKOLAH

Qurrota Ayu Neina

Pengambilan kebijakan penetapan kurikulum baru senantiasa menuai pro dan kontra, meskipun penetapan ini sudah melalui proses uji publik. Setiap penetapan kurikulum yang baru akan memberikan corak tersendiri pada wajah pendidikan di negara kita. Yang pasti, penetapan kurikulum ini bertujuan mengubah pola dan muatan materi pembelajaran di kelas. Salah satu pola dan materi pembelajaran yang seringkali menjadi sorotan adalah kurangnya muatan sastra yang terangkum dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Keluhan dan kritikan tentang kurangnya konten sastra dalam kurikulum ini sering kali menjadi bahan diskusi bagi para praktisi sastra. Hal ini memperkuat bukti bahwa praktisi sastra tidak dilibatkan secara langsung dalam perumusan muatan kurikulum mata pelajaran bahasa Indonesia. Hal ini dapat juga disimpulkan bahwa muatannya lebih banyak mengutamakan aspek bahasa. Memang betul bahwa bahasa merupakan media untuk melahirkan sastra, tetapi, tidak semua teori bahasa dapat disepadankan dengan praktik sastra. Bahkan, dalam konteks pembelajaran holistik, akan lebih baik jika dilakukan pembelajaran bahasa berbasis (karya) sastra. Artinya, sastra sebagai modal dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bahkan bisa juga diterapkan ke mata pelajaran lain. Kritikan dari pakar sastra ini sebenarnya bisa menjadi dasar utama

untuk memecahkan persoalan pembelajaran bahasa dan sastra saat ini.

Jika dicermati, bermula dari penetapan Kurikulum 2013, kurikulum tersebut lebih menekankan pada pembentukan sikap/afektif. Dan aturan kembali ditetapkan pada kurikulum merdeka dengan memperkenalkan profil pelajar pancasila. Dalam proses pembentukan sikap ini, hanya aspek-aspek seni dan sastra yang mampu menjangkaunya. Sikap hanya akan terjangkau melalui seni matematika, seni kimia, seni fisika, dan seterusnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa aspek sastra menjadi sesuatu yang mutlak disuguhkan kepada generasi muda melalui pendidikan di kelas. Kehadiran kurikulum baru yang menuai pro dan kontra ini ternyata memberikan peluang tersendiri bagi konten sastra. Meskipun tidak semua (juga tidak mungkin untuk semua) konten pembelajaran bahasa Indonesia adalah sastra, tetapi peluang konten pembelajaran sastra memiliki ruang yang luas. Artinya, setiap kompetensi dasarnya sangat memungkinkan diajarkan dengan sastra sebagai dasarnya.

Menilik mengenai proses pembelajaran sastra ini, bisa dikatakan bahwa para siswa di sekolah hanya diajarkan secara teori saja. Padahal, nilai-nilai sastra baru dapat dimiliki secara holistik jika siswa mampu mempraktikkan dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mengherankan, memang para guru memiliki peran sebagai akdemisi, bukan praktisi. Sehingga pemahaman praktik dan pengamalannya pun tidak akan sedalam para praktisi, dan hal ini menjadi masalah baru dalam proses pengajaran sastra.

Problematika pengajaran sastra di sekolah adalah minimnya pengalaman guru dalam mencipta dan mengapresiasi karya sastra. Pembelajaran sastra selama ini hanya menggunakan karya sastra yang dimuat di media cetak (buku) dan karya sastra yang dipublikasikan melalui media elektronik seperti internet dan radio. Seharusnya, pembelajaran sastra dapat difokuskan pada pengakraban guru maupun siswa dengan karya sastra. Harapannya,

guru dan siswa tidak hanya dapat membaca teks sastra tetapi juga dapat mengkritik, mengkreasi teks, serta menyusun teks sastra.

Berkait dengan hal tersebut, pada tahun 2017, terdapat salah satu program yang diprakarsai oleh pusat pembinaan badan pengembang dan pembinaan bahasa untuk memaksimalkan pemahaman sastra bagi guru dan siswa, yaitu sastrawan masuk sekolah. Sastrawan masuk sekolah merupakan kegiatan yang mempertemukan sastrawan dengan guru dan siswa dalam rangka memberikan wawasan, pengetahuan, serta pengalaman dalam bersastra. Kegiatan itu merupakan bagian dari upaya mendorong literasi sastra dan membangun karakter bangsa melalui sastra. Materi yang disampaikan dalam kegiatan sastrawan masuk sekolah bergantung pada genre sastra yang ditentukan dan disesuaikan dengan genre yang digeluti oleh sastrawan yang menjadi narasumber. Selain itu, materi dapat disesuaikan dengan khazanah sastra daerah tempat dilaksanakannya kegiatan sastrawan masuk sekolah.

Pengalaman sastrawan dalam membuat karya sastra dapat menjadi motivasi bagi guru dan siswa dalam bersastra di sekolah. Sastrawan dapat langsung berinteraksi dengan guru dan siswa untuk berbagi pengalaman yang luar biasa tentang proses kreatifnya dalam membuat karya sastra. Sastrawan yang produktif berkarya biasanya memiliki tingkat sensibilitas atau kepekaan yang tinggi sehingga perasaan, pengalaman, dan imajinasi mereka berpadu mewarnai karya sastra yang mereka hasilkan. Dengan demikian, melalui kegiatan sastrawan masuk sekolah, guru maupun siswa diharapkan mendapatkan “ledakan pengalaman” yang membekas hingga mereka lebih mengenal budaya mengamati, menilai, dan menulis karya sastra.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya menumbuhkan minat guru dan siswa pada sastra, khususnya dalam hal apresiasi karya sastra, penguatan karakter dan jati diri bangsa dilakukan melalui aktivitas

kesastraan. Dalam aktivitas kesastraan tentu saja pihak sekolah tidak dapat melakukannya sendiri, Oleh karena itu, kegiatan sastrawan masuk sekolah dipandang penting dan strategis sebagai wadah peningkatan apresiasi sastra. Kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan nilai, sikap, dan kemampuan dasar untuk mengembangkan kepribadian yang utuh dan mandiri.

Apresiasi sastra melalui kegiatan sastrawan masuk sekolah diharapkan dapat menghasilkan pemahaman dan penghayatan nilai moral serta peningkatan kemampuan penalaran dan kreativitas sehingga akhirnya mampu menghayati, berkarya, atau menciptakan karya sastra yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Kegiatan ini tidak hanya akan menjembatani dunia pendidikan dan dunia sastra, tetapi juga meningkatkan keterlibatan peran sastra dalam membangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan serta meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pembinaan sastra, serta mendukung pembangunan karakter bangsa.

KEDUDUKAN PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DALAM KURIKULUM MERDEKA

Prasetyo Yuli Kurniawan

Kurikulum Merdeka adalah sebuah kurikulum yang diharapkan dapat memperkuat pendidikan karakter dan kebangsaan Indonesia. Di kurikulum ini, pembelajaran Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan nasional dan bahasa pengantar dalam proses pendidikan di Indonesia.

Pembelajaran Bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa tentang identitas nasional Indonesia yang tercermin dalam penggunaan Bahasa Indonesia. Selain itu, pembelajaran Bahasa Indonesia juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan.

Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka, siswa tidak hanya diajarkan tentang tata bahasa, tetapi juga tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam semua aspek kehidupan. Pembelajaran Bahasa Indonesia juga akan membahas tentang nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang diwujudkan dalam profil pelajar pancasila dan semangat kebhinekaan yang ditanamkan melalui Bahasa Indonesia juga akan ditekankan dalam pembelajaran. Melalui Bahasa Indonesia, siswa akan diajarkan untuk menghargai dan menghormati keragaman budaya, suku, dan agama yang ada di Indonesia.

Pembelajaran Bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka juga akan menekankan pentingnya pembinaan karakter siswa. Siswa akan diajarkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang positif, seperti integritas, tanggung jawab, kreativitas, kepemimpinan, dan kepedulian sosial melalui Bahasa Indonesia.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga akan dimasukkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka. Siswa akan diajarkan untuk menggunakan TIK untuk meningkatkan kemampuan berbahasa mereka, seperti dalam pembuatan blog atau video pendek.

Dengan demikian, pembelajaran Bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang cerdas, terampil, dan beretos kerja tinggi. Selain itu, pembelajaran Bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka juga dapat membantu menciptakan masyarakat yang mampu bersaing dalam era globalisasi.

Dengan penekanan pada pengembangan karakter dan penggunaan TIK, siswa akan siap untuk menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif dan kompleks. Mereka akan memiliki keterampilan berbahasa yang baik dan juga dilengkapi dengan nilai-nilai yang positif untuk mencapai kesuksesan dalam hidup.

Di samping itu, dengan mempertahankan dan memajukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kurikulum Merdeka juga turut memperkuat identitas bangsa Indonesia dan mengembangkan persatuan dan kesatuan nasional. Dengan memahami kekuatan penggunaan Bahasa Indonesia, siswa dapat menjadi duta bahasa yang mampu mempromosikan dan memelihara keberagaman dan kekayaan kultural dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum Merdeka juga mendorong siswa untuk menghargai dan memahami keberagaman bahasa dan budaya di Indonesia. Dalam pembelajaran, siswa akan diperkenalkan dengan berbagai ragam bahasa daerah, serta budaya dan kebiasaan yang ada di setiap wilayah di Indonesia.

Hal ini juga dapat membantu mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan memahami keberagaman

bahasa dan budaya, siswa dapat membantu memperkenalkan kekayaan dan keunikan Indonesia kepada dunia, sehingga dapat meningkatkan minat wisata dan investasi di Indonesia.

Berdasarkan fenomena tersebut bahwa kurikulum Merdeka memiliki banyak manfaat bagi siswa dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dengan memperkuat penggunaan Bahasa Indonesia dan memperkenalkan keberagaman bahasa dan budaya lokal, siswa menjadi lebih siap dalam menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif dan kompleks, serta memperkuat karakter dan identitas bangsa Indonesia.

MANAJEMEN KURIKULUM PADA MASA TRANSISI DARI PAUD KE SD PASCA PANDEMI

Mei Fita Asri Untari

Keputusan pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar sebagai akibatantisipasi penyebaran virus Covid-a9 berdampak besar bagi masyarakat. Era pendidikan pun mulai melakukan perbaikan dan berusaha membuka pembelajaran secara tatap muka atau offline pada tahun 2022. Masa transisi sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan jadwal pembelajaran mengeai jumlah hari dalam semiggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh satuan pendidkkan dengan tetap memperhatikan kondisi Kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.

Peserta didik sangat antusias dan senang sekali dengan adanya pembelajaran tatap muka. Banyak peserta didik yang terobati rasa rindunya dengan adanya pembelajaran tatap muka walaupun harus menjaga jarak dengan yang lain. Jika siswa yang masih duduk di bangku sekolah yang sama hal ini tidak menjadi masalah. Akan tetapi, siswa yang berpindah ke jenjang selanjutnya merupakan tantangan yang luar biasa. Hal ini terutama dirasakan oleh siswa yang berasal dari TK/PAUD ke jenjang SD. Lalu bagaimanakah menyikapi masa transisi ini?

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi telah mengeluarkan kebijakan dan program baru yang diberi nama Gerakan transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan, yaitu Gerakan bersama yang mendasari transisi peserta didik PAUD ke

SD/MI/ sederajat dengan cara yang menyenangkan dan dimulai sejak tahun ajaran baru. Gerakan ini berawal dari adanya miskonsepsi yang berkembang di masyarakat, yaitu (1) kemampuan yang dibangun pada anak di PAUD sangat berfokus pada calistung, (2) kemampuan calistung dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar dan dibangun secara instan, dan (3) tes calistung masih diterapkan sebagai syarat masuk SD/MI. Praktik di lapangan/ masyarakat tidak sedikit PAUD yang kebingungan karena tuntutan dari orang tua tentang kemampuan anaknya yang diajarkan di sekolah. kebingungan PAUD ini adalah untuk mendapatkan kepercayaan orang tua dan sekolah sekitar dengan harapan anak bisa membaca menulis sebelum masuk SD. Tidak sedikit orang tua yang ingin anaknya bisa calistung sebelum SD dengan cara drilling. Pendidik SD pun menilai tes calistung karena ingin memudahkannya dalam melakukan pembelajaran yang lebih menggunakan buku teks dengan tulisan atau tidak sesuai dengan karakteristik anak usia dini.

Padahal membangun kemampuan anak perlu dilakukan secara bertahap dan dalam cara yang menyenangkan agar manfaat baik dari pembelajaran tercapai. Pada masa transisi ini anak harus dibangun kemampuan fondasinya sebagai hak setiap anak. Pembangunan fondasi dasar anak yang dimaksud adalah (1) anak merasa senang dalam belajar, (2) anak percaya bahwa dirinya pasti bisa asalkan mau berusaha, (3) anak mampu mengelola emosi dan menghargai orang lain, (4) anak dapat merawat diri dan barang-barang yang menjadi tanggung jawab diri, (5) anak paham kata dan keterkaitannya dengan huruf serta bunyinya, (6) anak mampu menyimak dan dapat mengutarakan gagasan sederhana, dan (7) anak paham tentang konsep penjumlahan melalui objek bukan melalui bilangan atau menghafal.

Berdasarkan Konsensus International (UNESCO), perkembangan otak yang luar biasa pada periode sejak lahir hingga delapan tahun berada dalam satu fase yang sama dan mengalami perkembangan motorik, sosial-emosional, kognitif, dan bahasa yang sangat pesat. Dengan demikian, kegiatan PAUD perlu dipastikan

untuk mengembangkan kemamouan anak yang holistik dan berkualitas dengan memberikan pedagogi yang sesuai usia dan konteks anak secara bertahap agar dapat mengantarkan anak untuk mengembangkan keterampilan pondasi yang diperlukan di Sekolah Dasar hingga kelas 2 SD.

Mengapa perlu penguatan transisi Paud-SD?

Transisi PAUD-SD adalah penyelarasan pembelajaran PAUD-SD yang bertujuan agar peserta didik PAUD tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian saat berpindah menjadi peserta didik SD, serta agar peserta didik SD yang tidak pernah mengikuti PAUD, tetap dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi. Masih banyak praktik PPDB serta pembelajaran yang belum mencerminkan pemahaman bahwa membangun kemampuan fondasi (kematangan sosial emosional, kemampuan literasi dan numerasi dasar, serta kemampuan fondasi lainnya) merupakan suati proses bertahap dan berkelanjutan yang dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal.

Setiap anak harus mendapatkan fase fondasi secara maksimal. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Langkah yang dapat dilakukan oleh guru, pemerintah, dan orang tu adalah dengan menyesuaikan kurikulum yang berlaku. Terutama ketika pada masa pandemi kemarin banyak anak yang tidak mendapatkan pembelajaran yang sesuai karena guru hanya memberikan penugasan di rumah. Maka pada masa pascapandemi ini sekolah perlu memikirkan masa transisi yang menyenangkan bagi siswa PAUD menuju SD. Transisi PAUD-SD merupakan proses perpindahan peran anak sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan belajar baru. Kesiapan bersekolah harus berangkat dari tujuan pembelajaran, yaitu memastikan terpenuhinya hak anak.

Aspek Kemampuan Fondasi Anak

Membangun kemampuan fondasi merupakan bentuk pengenalan pertama anak terhadap nilai-nilai baik yang dimiliki dan

tertuang dalam Profil Pelajar Pancasila. Kemampuan fondasi ini dapat dibina menggunakan struktur kurikulum PAUD maupun SD, sehingga secara sistemik menjadi bagian dari pembelajaran dan pembiasaan di satuan PAUD maupun SD. Aspek kemampuan fondasi anak sesuai dengan Kemdukbud (2022) antara lain: (1) mengenal nilai agama dan budi pekerti, (2) keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya, (3) kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar, (4) pemaknaan terhadap belajar yang positif, (5) pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri, dan (6) kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar, seperti kepemilikan dasar literasi, numerasi serta hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Perubahan pembelajaran di PAUD dan SD sesuai yang tertuang dalam Kemdikbud (2022) adalah (1) kemampuan baca tulis hitung merupakan bagian dari kemampuan literasi numerasi yang dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal. Kemampuan fondasi yang dibangun di PAUD antara lain adalah dasar-dasar literasi dan numerasi. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah: (a) Lingkup kemampuan literasi lebih luas dari hanya baca tulis. (b) Kemampuan dibangun dengan cara yang tepat melalui kegiatan yang menyenangkan dan bermakna. (c) lingkup kemampuan numerasi lebih luas dari hanya berhitung. (d) tidak menjadikan baca tulis hitung sebagai dasar penerimaan atau kelulusan peserta didik. (2) Siswa kelas 1 SD yang tidak pernah mengikuti PAUD, berhak mendapatkan pembinaan fondasi. (3) keselarasan pembelajaran PAUD dan SD kelas awal untuk memastikan setiap anak mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi, membangun sikap terhadap belajar yang positif, dan memastikan adanya penahanan dalam membangun kemampuan fondasi.

Membangun Fondasi Anak melalui Buku Cerita

Untuk mendukung pengoptimalan pembangunan fondasi tersebut tentunya banyak pihak yang harus berperan, salah satunya adakah orang tua/wali murid. Orang tua perlu memahami bahwa agar anak dapat melakukan baca tulis hitung, diperlukan membangun kemampuan prasyarat dan tidak hanya melalui pengenalan keaksaraan atau bilangan. Orang tua perlu memahami bahwa ada enam aspek kemampuan fondasi yang sangat penting untuk dibangun. Orang tua juga tidak melabelkan anak berdasarkan capaiannya karena setiap anak memiliki laju perkembangan dan kesempatan belajar yang berbeda dan memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi.

Kegiatan pengenalan keaksaraan dan pembiasaan perilaku yang baik dalam membangun enam aspek kemampuan fondasi tersebut orang tua dapat menggunakan media buku cerita anak. Buku cerita dapat berupa buku bergambar, buku cerita rakyat, buku dongeng, atau buku fabel. Manfaat buku sangat besar dalam perkembangan kemampuan anak. Melalui buku cerita orang tua dapat membacakan cerita yang ada di dalamnya, melakukan tanya jawab mengenai isi buku, memantik imajinasi anak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan buku cerita tersebut. Orang tua dapat juga menari buku cerita yang berisi tentang perilaku yang ingin dikenalkan kepada anak. Langkah selanjutnya orang tua dan anak dapat berdiskusi tentang warna, huruf, angka, gambar dalam buku tersebut. Kemudian anak dapat diminta untuk menceritakan kembali isi cerita tersebut dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari untuk mengasah kepekaan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.

KURIKULUM *COPAS* UNTUK (MIMPI) PENDIDIKAN YANG HEBAT

Zainal Arifin

Tentu saja jawabnya tidak mungkin. Menteri adalah jabatan politis. Jabatan yang bisa diduduki siapa saja. Baik yang paham dunia pendidikan. Atau orang yang sama sekali tidak berlatar dunia pendidikan. Kementerian pendidikan ini bersifat unik, tidak seperti kementerian lain yang hanya sekadar menjalankan manajemen pemerintahan. Sekadar menjalankan kebijakan layanan atau menyalurkan program yang cenderung menetap tiap tahunnya.

Kemendikbud berbeda. Kementerian ini berkaitan langsung dengan masalah kebijakan yang harus selalu maju dan kompetitif. Tidak boleh ada kebijakan pendidikan yang mundur atau kebijakan

Albert Einstein pernah mengatakan, orang yang sama dengan tindakan yang sama tapi mengharap hasil yang berbeda adalah kegilaan. Pesan itu sangat tepat untuk membicarakan pendidikan Indonesia saat ini. Orang-orang bekerja di Kemendikbud sama, program-programnya juga serupa, sedang satu-satunya yang berbeda adalah wajah menterinya. Menteri jadi faktor X yang setidaknya membuka peluang terjadinya perubahan. Mungkinkah?

yang dijalankan untuk memundurkan kualitas pendidikan. Kementerian ini harus punya pikiran “growth up”, berkesinambungan, harus meningkat pencapaiannya, dan terus kompetitif dengan bangsa lain pada tiap tahunnya.

Dengan demikian, semestinya kebijakan-kebijakan pendidikan yang brilian itu datang dari punggawa-punggawa yang ada di kementerian. Tajam tidaknya teronbosan merekan akan sangat menentukan bagaimana kualitas pendidikan Indonesia. *Lho* bukannya menteri yang mengubah? Mana ada menteri yang menguasai segala tentang pendidikan. Ahli pendidikan pun tidak mungkin menguasai semua perkara pendidikan, tetap saja yang menyodorkan program adalah para punggawa-punggawa Kemendikbud.

Menteri hanya tinggal tanya-tanya, sekiranya “bagus” dan “aman” pasti akan dijalankan. Apalagi ada indikator lain kesuksesan dari kepemimpinan seorang Menteri, bukan hanya kesuksesan program-program yang dijalankan kementerian saja, tapi juga masalah kesuksesan dalam keterserapan anggaran. Oleh karena itulah, dengan berjubelnya beban yang ditanggung menteri, punggawa-punggawa di kementerianlah yang tetap menentukan kebanyakan kebijakan-kebijakannya.

Yang patut disesalkan, banyak program kementerian yang dirancang secara copas dari program-program sebelumnya. Tidak hanya satu dua program kementerian yang *copas* ini. Salah satu program *copas* adalah kebijakan pelibatan mahasiswa untuk mengajar di daerah terpencil. Program kementerian ini sudah muncul dengan nama yang berbeda-beda, awalnya bernama Indonesia Mengajar. Indonesia mengajar diterapkan oleh Mendikbud Anies Baswedan dengan mengadopsi kebijakan Prof. Koesnadi Hardjasoemantri, Rektor UGM era 1950-an untuk menerjunkan mahasiswa menjadi guru SMA di luar Jawa. Program Kampus Mengajar kini diadopsi menjadi Program Kampus Mengajar.

Program lain yang *copas* adalah program beasiswa yang hanya diubah nama-namanya saja. Awalnya ada beasiswa kuliah gratis yang dulu bernama Bidikmisi, kini diganti nama dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Ada pula program pembinaan guru-guru yang

dulu dinamakan “Guru Cikal” yang kini berubah nama menjadi “Guru Penggerak”. Program-program yang *ajeg* tentu saja ada peran punggawa-punggawa kementerian. Ganti menteri juga itu-itu saja programnya. Jadi, pihak yang memiliki pengaruh besar dalam perubahan pendidikan di Indonesia sebenarnya adalah punggawa-punggawa kementerian, bukanlah menterinya.

Bila menteri pun membangun kerangka kebijakan berdasarkan modal kebijakan yang diajukan para punggawa Kemendikbud, maka genap sudah apa yang dikatakan Einstein; kementeriannya sama, punggawanya sama, programnya sama, dan program menterinya juga sama, mengharapkan hasil yang berbeda (pendidikan jadi mumpuni, tinggi dalam peringkat PISA) adalah sebuah kegilaan. Bangsa ini benar-benar gila.

Harapan gila bangsa Indonesia untuk memiliki pendidikan yang mumpuni sebenarnya masih bisa diraih seumpama saja sebuah lembaga yang melakukan pengawasan bekerja sebaik-baiknya. Lembaga itu adalah Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek (Irjen Kemendikbudristek). Irjen semestinya melakukan pengawasan secara lebih detil terhadap kebijakan dan program-program copas di kementerian. Masalah *copas* program seperti ini bisa timbul karena kementeriannya memang jadi kementerian yang terbaik sehingga program baiknya bisa terus dilakukan atau Irjen-nya saja yang memang tidak bekerja secara optimal. Irjen ini memegang peranan penting, tidak hanya mengawasi pelanggaran, hal-hal yang janggal seperti program yang hanya diubah nama seperti ini mestinya patut menjadi catatan.

Cara lain untuk mendapatkan angin segar dalam dunia pendidikan adalah memberikan beban khusus pada punggawa-punggawa kementerian dengan kontrak jabatan yang jelas. Setiap jabatan dari yang paling rendah ataupun yang paling tinggi, diberikan kebebasan mengajukan program inovatif masing-masing dengan perjanjian, bila dalam waktu 100 hari kerja tidak mampu mencapai target langsung diganti. Kebijakan seperti inilah yang bisa membuat kementerian bisa “growth up” setiap waktu. ***

PROJECT BASED LEARNING, INOVASI MODEL PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR

Uki Hares Yulianti

Kurikulum merdeka belajar sebagai jawaban dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 dimana siswa dituntut memiliki keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, kreatif dan inovatif, serta terampil dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. Pada kurikulum merdeka belajar salah satu konsepnya adalah menuntut kemandirian bagi siswa. Kemandirian memiliki arti siswa bebas mengakses ilmu dari mana saja, baik dari pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Hal inilah yang menuntut kekreatifan baik pada guru maupun siswa.

Pembelajaran berbasis *project based learning*, guru disini sebagai fasilitator dan yang menjadi pusat pembelajaran adalah siswa itu sendiri (*student-centered learning*). *Project Based Learning* dilaksanakan karena dilatarbelakangi masalah yang mengharuskan siswa mengerjakan suatu project. Pada pengerjaan project akan membuat siswa mengalami berbagai kendala kontekstual sehingga harus melakukan investigasi dan pemecahan masalah untuk dapat menyelesaikan masalah sehingga dapat mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Pembelajaran berbasis *Project-based learning (PjBL)* juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat melakukan proyek yang diselesaikan secara berkelompok sebagai bentuk penguatan karakter. *Project-based learning* ini juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dari segi kognitif, keterampilan bekerja sama

dalam kelompok, motivasi belajar, kerja tim, serta kreatifitas siswa. Pembelajaran berbasis *Project Based Learning* juga menstimulus keterampilan siswa sehingga setiap proyek yang dihasilkan siswa meningkatkan pemahaman konseptual dan sekaligus menjawab persoalan isu-isu penting lainnya. Hal ini sejalan dengan adanya perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka menjadikan pembelajaran berbasis proyek sebagai karakter utama kurikulum merdeka dan dengan pembelajaran berbasis proyek siswa akan memiliki kemampuan serta kesiapan bersekolah di jenjang selanjutnya. Penilaian perkembangan siswa pada *project based learning* dilakukan dengan pengamatan kegiatan dan hasil project yang dirancang oleh pendidik.

Salah satu upaya melahirkan Profil Pelajar Pancasila di satuan pendidikan adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran *project based learning*. Dalam mewujudkan paradigma pembelajaran berbasis proyek terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: (1) Perencanaan proyek (*design a plan for the project*); (2) Buat jadwal kegiatan (*create a schedule*); (3) Mengelola proyek (memantau siswa dan kemajuan proyek); (4) Evaluasi produk akhir (menilai hasil); (5) Evaluasi produk terjadi ketika setiap kelompok menyerahkan barang-barang mereka secara bergiliran ke kelompok lain; dan (6) Asessment (mengevaluasi pengalaman).

Pembelajaran berbasis *project based learning* bisa dilakukan dari pengalaman belajar siswa antara lain diminta untuk peduli terhadap masalah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan kepekaan lingkungan, belajar mencari pertanyaan-pertanyaan vital, dan siswa berlatih berpikir logis, kritis, dan kreatif (Tohir, 2020). Detail, yang memerlukan pemikiran tentang spesifik pekerjaan yang akan dilakukan, pemikiran asosiatif, yang memerlukan menghubungkan satu bagian dari pekerjaan ke yang lain, berpikir tentang urutan waktu, dan mengembangkan kemampuan untuk membagi tugas. Salah satu ide *project based learning* yang bisa diterapkan para guru misalnya mengajak siswa mengeksplorasi

solusi untuk membujuk orang-orang yang merokok di tempat umum agar menggunakan tempat yang disediakan.

Kurikulum Merdeka membantu membuat pengajaran menjadi lebih aplikatif dan interaktif. Penerapan *Project Based Learning* memperkuat Kurikulum Merdeka dengan adanya tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok.

BAB 5

MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA

BENAHI KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA MELALUI PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA YANG LAYAK DAN MEMADAI

Prabawati Nurhabibah

Pendidikan adalah sistem yang paling berpengaruh sebagai upaya untuk mencerdaskan bangsa. Keberhasilan atau kegagalan suatu proses pendidikan antara lain dipengaruhi oleh kemampuan manajemen, sarana dan prasarana yang memadai, sumber daya orang-orang yang ahli dan terampil untuk melaksanakan proses belajar mengajar di institusi pendidikan. Salah satu aspek penunjang yang seharusnya mendapat perhatian mendasar yaitu mengenai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan secara umum mencakup semua fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan, seperti: Gedung atau bangunan, ruang kelas, alat-alat dan media pendidikan, kursi, meja, papan tulis, dan sebagainya. Sedangkan prasarana merupakan penunjang dari keberlangsungan proses pendidikan, diantaranya: akses jalan menuju sekolah, taman, halaman, dan lain sebagainya.

Salah satu kualitas lembaga pendidikan juga dapat dilihat dari kelengkapan fasilitas infrastruktur yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Jika sarana dan prasarana memadai maka hasilnya juga akan baik. Buktinya adalah adanya laboratorium di fasilitas tersebut pendidikan membantu siswa menjadi mahir dalam mengetik, menggunakan komputer, dan seterusnya. Meskipun lembaga pendidikan belum memiliki fasilitas tersebut, mereka kurang

memiliki kemampuan dan beberapa bahkan tidak pernah tahu apa-apa komputer. Artinya sarana dan prasarana berpengaruh terhadap kualitas dan keberhasilan peserta pendidikan.

Sarana dan prasarana yang layak dan memadai merupakan aspek penting dalam menunjang kualitas pendidikan. Sarana dan prasarana yang memadai dapat memberikan lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk belajar dan berkembang. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat siswa untuk belajar serta meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Beberapa sarana dan prasarana yang harus dipenuhi di sekolah-sekolah adalah ruang kelas yang memadai, laboratorium, perpustakaan, ruang olahraga, dan toilet yang bersih dan layak.

Selain itu, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Misalnya, dengan adanya laboratorium yang memadai, siswa dapat melakukan eksperimen dan praktikum secara langsung, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman siswa. Hal ini juga dapat membantu siswa untuk memahami konsep-konsep yang lebih abstrak dan kompleks. Selain itu, adanya perpustakaan yang memadai dapat membantu meningkatkan minat baca siswa dan memperkaya pengetahuan mereka.

Namun, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai tidak mudah dilakukan, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah. Pemerintah dapat memberikan insentif atau kemudahan dalam bentuk perizinan dan regulasi untuk menarik minat swasta untuk berinvestasi di sektor pendidikan. Selain itu, masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan sumbangan atau donasi untuk membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana di sekolah-sekolah.

Dalam jangka panjang, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai dapat membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang berkualitas dapat membuka peluang kerja yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, pendidikan yang berkualitas juga dapat membantu negara dalam meningkatkan daya saing dan mencapai kemajuan ekonomi yang lebih baik.

Kesimpulannya, pengadaan sarana dan prasarana yang layak dan memadai di sekolah-sekolah merupakan upaya penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan minat belajar dari para peserta didik.

PEMBELAJARAN BERBASIS DIGITAL

: Peluang dan Tantangan

Hetilanar

Terjadinya pandemi covid 19 mengubah tatanan dunia pendidikan khususnya sarana dan prasarana yang dimanfaatkan pada satuan pendidikan. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat semua warga sekolah harus mampu menggunakan berbagai media teknologi. Penggunaan media pembelajaran berbasis IT pun menjadi bagian dari proses pembelajaran. Semula para guru kesulitan untuk menggunakan media berbasis digital, kini sudah mulai menjadi sebuah kebutuhan dalam mengajar. Munculnya ide-ide kreatif dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan memanfaatkan media digital.

Pembelajaran melalui media digital akan meningkatkan dan membantu siswa memperoleh kecakapan dalam pembelajaran. Pembelajaran digital dapat membantu siswa belajar dengan cara yang lebih beragam, luas, dan bermakna. Materi pembelajaran kini lebih bervariasi, dapat dipelajari melalui teks, gambar, suara dan video. Dunia pendidikan di Indonesia memiliki peluang untuk maju di era digital, namun untuk memanfaatkan peluang tersebut seseorang harus mempersiapkan diri sesegera mungkin. Persyaratan tersebut mencakup berbagai faktor, antara lain infrastruktur, kebijakan, sumber daya manusia, lembaga pendidikan, biaya, serta kesiapan masyarakat dan peserta

didik untuk menyeimbangkan digitalisasi pendidikan secara adil dan efisien dengan tetap terjangkau.

Proses belajar mengajar siswa akan difasilitasi dengan digitalisasi karena siswa dapat mengakses bahan pelajaran atau sumber pengajaran dalam satu jaringan. Ada banyak kesempatan belajar yang tersedia melalui teknologi digital karena memberi guru dan siswa akses ke pengetahuan yang lebih luas. Namun demikian, ada juga masalah lain dengan pembelajaran digital, seperti bagaimana hal itu dapat menyebabkan para siswa kecanduan teknologi atau kehilangan perhatian. Masalah lainnya adalah karena semua yang ada di internet tersedia secara gratis, memfilter konten yang tidak diinginkan dapat menjadi sebuah tantangan dalam pembelajaran. Seseorang harus memiliki pengetahuan tentang penggunaan teknologi karena lanskap pendidikan menjadi semakin dinamis.

Jika metode pembelajaran yang benar dan tepat digunakan, pembelajaran digital dapat dilakukan dengan lebih berhasil dan menawarkan keunggulan dibandingkan pembelajaran tatap muka. Selain itu, pembelajaran digital telah digunakan untuk mengembangkan pembelajaran tatap muka secara fisik. Interior pembelajaran digital Meskipun lokasinya asing dan jauh, siswa masih dapat mengakses sumber daya atau media yang memungkinkan mereka meninjau konten dan berkomunikasi dengan siswa lain. Dalam hal ini, media memiliki potensi yang sangat besar, alat atau media seperti komputer dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran. Berbeda dengan pembelajaran tatap muka memiliki beberapa kendala yaitu waktu, sistem pembelajaran ini menggunakan media tambahan untuk melibatkan siswa dalam peran aktif dan terlibat. Tuntutan di seluruh dunia menuntut sektor pendidikan untuk secara konstan dan terus-menerus mengadaptasi kemajuan teknologi untuk upaya meningkatkan standar pendidikan, terutama melalui modifikasi cara penggunaannya di sektor tersebut, khususnya selama proses pembelajaran.

Dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, mendokumentasikan, memproses, dan mendistribusikan kembali bahan ajar sebagaimana diperlukan, teknologi digital juga dapat membantu mengubah perilaku manusia, termasuk perilaku siswa dan pendidik. Teknologi digital dapat membuat proses penggabungan bahan ajar menjadi lebih menarik dan memotivasi karena menggabungkan audio, video, animasi, dan media lain selain hanya teks, yang memungkinkan untuk menggabungkan bahan ajar lebih kreatif dan menarik. Hal ini dapat membantu perubahan perilaku belajar menjadi lebih baik. Pada kenyataannya, teknologi pembelajaran akan terus maju mengikuti perkembangan zaman. Bahkan dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan antara guru dan siswa, pemanfaatan kemajuan teknologi dalam bidang pendidikan, seperti yang sering dilakukan oleh para pendidik, khususnya mengintegrasikan perangkat teknologi dalam proses pembelajaran. Namun demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak positif dengan semakin terbuka dan menyebarnya informasi dan ilmu pengetahuan dari dan ke seluruh penjuru dunia, menembus batas ruang dan waktu. Akan tetapi, teknologi tidak hanya akan membawa manfaat positif, tetapi juga dapat membawa dampak negatif.

Siswa yang menggunakan alat dan teknologi pembelajaran digital menjadi lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan lebih tertarik untuk memperluas basis pengetahuan mereka. Para siswa bahkan mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang belajar secara aktif karena mereka belajar melalui teknik yang menarik seperti bercerita, pendidikan teman sebaya, kerja tim, pemecahan masalah, dan pengajaran terbalik. Pembelajaran digital menawarkan konteks yang lebih kaya, rasa perspektif yang lebih besar, dan kegiatan yang lebih menarik daripada pendekatan pendidikan konvensional karena jauh lebih partisipatif dan mudah diingat daripada menggunakan buku teks yang panjang. Sedangkan yang menjadi tantangan dalam pembelajaran berbasis digital yaitu

siswa menjadi ketergantungan dengan pemanfaatan teknologi, kurangnya interkasi antara guru dan kurangnya pengawasandalam belajar. Bergantung pada kemampuan siswa, materi sistem pembelajaran digital direaksikan pada berbagai tingkat pemahaman. Beberapa siswa dapat mengambil informasi lebih cepat hanya dengan membacanya, sementara yang lain membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami sepenuhnya. Selain itu, beberapa siswa memerlukan bantuan orang lain untuk memahami mata pelajaran yang telah diajarkan. Namun itulah tantangan yang ada dalam pembelajaran digital yang perlu dihadapi para guru di sekolah.

Kecakapan guru dalam memetakan kemampuan dan kebutuhan siswanya menjadi suatu keterampilan yang harus dimiliki guru. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda dan memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda pula. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki peran penting dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas.

LABORATORIUM BAHASA, PENTINGKAH?

Meina Febriani

Pada era globalisasi saat ini, kemampuan berbahasa dengan baik dan benar menjadi makin penting bagi peserta didik untuk menghadapi tantangan masa depan. Penguasaan bahasa baik bahasa Indonesia, asing, maupun daerah menjadi kunci penting dalam persaingan global dan merupakan salah satu keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Salah satu sarana yang dapat membantu meningkatkan kemampuan berbahasa bagi peserta didik adalah laboratorium bahasa di sekolah.

Namun mirisnya, peran penting laboratorium bahasa yang belum banyak disadari dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana di sekolah. Sebagian besar masih menganggap bahwa laboratorium hanya identik dengan laboratorium IPA. Hal ini menyebabkan beberapa sekolah tidak memprioritaskan pengembangan laboratorium bahasa dan bahkan mengabaikannya dalam program pendidikan mereka. Padahal, eksistensi laboratorium bahasa sebagai daya dukung kompetensi berbahasa juga merupakan hal yang urgen untuk diprioritaskan.

Bagaimana konsep laboratorium bahasa? Laboratorium bahasa merupakan fasilitas yang dirancang khusus untuk mendukung proses pembelajaran bahasa di sekolah. Salah satu alasan mengapa laboratorium bahasa di sekolah menjadi sangat penting karena dapat menjadi tempat yang ideal bagi peserta didik untuk berlatih menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Laboratorium bahasa harus dilengkapi dengan peralatan yang

memadai seperti komputer, perangkat lunak pendukung, dan peralatan audio visual untuk mempermudah proses pembelajaran bahasa. Fasilitas audio visual yang ada di laboratorium bahasa juga dapat membantu peserta didik untuk memahami intonasi, aksen, dan nuansa dalam berbahasa yang merupakan hal yang sulit untuk dipelajari hanya dari buku-buku teks.

Kondisi Laboratorium Bahasa

Menurut pendataan Kemendikbudristek, pada tahun 2020 hanya 37% dari seluruh sekolah di Indonesia yang memiliki fasilitas laboratorium bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak sekolah di Indonesia yang belum dilengkapi dengan fasilitas laboratorium bahasa yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Senada dengan hal tersebut, Indriyanto (2021) juga menegaskan bahwa permasalahan utama laboratorium bahasa di Indonesia yakni keberadaannya yang masih cukup langka sehingga tidak semua peserta didik dapat mengaksesnya. Selain itu, sebagian besar fasilitas yang ada di laboratorium bahasa sudah tua dan kurang terawat dengan baik sehingga tidak lagi dapat digunakan dengan optimal.

Selain problematika fasilitas dan teknologi, ganjalan lain yang dialami oleh laboratorium bahasa di Indonesia adalah kualitas pengajaran yang belum optimal. Beberapa guru bahasa masih kurang terlatih dalam penggunaan perangkat lunak dan peralatan laboratorium bahasa, sehingga pengajaran yang diberikan kurang efektif. Hal tersebut juga diperkuat oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur, Masduki. Ia mengatakan, "Tidak semua guru bahasa memiliki keterampilan dalam penggunaan teknologi dan fasilitas laboratorium bahasa. Hal ini membuat pengajaran yang diberikan masih kurang efektif dan tidak dapat memenuhi kebutuhan peserta didik."

Masalah berikutnya yakni beberapa laboratorium bahasa di Indonesia mungkin tidak memenuhi persyaratan infrastruktur yang diperlukan untuk lingkungan belajar yang ideal, seperti pencahayaan,

ventilasi, atau kebersihan yang memadai. Hal tersebut ditengarai oleh beberapa pihak karena kurangnya dana pendidikan yang diterima di setiap sekolah. Pendidikan di Indonesia dianggap masih terbatas oleh anggaran yang minim sehingga banyak sekolah yang kesulitan untuk membangun atau memperbarui laboratorium bahasa. Hal ini menyebabkan banyak laboratorium bahasa yang tidak memiliki peralatan yang cukup atau kondisi yang tidak memadai.

Perlu Strategi

Bagaimanakah laboratorium bahasa yang baik? Menilik hal tersebut, kriteria laboratorium bahasa yang baik dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain fasilitas dan peralatan, kualitas pengajaran, serta dukungan dari pihak sekolah dan guru. Laboratorium bahasa yang baik harus dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas yang memadai seperti komputer, proyektor, layar, serta perangkat lunak terkini yang mendukung proses pembelajaran bahasa. Kualitas pengajaran menjadi faktor penting, guru yang terlatih dan mahir dalam penggunaan fasilitas dan teknologi laboratorium bahasa akan dapat memberikan pengajaran yang lebih efektif. Dukungan dari pihak sekolah dan guru juga menjadi faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas laboratorium bahasa.

Setiap sekolah harus memiliki rencana strategis yang jelas dan terstruktur untuk membangun dan mengelola laboratorium bahasa. Rencana ini harus meliputi perencanaan anggaran, pemilihan peralatan dan teknologi terbaru, dan strategi pengembangan staf pengajar yang terampil dalam penggunaan fasilitas laboratorium bahasa.

Perencanaan anggaran pengadaan laboratorium sekolah harus dilakukan dengan matang yang meliputi identifikasi kebutuhan laboratorium, rencanakan anggaran, mencari sumber dana, menentukan prioritas, serta monitoring dan evaluasi. Pemilihan peralatan dan teknologi yang tepat juga merupakan kunci untuk

mengoperasikan laboratorium bahasa yang efektif. Dalam hal ini, sekolah harus memilih peralatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan teknologi yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran bahasa asing seperti komputer, proyektor, speaker, mikrofon, dan perangkat lunak pembelajaran bahasa.

Berikutnya, pihak sekolah perlu memilih staf pengajar yang terampil. Guru yang terampil dan terlatih dalam penggunaan fasilitas laboratorium bahasa sangat penting untuk memastikan keberhasilan laboratorium bahasa di sekolah.

Hal yang tidak kalah penting yakni menerapkan kurikulum terintegrasi. Untuk mencapai hasil yang maksimal, laboratorium bahasa harus diterapkan secara terintegrasi dengan kurikulum bahasa asing di sekolah. Dalam hal ini, guru harus merencanakan kegiatan dan materi yang sesuai dengan tingkat keterampilan bahasa peserta didik, serta menggunakan sumber daya dan peralatan laboratorium bahasa yang ada untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta didik.

Mendorong partisipasi peserta didik juga merupakan hal yang tidak boleh ditinggalkan. Laboratorium bahasa harus menjadi tempat yang menyenangkan dan menarik bagi peserta didik untuk belajar bahasa asing. Untuk mencapai hal ini, sekolah harus mendorong partisipasi peserta didik dalam kegiatan laboratorium bahasa dengan menyediakan kegiatan yang menarik dan menghibur.

Terakhir, evaluasi dan perbaikan. Evaluasi berkala terhadap laboratorium bahasa sangat penting untuk memastikan bahwa laboratorium bahasa tetap memenuhi kebutuhan peserta didik dan mencapai tujuannya. Sekolah harus memonitor dan mengevaluasi kinerja laboratorium bahasa dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, sekolah dapat memastikan penyelenggaraan laboratorium bahasa yang efektif dan efisien untuk membantu peserta didik mempelajari bahasa dengan mudah dan menyenangkan.

MINIMNYA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI KAWASAN PERBATASAN

Imaniah Kusuma Rahayu

Sebuah forum pendidikan adalah wadah untuk membentuk generasi yang berkualitas. menggunakan itu diperlukan mampu membentuk pendidikan yang berkualitas juga supaya dapat menghasilkan generasi tersebut. buat memenuhi kebutuhan akan kualitas pendidikan, forum pendidikan harus berusaha dan berupaya buat mengelola manajemen sarana serta prasarana pendidikan sebaik mungkin supaya mutu yang diinginkan mampu tercapai.

Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai akan bisa meningkatkan kualitas pendidikan sekolah tersebut. Hal ini mampu dikatakan berhasil karena sarana serta prasarana yang memadai akan menunjang pada kegiatan pembelajaran buat memperoleh hasil yang diinginkan. Hal ini bisa didukung dengan adanya manajemen sarana dan prasarana yang bertujuan membantu mempersiapkan dan mengatur segala alat-alat yang dibutuhkan bagi terselenggaranya proses pendidikan sebagai akibatnya membantu kelancaran proses belajar mengajar.

Pendidikan di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengalami banyak kemajuan. Sebagian besar penduduk usia sekolah sudah bersekolah. Namun, kemajuan tersebut belum diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikannya.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal penting demi berlangsungnya suatu pendidikan. Kenapa sarana dan prasarana dikatakan penting untuk suatu pendidikan? Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana pendidikan termasuk dalam salah satu proses untuk melancarkan suatu pendidikan yang berupa perlengkapan segala sesuatu mengenai pendidikan khususnya gedung sekolah, kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran lainnya yang terdapat dalam sekolah.

Sebuah sekolah lebih mudah dalam melakukan proses pembelajaran bila sarana dan prasarana yang tersedia memadai. Akan tetapi pada kenyataannya banyak sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana secara memadai, khususnya sekolah di daerah pedalaman, perbatasan, atau jauh dari kota. Hal ini tentu saja mempengaruhi kualitas pendidikan yang tersebut.

Di beberapa daerah NTT, masih terdapat gedung sekolah yang tidak layak pakai, bangunan masih terbuat dari bebak, tidak adanya akses jaringan internet di sekolah, belum adanya akses jalan dan transportasi, bangku dan meja sekolah yang tidak sesuai dengan jumlah siswa dan masih banyak lagi.

Namun, di tengah berbagai keterbatasan yang dimiliki sekolah, semangat anak-anak tetap membara untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Kondisi dunia pendidikan yang masih memprihatinkan ini, seharusnya menjadi perhatian pemerintah, apalagi di kawasan perbatasan. Mengingat kawasan perbatasan merupakan wajah dari Indonesia.

Untuk itu diperlukan kolaborasi dan kerja sama dari berbagai pihak, khususnya agar dunia pendidikan lebih di kawasan perbatasan terutama sarana dan prasaranya lebih memadai. Kepala sekolah adalah komponen pendidikan yang paling berperan pada meningkatkan kualitas pendidikan. kepala sekolah merupakan penggerak, pengatur serta pemimpin arah kebijakan pada rangka mencapai tujuan pendidikan. Sebagaimana yang dikemukakan Rosyandi dan Pardjono bahwa posisi kepala sekolah menentukan arah suatu forum, mengatur program sekolah. kepala sekolah

diharapkan membawa spirit kerja guru dan membentuk kultur sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. dengan ini kepala sekolah memiliki wewenang dalam menjalankan, mengoptimalkan, mengawas serta mengkoordinasikan manajemen sarana serta prasarana pendidikan supaya bisa berjalan baik sesuai dengan tujuan forum pendidikan. Adapun proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pendataan, pemeliharaan dan penghapusan.

Besar harapan agar pemerataan sarana dan prasarana juga berdampak bagi daerah di kawasan perbatasan. Mengingat kondisi riil dunia pendidikan di kawasan perbatasan NTT yang masih tertinggal dengan daerah perkotaan lainnya.

KETERBATASAN BUKAN ALASAN UNTUK TAK BELAJAR

Rizky Widia Kardika

Di Indonesia, keterbatasan sarana pendidikan masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, termasuk kurangnya alokasi dana untuk pendidikan, keterbatasan infrastruktur pendidikan, dan rendahnya tingkat literasi masyarakat. Akibatnya, banyak anak Indonesia yang tidak dapat mengakses pendidikan yang memadai dan memiliki keterbatasan dalam mengembangkan potensi diri. Salah satu masalah terbesar dalam pendidikan di Indonesia adalah kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Banyak sekolah yang tidak memiliki akses ke listrik, air bersih, sanitasi yang layak, atau ruang belajar yang cukup. Bahkan, beberapa sekolah hanya memiliki satu guru yang mengajar di beberapa kelas sekaligus. Kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai ini menghambat kemampuan siswa untuk belajar dan berkembang secara optimal.

Selain itu, masalah lain yang dihadapi dalam pendidikan di Indonesia adalah kurangnya ketersediaan buku teks dan sumber daya pendidikan lainnya. Banyak sekolah tidak memiliki koleksi buku teks yang memadai, sehingga siswa harus berbagi buku atau bahkan tidak memiliki buku sama sekali. Selain itu, akses ke internet dan teknologi pendidikan yang memadai juga masih menjadi masalah, terutama di daerah pedesaan. Hal ini membuat siswa kesulitan untuk mengakses sumber daya pendidikan online dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan digital.

Pendidikan adalah hak asasi manusia yang sangat penting dan dibutuhkan oleh semua orang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam hidup. Namun, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mengakses sarana pendidikan yang memadai. Sarana pendidikan yang memadai seperti fasilitas, buku, atau internet dianggap sebagai kunci penting dalam membangun pendidikan yang berkualitas. Namun, keterbatasan sarana bukanlah alasan untuk tak belajar.

Keterbatasan sarana pendidikan di Indonesia juga memengaruhi kualitas pendidikan dan memperparah kesenjangan pendidikan. Siswa dari daerah terpencil dan miskin seringkali tidak dapat mengakses pendidikan yang berkualitas, sementara siswa di perkotaan dan kaya lebih mungkin untuk memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, sehingga setiap anak dapat memperoleh pendidikan yang setara dan berkualitas. Meskipun keterbatasan sarana dapat menjadi penghambat dalam proses belajar, namun hal tersebut bukanlah alasan untuk tidak belajar. Keterbatasan sarana hanya menjadi kendala fisik semata, namun semangat belajar dan kemauan untuk belajar adalah hal yang tidak terbatas dan dapat dikembangkan oleh siapapun.

Keterbatasan sarana sebenarnya dapat menjadi peluang untuk belajar secara kreatif dan mandiri. Sebagai contoh, siswa yang tidak memiliki akses ke internet dapat memanfaatkan buku teks dan referensi lainnya untuk belajar. Mereka juga dapat memanfaatkan lingkungan sekitar untuk belajar, seperti melakukan observasi alam, mengunjungi tempat wisata sejarah, dan lain-lain. Hal ini dapat memperkaya pengalaman belajar dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari.

Selain itu, keterbatasan sarana dapat membangkitkan rasa kreativitas dan inovasi siswa. Siswa dapat mencari solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya, seperti dengan membagi buku teks dengan teman, melakukan diskusi kelompok, atau

membuat materi belajar sendiri. Selain itu, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk belajar secara mandiri, seperti dengan memanfaatkan aplikasi belajar online atau menonton video tutorial di platform video sharing. Dengan kemauan dan semangat yang kuat, siswa dapat mengatasi keterbatasan sarana dan tetap memperoleh pengetahuan yang bermanfaat.

SARANA DAN PRASARANA PENENTU MUTU PENDIDIKAN

Hayatun Nufus

Rendahnya mutu Pendidikan di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan. Berdasarkan hasil survei *Programme for International Student Assessment* (PISA) tahun dari tahun 2000 lalu, berita pada Kompasiana desember 2020, menunjukkan kemampuan matematika, sains dan membaca berada pada peringkat rendah. Tahun 2000 yang merupakan tahun pertama adanya pemeringkatan yang diselenggarakan oleh PISA pada kategori membaca, matematik dan sains , Indonesia ada di peringkat 39, 39, 38 dari 41 negara. Kemudian pada tahun 2003, pada kategori membaca matematika dan sains Indonesia berada pada peringkat 39, 38 , 38 dari 40 negara. Lalu pada tahun 2006, pada kategori membaca, matematika dan sains Indonesia berada pada peringkat 48, 50, 50 dari 56 peserta, selanjutnya pada tahun 2009, Indonesia berada pada peringkat 57, 61, 60 dari 65 negara, kemudian pada tahun 2012, peringkat Indonesia masih berada dilevel rendah yaitu 62, 64, dan 64 dari 65 n3gara, tahun 2015 Indonesia masih pada peringkat bawah yaitu 61, 63, 62 dari 69 negara, terakhir pada tahun 2018,pada kategori sains, membaca, dan matematika, Indonesia masih tetap di peringkat bawah yaitu 74,73, dan 71 dari 79 negara yang disurvei.

Adanya hasil peringkat yang dikeluarkan PISA menunjukkan bahwa mutu Pendidikan Indonesia dari waktu ke waktu tidak berubah, selalu berada di posisi bawah. Artinya mutu Pendidikan kita tertinggal dari bangsa lain. Belum lagi dampak dari pandemi

Covid 19, mutu Pendidikan di Indonesia semakin terpuruk. Mengapa hal ini bisa terjadi? Banyak faktor penyebabnya, salah satunya adalah kurangnya sarana dan prasarana di sekolah-sekolah di Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan PISA, mutu Pendidikan di Indonesia tidak berubah dari tahun ke tahun, padahal dari segi anggaran pemerintah telah mengalokasikan dana Pendidikan sebesar 20% dari anggaran lain. Apa yang harus dibenahi dari system Pendidikan di Indonesia. Dilihat dari berbagai tulisan di media massa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terpuruknya mutu Pendidikan di tanah air. Beberapa faktor penyebab rendahnya mutu Pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kompetensi pendidik, rendahnya kualitas saran fisik, kesejahteraan pendidik yang masih rendah, kurikulum yang sesuai dengan karakteristik masyarakat, kurangnya dukungan orang tua terhadap peserta didik dalam pembelajaran, dan minimnya penguasaan teknologi oleh peserta didik maupun pendidik dan target standar kelulusan yang ditentukan oleh pemerintah. Selain faktor tersebut, faktor penyebab lain adalah rendahnya daya saing secara jujur dalam meraih tujuan.

Beberapa dampak yang diakibatkan rendahnya mutu Pendidikan adalah kemiskinan, kebodohan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi. Jelas sekali korelasi antara tingginya mutu Pendidikan berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat.

Manajemen sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu bagian kajian dalam administrasi pendidikan sekolah (*school administration*) atau administrasi pendidikan (*educational administration*) serta sekaligus menjadi bidang tugas kepala sekolah selaku administrator sekolah (Suranto dkk, 2022: 61). Keberadaan sarana dan prasarana sangat penting bagi pembelajaran karena sarana dan prasarana merupakan media pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.

Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tersendiri sehingga untuk memahaminya diperlukan cara-cara tertentu. Cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah dengan menggunakan media pembelajaran. Salah satu media pembelajaran adalah komputer. Untuk dapat menggunakan komputer dibutuhkan sarana seperti ruang kelas. Selain itu sarana yang penting dalam peningkatan kompetensi belajar siswa adalah ruang belajar yang baik, perpustakaan, buku pelajaran, dan laboratorium. Berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh mata pelajaran, dibutuhkan media pembelajaran yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran karena tidak semua peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami materi pembelajaran tanpa adanya media pembelajaran atau alat bantu dalam pembelajaran.

Satuan Pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi Gedung sekolah, lapangan olah raga, ruang perpustakaan, kamar mandi, ruang ibadah, jaringan internet, ruang guru, ruang komputer dan lain sebagainya. Jika sarana dan prasarana telah memenuhi standar maka mutu Pendidikan dalam satuan Pendidikan akan menjadi lebih baik. Semakin lengkap sarana dan prasarana pada satuan Pendidikan akan memudahkan pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

Sarana dan prasarana Pendidikan di kota dan di desa juga terdapat kesenjangan, jika di kota-kota besar sarana yang dimiliki lengkap dan memadai, dari Gedung hingga jaringan internet yang bagus, akan tetapi berbeda dengan sarana yang dimiliki oleh sekolah di pedesaan. Masih banyak satuan Pendidikan belum memiliki ruang belajar yang layak sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan baik.

Mutu Pendidikan di Indonesia akan berangsur membaik jika pemangku kepentingan bersinergi dengan masyarakat dalam mewujudkan Tujuan dari pendidikan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Kesadaran diri untuk memajukan Indonesia lewat Pendidikan bukan hanya sekedar jargon tapi dibutuhkan kejujuran dan kesadaran dari berbagai pihak dalam mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.

MEDIA KONTEKSTUAL DALAM RANAH PEMBELAJARAN

Qurrota Ayu Neina

Pembelajaran berbasis kontekstual adalah suatu metode pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Dalam pembelajaran ini, siswa akan mempelajari materi pembelajaran dengan cara yang lebih praktis dan terkait dengan kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran berbasis kontekstual merupakan alat yang sangat penting dalam melaksanakan pembelajaran berbasis kontekstual. Media pembelajaran berbasis kontekstual dapat berupa media cetak, media visual, media audio, dan media digital.

Media cetak seperti buku, majalah, dan koran dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada siswa tentang konteks kehidupan sehari-hari yang terkait dengan materi pembelajaran. Media visual seperti gambar, diagram, dan video juga dapat digunakan untuk memperlihatkan konsep atau proses yang sulit dipahami dengan kata-kata saja. Media audio seperti rekaman suara atau lagu dapat digunakan untuk meningkatkan daya ingat siswa terhadap informasi yang diberikan. Media digital seperti video game atau aplikasi pembelajaran juga dapat digunakan untuk membuat siswa lebih tertarik dan termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran.

Dalam menggunakan media pembelajaran berbasis kontekstual, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, media pembelajaran harus sesuai dengan konteks kehidupan sehari-

hari siswa. Kedua, media pembelajaran harus mudah dipahami dan menarik perhatian siswa. Ketiga, media pembelajaran harus memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan interaktif. Dalam melakukan pembelajaran berbasis kontekstual dengan menggunakan media pembelajaran berbasis kontekstual, guru harus dapat memotivasi siswa agar tertarik dan terlibat dalam pembelajaran. Guru juga harus dapat mengkaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam konteks yang relevan.

Membuat media pembelajaran berbasis kontekstual memiliki beberapa keuntungan penting dalam proses pembelajaran. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk membuat media pembelajaran berbasis kontekstual:

1. Meningkatkan daya tarik siswa: Media pembelajaran berbasis kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dapat meningkatkan daya tarik siswa terhadap pembelajaran. Hal ini dapat membantu siswa lebih termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat menjadi lebih efektif.
2. Memudahkan pemahaman materi: Dengan menggunakan media pembelajaran yang terkait dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa, materi pembelajaran dapat lebih mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Siswa dapat lebih mudah mengaitkan konsep pembelajaran dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya, sehingga memudahkan mereka dalam memahami dan menguasai materi.
3. Meningkatkan keterampilan siswa: Media pembelajaran berbasis kontekstual dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, menggunakan media pembelajaran berbasis kontekstual dalam pembelajaran matematika dapat membantu siswa

mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Menyediakan pengalaman pembelajaran yang interaktif: Media pembelajaran berbasis kontekstual dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan kreatif bagi siswa. Siswa dapat lebih aktif terlibat dalam pembelajaran, baik secara individu maupun dalam kelompok, dan dapat memperoleh pengalaman yang lebih menarik dan bermakna.
5. Memperkuat keterkaitan antara pembelajaran dan kehidupan sehari-hari: Media pembelajaran berbasis kontekstual dapat membantu memperkuat keterkaitan antara pembelajaran dan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini dapat membantu siswa melihat nilai dan relevansi pembelajaran dalam kehidupan mereka, sehingga lebih termotivasi untuk belajar dan memperoleh hasil yang lebih baik dalam pembelajaran.

Membuat media pembelajaran berbasis kontekstual memiliki beberapa keuntungan penting dalam proses pembelajaran, seperti meningkatkan daya tarik siswa, memudahkan pemahaman materi, meningkatkan keterampilan siswa, menyediakan pengalaman pembelajaran yang interaktif, dan memperkuat keterkaitan antara pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mempertimbangkan penggunaan media pembelajaran berbasis kontekstual dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna bagi siswa.

Oleh karena itu, media pembelajaran berbasis kontekstual adalah alat yang sangat penting dalam melaksanakan pembelajaran berbasis kontekstual. Dalam menggunakan media pembelajaran berbasis kontekstual, perlu diperhatikan agar media pembelajaran dapat memfasilitasi pembelajaran yang efektif, menarik, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa.

PENTINGNYA SARANA DAN PRASARANA DALAM MENCAPAI TUJUAN PENDIDIKAN

Prasetyo Yuli Kurniawan

Sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan secara mikro maupun makro. Sarana dan prasarana merujuk pada segala hal yang dibutuhkan oleh suatu lembaga pendidikan, mulai dari gedung, peralatan, dan sumber daya manusia terlatih. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, proses belajar-mengajar akan sulit dilakukan, sehingga tujuan pendidikan pun tidak akan tercapai.

Pentingnya sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan pendidikan secara mikro dapat dilihat dari sisi peserta didik. Dalam lingkungan belajar-mengajar, sarana dan prasarana yang memadai dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi peserta didik dalam mendapatkan informasi dan mempelajari materi pelajaran. Peralatan seperti buku, perangkat lunak, hardware, dan akses internet adalah sarana penting yang menunjang keberhasilan peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pelajaran secara lebih efektif. Selain itu, fasilitas ruang belajar yang nyaman dan memadai seperti meja, kursi, dan lingkungan yang bersih dan teratur juga dapat memberikan suasana yang kondusif untuk belajar.

Sedangkan dari sisi lembaga pendidikan secara makro, sarana dan prasarana yang memadai juga penting untuk mencapai tujuan pendidikan secara umum. Sebuah lembaga pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Hal ini dapat menarik minat calon

peserta didik, mendorong partisipasi dan kemampuan pengajar, serta meningkatkan kualitas lulusan dan daya saing lembaga pendidikan.

Namun, perlu diingat bahwa sarana dan prasarana yang memadai tidaklah cukup untuk mencapai tujuan pendidikan. Faktor-faktor lain seperti kebijakan pendidikan, kurikulum yang terbaru dan relevan, serta pengelolaan dan pengelolaan pendidikan yang baik juga memainkan peran yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan pendidikan yang baik harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, siswa, dan masyarakat luas, serta menjangkau berbagai masalah dan kebutuhan yang ada saat ini.

Secara keseluruhan, sarana dan prasarana yang memadai memang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi mereka tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan kebijakan pendidikan yang baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penguatan tidak hanya pada sarana dan prasarana, tetapi juga pada kebijakan dan pengelolaan pendidikan secara keseluruhan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA

Mei Fita Asri Untari

Pandemi covid-19 memaksa kita untuk mengenal teknologi informasi dan komunikasi secara mendalam. Selama pandemi, proses pembelajaran dilakukan secara online atau dalam jaringan. Guru dan peserta didik dipaksa untuk menggunakan berbagai platform digital dalam proses pembelajaran sebagai pengganti tatap muka. Dampak tersebut ternyata membawa hikmah yang baik dalam dunia pendidikan untuk menyikapi revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan perubahan teknologi yang semakin cepat seperti penggunaan Artificial Intelligence. Pekerjaan di masa depan akan banyak terdisrupsi seperti yang diprediksi oleh *World Economic Forum*. Dalam pembelajaran tatap muka pada masa pascapandemi guru diharapkan dapat memadukan kebiasaan penggunaan TIK dalam pembelajaran tatap muka di sekolah baik dalam pembelajaran akademik dan non akademik. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi sekolah untuk menambah pengadaan sarana dan prasarana di sekolah. Terlebih lagi jika banyak sarana prasarana yang rusak karena tidak digunakan selama pandemi.

Setiap sekolah pasti memiliki cara pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang berbeda-beda mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan. Sarana dan prasarana hendaknya memadai bagi kepentingan peserta didik demi terbentuknya

karakter peserta didik dan dapat melayani serta menjamin waktu belajar, bekerja, dan bermain sesuai dengan bakatnya masing-masing. Selain itu sarana dan prasarana disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber dari kepentingan, kegunaan, serta manfaat bagi peserta didik dan guru di sekolah.

Keberhasilan peserta didik tidak hanya ditentukan oleh layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah. Keberhasilan sekolah juga berhubungan dengan berbagai pihak yaitu orang tua atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu tidak terlepas dari adanya peran serta masyarakat. Mulyasa (2007) menyatakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain (1) memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, (2) memperkuat tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat dan (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.

Keberadaan komite sekolah sangat membantu komunikasi antara sekolah dengan orang tua atau masyarakat. Pembentukan komite sekolah untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Komite sekolah tidak hanya berperan untuk memberikan bantuan berwujud material, tetapi berupa pemikiran, ide, gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah. Kepala sekolah dan guru dapat bermusyawarah dengan komite sekolah ketika menentukan program-program untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Komite dapat memberikan masukan terkait program sekolah sebelum disetujui dan disahkan bersama. Salah satu program sekolah yang perlu didiskusikan dengan komite adalah manajemen sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu factor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai disertai dengan pengelolaan secara optimal. Menurut Rohiat (2006) sarana dan prasarana adalah semua

benda atau barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan untuk menunjang terlaksananya proses pembelajaran yang langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang mengatur untuk menyiapkan segala peralatan dan material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Dapat diartikan pula sebagai kegiatan menata, mulai dari merencanakan, mengadakan, menyimpan, menyalurkan, mendayagunakan, memelihara, menginventarisasi, dan menghapus serta menata lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah supaya tepat guna dan tetap sasaran. Dengan adanya manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, indah, rapi sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk

- (1) Menyumbang uang, barang, tenaga, usulan/ide yang berkaitan dengan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah.
- (2) Bekerja sama dengan sekolah untuk melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah.
- (3) Menghadiri rapat atau diskusi terkait pengadaan sarana dan prasarana sekolah.
- (4) Aktif berdiskusi dengan sekolah dalam hal penyimpanan, penyaluran, dan pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah.
- (5) Melakukan pengawasan terhadap sirkulasi sarana dan prasarana sekolah, misalnya memegang kartu inventarisasi dan mengecek secara berkala. Memberikan usulan terhadap sarana dan prasarana yang membutuhkan penghapusan, perbaikan, dan pengadaan baru sehingga peserta didik tidak tertinggal dan terkendala dalam belajar.

Peran serta masyarakat sangat penting dirasakan oleh sekolah. Akan tetapi tidak semua masyarakat memiliki komitmen yang baik terhadap sarana dan prasarana sekolah, Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proqram peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan antara lain faktor jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Untuk itu kepala sekolah perlu memetakan dan mewedahi semua aspirasi masyarakat dengan berbagai aspek tersebut dengan cara melibatkan secara penuh pada kegiatan-kegiatan program dari pemerintah atau yang bukan dari pemerintah. Komite atau masyarakat benar-benar dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di sekolah karena dilibatkan dari awal identifikasi masalah, pembuatan program kerja, pelaksanaan hingga evaluasi.

KURIKULUM MERDEKA DAN 'INFRASTRUKTUR LANGIT'

Zainal Arifin

Begitulah gambaran sederhana dari penerapan Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini ibarat ilmu yang dibawa manusia masa depan untuk diterapkan pada masa transisi peradaban. Kurikulumnya sangat akseleratif dengan peradaban mendatang, tapi

Apa yang paling menonjol dalam penerapan Kurikulum Merdeka? Jawabnya adalah adanya kebijakan masifnya terhadap penggunaan teknologi informasi. Banyaknya aplikasi yang digunakan, menuntut kecakapan luar biasa dari seorang guru. Kurikulum ini dianggap sebagai gerbong kurikulum masa depan, tapi penumpang gerbongnya adalah para manula yang biasa naik kereta uap, lalu mabuk ketika diajak naik Shinkansen.

guru-gurunya masih kepayahan untuk mengendalikannya. Sang guru butuh waktu untuk sekedar bernafas, supaya tidak gelagapan menghadapi perubahan peradaban. Akhirnya, Kurikulum Merdeka yang sebenarnya penuh dengan fitur-fitur kemudahan justru menjadi terlihat rumit karena gurunya lambat bertransformasi.

Perlu dimaklumi, guru-guru yang mengajar di sekolah saat ini muncul dari banyak generasi, mulai generasi x dan generasi y, dan sedikit generasi z. Bahkan,

generasi yang paling tua, yakni generasi babyboomer juga masih tersisa dalam dunia pendidikan Indonesia. Inilah yang mengakibatkan implementasi kurikulum tidak bisa serentak diterapkan. Ada beberapa generasi yang masih perlu bertransformasi dari dunia manual ke dunia digital. Terutama generasi-generasi yang saban harinya belum familiar dengan penggunaan teknologi informasi.

Uniknya, guru-guru yang belum familiar dengan teknologi ini masih banyak yang menggunakan paradigma lama yakni ponsel dianggap ancaman bagi belajar siswa. Dengan kata lain, dalam penerapan pembelajaran guru-guru tersebut masih melarang penggunaan ponsel. Mereka mengalami *folacy* (kesesatan berpikir), seolah-olah pembelajaran guru di kelas jauh lebih unggul dibandingkan pembelajaran dengan memanfaatkan mesin pencarian *google*, *bing*, *opera*, maupun *mozilla*.

Kendala lain dari kurikulum merdeka yang tak kalah penting adalah belum sempurnanya “infrastruktur langit” yang terkait dengan layanan teknologi informasi yang belum sepenuhnya sempurna mengcover wilayah-wilayah Indonesia. Setiap perusahaan teknologi memiliki *coverage area* yang rerata sama, yakni melayani kota-kota besar dan cenderung kurang memperhatikan wilayah-wilayah terpencil yang memang secara ekonomis kurang menguntungkan.

Dari seluruh luas pemukiman Indonesia, dari pemetaan tahun 2018 masih ada 11 persen area pemukiman yang mengalami *blank spot* alias tidak tercover jaringan telekomunikasi. Data Kemkominfo sendiri, sampai tahun 2022 lalu, jumlah desa yang masih berstatus *blank spot* mencapai 12.345 wilayah. Tentu saja fakta-fakta ini menjadi masalah serius dalam penerapan Kurikulum Merdeka yang meletakkan teknologi pemanfaatan internet sebagai kunci utamanya. Jangankan di wilayah pedesaan atau wilayah tertinggal, di area

perkotaan sendiri sinyal komunikasi masih sering terputus atau mengalami gangguan.

Masalah infrastruktur langit yang belum beres ini juga menjadi hal yang banyak dikeluhkan oleh sekolah yang telah menggunakan platform Kurikulum Merdeka. Mereka memang sangat terbantu dengan berbagai macam aplikasi yang digunakan dalam kurikulum ini. Tapi hal lain yang masih menjadi gangguan dalam dunia pendidikan adalah munculnya upgrade aplikasi yang akan terjadi bersinambungan (dan tiada akhir). Setiap kali teknologi ditingkatkan, aplikasi akan segera diupgrade. Misalnya, bila aplikasi android ditingkatkan, maka supaya aplikasi bisa berjalan dalam android terbaru, maka aplikasi harus ditingkatkan.

Dampak lain dari peningkatan aplikasi ini juga membawa dampak beruntun lain, yakni ponsel-ponsel dengan teknologi lama tidak akan bisa memuat aplikasi-aplikasi baru. Dampaknya pun akan signifikan, tingkat konsumtif masyarakat terhadap ponsel akan meningkat. Bila upgrade aplikasi membuat terjadi tiap tahun dan berdampak pada ponsel generasi tertentu tidak eligible dengan aplikasi tidak bisa mengakses, maka pada akhirnya kebutuhan akan ponsel menjadi kebutuhan pokok yang bersifat periodik.

Hal lain yang menjadi kendala Kurikulum Merdeka adalah perkara ketersediaan aliran listrik. Kok listrik berpengaruh? Ya, listrik memiliki peranan luar biasa dalam kurikulum ini. Bukan terkait dengan dengan lampu dan sarana kelistrikan saja. Tapi bila suatu wilayah listriknya masih sering terjadi pemadaman rutin bergilir, internetnya pun akan turut padam secara bergilir. Artinya, penggunaan Kurikulum Merdeka juga terpengaruh oleh masalah layanan kelistrikan dalam negeri.

Teknologinya boleh jadi berkiblat pada masa depan, tapi bila “infrastruktur langitnya” belum beres, lantas apa yang bisa dikatakan? ***

SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN DIGITAL PADA KURIKULUM MERDEKA

Uki Hares Yulianti

Pada era revolusi industri 4.0 tidak dapat dipungkiri pembelajaran digital masuk dalam ranah pendidikan. Baik guru dan siswa harus sudah dapat menyiapkan diri mengikuti perkembangan teknologi yang terus berjalan, jika tidak kita akan tertinggal informasi. Sekolah juga harus menyiapkan sarana prasarana dalam menyiapkan pembelajaran digital karena teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam perubahan pendidikan saat era revolusi industri 4.0.

Dengan adanya perubahan teknologi ini juga mengubah cara bekerja, belajar, dan berinteraksi kita dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pekerjaan yang sudah digantikan oleh robotika, contohnya adalah penjaga pintu jalan tol. Penggunaan robotika atau teknologi ini dianggap lebih efisien, lebih cepat dan akurat. Selain itu, juga dalam hal proses produksi di perusahaan juga sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Hal ini membantu perusahaan dalam menghasilkan produk yang lebih baik serta biaya produksi yang lebih rendah.

Teknologi digital di bidang pendidikan juga membuka peluang belajar yang lebih luas dan lebih fleksibel. Siswa dapat mengakses ilmu dari berbagai tempat dan dimana saja secara daring. Dengan adanya teknologi digital proses pembelajaran jauh lebih interaktif dan kolaboratif. Siswa dapat belajar dari berbagai sumber belajar, guru dapat berkolaborasi dengan guru lainnya dalam satu kelas daring. Siswa dapat belajar dengan cara yang menarik dan

efektif dari berbagai platform ataupun aplikasi pembelajaran yang ada. Dengan adanya teknologi digital, siswa dan guru dapat mengakses sumber belajar yang lebih bervariasi dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat masing-masing.

Penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran juga harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital. Baik siswa dan guru bersama-sama meningkatkan kemampuan literasi digital dari berbagai pelatihan yang disediakan pemerintah atau belajar mandiri secara daring. Pembelajaran digital juga harus disertai dengan keamanan privasi data saat pembelajaran daring berlangsung. Oleh karena itu, baik pemerintah ataupun sekolah memastikan tingkat keamanan privasi data selama pembelajaran digital dilakukan.

Sarana prasarana dalam dunia pendidikan memang belum merata hingga saat ini terutama di daerah pelosok. Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pengembangan sarana prasarana pembelajaran digital di Indonesia saat ini sebagai berikut.

1. Akses internet yang masih terbatas dan tidak merata di wilayah Indonesiam terutama di daerah pelosok 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) serta di wilayah perbatasan Indonesia.
2. Ketersediaan baik komputer, leptop dan *software* yang terbatas di beberapa daerah. Ketersediaan komputer di sekolah-sekolah hanya terbatas apalagi sekolah yang berada di pelosok.
3. Kurangnya literasi digital baik guru, siswa, maupun masyarakat secara umum, sehingga pemanfaatan teknologi pembelajaran masih terbatas dan tidak maksimal.
4. Kurangnya sumber daya manuai dan kesiapan infrastruktur dalam hal kualitas serta jumlah dalam mendukung pembelajaran digital.

Oleh karena itu, baik pemerintah maupun sekolah harus melakukan upaya untuk menyelesaikan tantangan di atas. Akses internet harus mulai diratakan di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini sangat terasa pendidikan akhirnya tidak merata saat pembelajaran daring. Pelatihan untuk meingkatkan literasi digital harus mulai digencarkan saat ini, agar guru dan siswa bisa mengikuti perkembangan teknologi yang begitu pesat.

Bisa disimpulkan sarana prasaran digital merupakan kunci utama dalam proses pembelajaran pada kurikulum merdeka saat ini. Sehingga baik pemerintah maupun sekolah harus berupaya meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas sarana prasana untuk menunjang pembelajaran digital.

BAB 6

**MANAJEMEN KEUANGAN
DAN
KEPEMIMPINAN**

KRISIS KEPEMIMPINAN PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA

Prabawati Nurhabibah

Secara operasional, kepemimpinan berfungsi sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemimpin dalam upaya menggerakkan bawahan agar mau berbuat sesuatu guna menyelesaikan program-program kerja yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam konteks ini, berhasil tidaknya program pemberdayaan Sumber Daya Manusia di dalam organisasi sebagian besar ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam melaksanakan fungsi-fungsi pokok kepemimpinan, baik sebagai leader maupun manager. Pelaksanaan fungsi sebagai *leader* lebih menekankan pada usaha interaksi manusiawi (*human interactions*) untuk mempengaruhi orang yang dipimpin, menemukan sesuatu yang baru, mengadakan perubahan dan pembaruan (Mutohar, 2013).

Isu kepemimpinan menjadi topik yang selalu menarik untuk dibahas pada setiap kesempatan. Seorang pemimpin tidak hanya harus mampu memimpin sebuah organisasi, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk berinovasi dan bertransformasi dalam mencari solusi serta mengembangkan organisasi yang lebih baik. Menurut McGregor Burns, kepemimpinan transformasional adalah proses di mana pemimpin dan pengikutnya bersama-sama meningkatkan moralitas dan motivasi mereka. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia, juga menyatakan bahwa pemimpin yang baik harus dapat memberikan teladan, menciptakan peluang berkarya, serta memberikan dorongan dan arahan.

Krisis kepemimpinan di Perguruan Tinggi Indonesia telah menjadi perhatian yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Masalah ini menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen perguruan tinggi yang dapat berdampak negatif terhadap pembelajaran dan pengembangan institusi pendidikan itu sendiri. Dalam esai ini, kita akan membahas tentang krisis kepemimpinan di Perguruan Tinggi Indonesia dan faktor yang berkontribusi terhadapnya.

Pertama, salah satu faktor yang menyebabkan krisis kepemimpinan di perguruan tinggi Indonesia adalah kurangnya kualifikasi akademik dan pengalaman dalam manajemen. Banyak dari pemimpin perguruan tinggi yang saat ini mengalami krisis kepemimpinan kurang memiliki kualifikasi akademik dan pengalaman yang cukup dalam manajemen pendidikan. Sebagai hasilnya, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam membuat keputusan yang tepat dan strategis untuk mengelola perguruan tinggi.

Selain itu, masalah politik juga dapat menjadi faktor dalam krisis kepemimpinan di perguruan tinggi Indonesia. Dalam beberapa kasus, pengangkatan pemimpin perguruan tinggi dipengaruhi oleh faktor politik seperti ikatan keluarga atau keanggotaan partai politik. Akibatnya, terkadang hal-hal yang harus diutamakan dalam manajemen pendidikan, seperti pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan penelitian, menjadi terabaikan.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi juga dapat menyebabkan krisis kepemimpinan. Terkadang pemimpin perguruan tinggi tidak memberikan informasi yang jelas tentang penggunaan dana dan pengelolaan aset yang mengarah pada kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana perguruan tinggi. Hal ini dapat mengarah pada tindakan korupsi dan penyalahgunaan dana yang merugikan perguruan tinggi dan mahasiswa.

Kasus korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi adalah masalah yang serius di Indonesia. Praktik korupsi tersebut dapat merusak sistem pendidikan dan menghambat kemajuan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dalam esai ini, kita akan membahas tentang kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi, penyebabnya, dan upaya untuk mencegahnya.

Salah satu penyebab utama kasus korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi adalah karena adanya praktik suap yang dilakukan oleh orangtua atau calon mahasiswa kepada oknum dalam penerimaan mahasiswa baru. Suap ini dapat diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk memproses dan menyeleksi berkas pendaftaran, hingga kepada pengambil keputusan akhir dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Praktik ini dapat menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya, terutama bagi calon mahasiswa yang lebih layak namun gagal diterima karena tidak memiliki uang suap.

Selain itu, masalah lain yang berkontribusi pada kasus korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru adalah ketidaktransparanan dalam proses seleksi dan penilaian. Kurangnya transparansi dapat memungkinkan para pelaku korupsi melakukan tindakan tidak etis seperti memperoleh informasi tentang tes atau mengatur hasil seleksi agar dapat diuntungkan.

Kasus korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru tidak hanya merugikan mahasiswa dan orang tua, tetapi juga perguruan tinggi itu sendiri. Korupsi dapat menurunkan integritas dan reputasi perguruan tinggi dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Untuk mencegah kasus korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru, diperlukan upaya yang melibatkan semua pihak terkait. Perguruan tinggi harus mengadopsi sistem seleksi yang transparan dan objektif. Pemerintah juga harus memperkuat regulasi

dan pengawasan terhadap praktik korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru. Selain itu, penting juga untuk membangun kesadaran dan etos anti korupsi pada semua pihak yang terlibat dalam proses seleksi dan penerimaan mahasiswa baru, termasuk orang tua dan calon mahasiswa.

Selain itu, penting juga untuk memberikan pendidikan dan pelatihan tentang etika dan integritas kepada semua pihak terkait dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran mereka tentang bahaya korupsi dan mengembangkan sikap integritas dan transparansi.

Kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi harus diberantas secara tuntas. Hal ini tidak hanya penting bagi perkembangan sistem pendidikan di Indonesia, tetapi juga bagi pembangunan negara secara keseluruhan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, semua pihak harus bekerja sama dan mengambil tindakan konkret untuk mencegah praktik korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.

Selain itu, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi krisis kepemimpinan di perguruan tinggi Indonesia. Kebijakan dan regulasi yang sering berubah dapat menimbulkan kebingungan di antara pemimpin perguruan tinggi, staf, dan mahasiswa, dan dapat menghambat kemajuan institusi.

Akhirnya, krisis kepemimpinan di perguruan tinggi Indonesia juga dapat terjadi karena ketidakseimbangan antara tuntutan akademik dan tuntutan administratif. Pemimpin perguruan tinggi terkadang terlalu fokus pada administrasi dan pengelolaan keuangan sehingga kurang memberi perhatian pada pengembangan kurikulum, penelitian, dan pembelajaran. Akibatnya, institusi pendidikan menjadi kurang inovatif dan terhambat dalam mencapai tujuan utama mereka.

Dalam rangka mengatasi krisis kepemimpinan di perguruan tinggi Indonesia, perlu adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat secara keseluruhan.

PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI

Hetilaniar

Pengelolaan keuangan perguruan tinggi sangat penting untuk menjamin kelangsungan dan kemajuan lembaga pendidikan tersebut. Universitas memiliki banyak sumber pendapatan, seperti biaya kuliah, sumbangan alumni, hibah pemerintah, dan investasi. Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan penggunaan dana yang tepat dan optimal.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan perguruan tinggi terkait dengan sejarah dan perkembangan perguruan tinggi itu sendiri. Sebagai lembaga pendidikan, perguruan tinggi memegang peranan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik dan transparan sangat penting untuk menjamin mutu pendidikan yang optimal serta mendukung pengembangan riset dan teknologi.

Dengan perubahan zaman dan tantangan yang semakin kompleks, pentingnya pengelolaan keuangan di perguruan tinggi semakin meningkat. Universitas harus mengadopsi strategi dan kebijakan yang tepat untuk mengelola keuangannya dengan baik, termasuk penganggaran yang tepat, pelaporan keuangan yang transparan, manajemen risiko yang baik, dan tata kelola perguruan tinggi yang bertanggung jawab.

Selain pengembangan teknologi informasi, perguruan tinggi juga harus mengadopsi teknologi keuangan yang tepat guna untuk mendukung pengelolaan keuangan. Ini termasuk sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang efektif dan penggunaan analisis data untuk membuat keputusan manajemen keuangan yang lebih baik.

Teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam manajemen keuangan. Teknologi dapat membantu pengelolaan keuangan dalam berbagai cara, termasuk mempercepat proses pengelolaan keuangan. Dengan bantuan teknologi, proses pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Misalnya, dengan menggunakan sistem manajemen akuntansi dan keuangan yang terintegrasi dapat mempermudah dan mempercepat pencatatan transaksi keuangan.

Dengan adanya bantuan teknologi, dapat meminimalkan kesalahan manusia. Manusia tidak kebal terhadap kesalahan, sehingga pengelolaan keuangan secara manual dapat meningkatkan risiko kesalahan. Penggunaan teknologi dapat mengurangi risiko human error karena proses pengelolaan keuangan dilakukan secara otomatis. Meningkatkan akurasi dan keandalan data keuangan. Teknologi memungkinkan perguruan tinggi menghasilkan informasi keuangan yang lebih akurat dan terpercaya. Teknologi tersebut dapat memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tercatat secara akurat dan data keuangan yang dihasilkan pun akurat dan real-time.

Penggunaan teknologi bidang keuangan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Proses pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, memungkinkan perguruan tinggi untuk fokus pada kegiatan inti mereka. Selain itu, pemaksimalan teknologi juga dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Universitas dapat mengumpulkan dan menganalisis data keuangan dengan lebih

baik. Hal ini dapat membantu universitas membuat keputusan yang lebih baik dan lebih akurat. Selanjutnya, dapat meningkatkan keamanan dan keandalan data keuangan. Dengan bantuan teknologi, keamanan data keuangan perguruan tinggi dapat terjamin. Misalnya, teknologi blockchain dapat digunakan untuk memastikan keamanan transaksi keuangan.

Dalam penyiapan sumber daya pengelolaan keuangan berbasis teknologi, perguruan tinggi dapat melakukan beberapa hal, seperti: *Pelatihan dan pengembangan*, universitas dapat mendidik dan melatih staf dan karyawan dalam teknologi manajemen keuangan seperti sistem akuntansi, manajemen keuangan, dan teknologi analisis data. Pelatihan ini dapat diberikan melalui seminar, workshop atau program pelatihan online; *Perekrutan tenaga ahli*, universitas dapat mempekerjakan ahli atau konsultan yang berkualifikasi dan berpengalaman dalam manajemen keuangan berbasis teknologi untuk membantu mengembangkan sistem dan melatih staf dan karyawan; *Membangun Tim IT Internal*, universitas dapat membentuk tim IT internal yang terlatih dalam pengelolaan keuangan berbasis teknologi. Tim ini dapat membantu mengembangkan sistem dan memastikan sistem bekerja dengan baik; *pembuatan standar untuk manajemen keuangan*, perguruan tinggi dapat menetapkan standar dan prosedur pengelolaan keuangan yang jelas dan terstruktur atas penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dapat membantu karyawan dan rekan kerja memahami prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan keuangan yang dimungkinkan oleh teknologi; dan *gunakan teknologi terbaru*, universitas dapat menggunakan teknologi manajemen keuangan terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan.

Ringkasnya, pengelolaan keuangan dengan menggunakan teknologi dapat membawa banyak manfaat bagi perguruan tinggi seperti: mempercepat proses pengelolaan keuangan, meminimalkan kesalahan manusia, meningkatkan akurasi dan keandalan informasi keuangan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan

kemampuan pengambilan keputusan dan meningkatkan keamanan, dan keandalan. Ketika menggunakan teknologi dalam pengelolaan keuangan, perguruan tinggi harus memastikan bahwa mereka memiliki staf yang berkualitas dan terlatih dalam penggunaan teknologi dan mengadopsi sistem teknologi yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang efisien dan fungsional dapat tercapai dan perguruan tinggi dapat mencapai tujuan keuangannya dengan lebih baik.

GERAKAN ALUMNI PEDULI

Meina Febriani

Jika semua alumni memperhatikan masa depan almamaternya, tidak akan ada sekolah yang runtuh di negara ini. Apabila setiap alumni merasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan adik-adik almamaternya, tidak ada peserta didik yang harus melepaskan seragam sekolah dan putus sekolah. Selalu saja ada stigma bahwa, apabila sudah lulus lepas sudah semua kewajiban mengabdikan sebab urusan pembangunan adalah tanggung jawab negara. Meski tidak memiliki tanggung jawab secara langsung, sesungguhnya alumni tetaplah memiliki ikatan komitmen dan tanggung jawab moral secara tidak langsung.

Tanggung jawab pihak sekolah sesungguhnya tidak hanya memberikan pelajaran kepada peserta didik, tetapi juga pendidikan untuk menciptakan manusia yang peduli, sayangnya banyak sekolah saat ini yang lupa tentang nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, salah satu tugas berat sekolah adalah bagaimana menanamkan rasa terima kasih pada setiap alumni ketika telah mampu berdikari.

Terkait dengan hal tersebut, keberhasilan sebuah sekolah tidak mungkin tercapai tanpa adanya peserta didik. Sama halnya dengan peserta didik, mereka tidak akan mampu mencapai posisi sebagai seorang presiden jika tidak pernah menimba ilmu di sekolah. Setiap alumni seharusnya merasa terhutang budi pada sekolah mereka. Saat ini, kita bisa melihat fenomena di mana banyak peserta didik yang berbakat harus berhenti sekolah atau tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang diinginkan karena

masalah keuangan. Padahal, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Sekarang, masalah bangunan sekolah yang ambruk atau anak-anak miskin yang terpaksa putus sekolah seringkali menjadi topik yang diperbincangkan di media massa. Ada sebuah perspektif, jika kita memikirkan bahwa sekolah yang ambruk telah berdiri selama puluhan tahun, sudah pasti ada ratusan alumni yang telah lulus dari sana. Jika setidaknya setiap alumni peduli dan berkontribusi kepada almamaternya sebenarnya kita tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah yang sangat berprosedur.

Wadah Alumni Peduli

Kisah sukses alumni peduli telah lebih dulu diawali oleh beberapa lembaga pendidikan. Beberapa ikatan alumni telah sukses membiayai pendidikan adik-adik tingkatnya. Bahkan, merambah pada ranah pembangunan infrastruktur. Pada intinya, tujuan dari komunitas ini adalah untuk menciptakan sebuah ikatan kekeluargaan di antara para anggotanya. Dengan adanya komunitas ini, diharapkan alumni akan merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap kelangsungan komunitas tersebut. Selain itu, silaturahmi yang dilakukan dengan peserta didik bertujuan untuk memberikan motivasi dan arahan kepada mereka agar dapat meraih masa depan yang lebih baik.

Meskipun belum cukup besar, salah satu ikatan alumni yang telah berkiprah dalam bantuan dana pendidikan telah dijalankan oleh alumni SMA 2 Purwokerto dengan jenama Smadha Peduli. Program Smadha peduli diimplementasikan dengan memberikan bantuan berupa material kepada peserta didik-peserta didik yang kurang mampu. Dalam pelaksanaannya, digunakan metode "mengagetkan" dan "tidak memberikan harapan". Dalam metode "mengagetkan", tim Smadha Peduli tiba-tiba hadir dan berkolaborasi dengan pihak sekolah. Proses seleksi dilakukan oleh pihak sekolah, terutama guru, karena mereka lebih mengenal keadaan peserta didik secara langsung. Sedangkan metode "tidak

memberikan harapan" maksudnya adalah bahwa tim Smadha Peduli tidak memberikan janji kepada pihak sekolah bahwa bantuan akan diberikan secara terjadwal, karena sumber dana yang diperoleh bersifat sukarela. Besarnya bantuan yang diberikan disesuaikan dengan besarnya dana yang terkumpul di komunitas, dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran yang dituju.

Harapannya, komunitas alumni kelak memiliki program yang merupakan program yang akan dilaksanakan setelah sistem komunitas dianggap stabil. Salah satu program lanjutan tersebut adalah dengan mendirikan badan usaha, seperti koperasi. Badan usaha tersebut akan dijalankan oleh para anak asuh langsung. Selain memberikan bantuan material, komunitas juga memberikan pendidikan tentang kewirausahaan kepada para anak asuh. Hasil yang diperoleh dari badan usaha akan digunakan untuk kepentingan bersama.

Melalui langkah kecil gerakan alumni peduli, harapannya dapat berimplikasi pada pihak alumni dan pembiayaan pendidikan. Bagi alumni, akan muncul nilai memiliki atas kontribusinya. Bagi dunia pendidikan, gerakan alumni akan berkontribusi pada pembiayaan pendidikan baik pada ranah infrastruktur maupun spesifik kepada peserta didik. (*MF*)

PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI MANAJER SEKOLAH

Imaniah Kusuma Rahayu

Pro kontra aturan sekolah masuk pukul 05.00 pagi di NTT terus bergulir. Awalnya, Gubernur NTT menyampaikan secara lisan kepada kepala Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah terkait aturan tersebut. Aturan yang dimaksud adalah masuk sekolah pukul 05.00 pagi di NTT. Akan tetapi, belum semua sekolah menerapkan aturan ini. Aturan tersebut baru diterapkan di beberapa SMA dan SMK di Kota Kupang. Sekolah-sekolah yang sudah menerapkan diantaranya baru 10 sekolah, khususnya di Kota Kupang. Sekolah tersebut antara lain: SMA Negeri 1, 2, 3, 5, dan 6 Kupang serta SMK Negeri 1,2,3,4, dan 5 Kupang.

Gubernur menjelaskan bahwa kebiasaan bangun lebih pagi akan membangun disiplin dan membentuk etos kerja. Selain itu, gubernur juga menegaskan aturan tersebut penting untuk kemajuan sistem pendidikan di NTT.

Gayung bersambut, kepala dinas pun menyetujui aturan tersebut. Kepala dinas menambahkan bahwa aturan ini untuk melatih kedisiplinan anak-anak di NTT. Bahkan, kepala dinas meminta kepada wali murid dan masyarakat untuk mendukung kebijakan tersebut.

Aturan tersebut dinilai memberatkan siswa karena belum adanya kajian akademis terkait aturan tersebut. Banyak faktor perlu dipertimbangkan seperti faktor keamanan siswa/siswi saat perjalanan menuju sekolah, tersedianya transportasi yang aman,

jarak yang harus ditempuh siswa dan lain-lain. Hal ini tentu saja menyulitkan siswa/siwi.

Selain itu, kualitas pembelajaran lebih ditentukan pada kualitas pendidik, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, dan juga dukungan dari orang tua.

Alih-alih mengikuti aturan gubernur masuk sekolah pukul 05.00 pagi, dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, kerja sama yang baik perlu dilakukan seluruh anggota sekolah khususnya elemen-elemen penting sekolah agar ada inovasi dengan system dan manajemen yang efektif dan tepat sasaran. Elemen penting yang bertanggung jawab memimpin jalannya proses pendidikan adalah kepala sekolah. Tanggung jawab memberdayakan semua elemen sekolah berada di bawah naungannya.

Kepala sekolah perlu strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan melalui persaingan agar tercipta kerja sama. Kesempatan untuk meningkatkan profesi harus diberikan kepada tenaga kependidikan dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan dalam berbagai kegiatan penunjang program sekolah. Selain itu, para guru harus diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai pendidikan maupun pelatihan, seperti in house training, MGMP atau memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan pihak lain.

Hal-hal tersebut dirasa lebih efektif daripada meminta siswa/siswi untuk masuk sekolah pukul 05.00 pagi dengan berbagai persoalan dan belum adanya kajian akademis terkait aturan tersebut.

DUNIA PENDIDIKAN PERLU PEMIMPIN YANG BERTUMBUH

Rizky Widia Kardika

Dunia pendidikan sangat membutuhkan pemimpin yang bertumbuh untuk menghadapi tantangan modern dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan inklusif. Pemimpin yang bertumbuh dalam dunia pendidikan bukan hanya fokus pada hasil akademik siswa, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan siswa yang lebih luas. Pemimpin yang bertumbuh dalam dunia pendidikan dapat membantu mendorong pengembangan staf dan guru yang lebih baik, memperkuat hubungan antara siswa dan staf, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inovatif dan inklusif. Dengan dukungan dan bimbingan dari pemimpin yang bertumbuh, staf dan guru dapat mengeksplorasi ide-ide baru dan metode pengajaran yang lebih baik, serta terus meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani kebutuhan siswa yang beragam.

Dalam konteks dunia pendidikan yang semakin kompleks dan dinamis, pemimpin yang bertumbuh dapat membantu memperkuat kebijakan dan strategi pendidikan yang lebih baik. Pemimpin yang bertumbuh dapat membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan yang lebih luas, seperti organisasi masyarakat, perusahaan, dan institusi akademik, untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih komprehensif dan efektif.

Kepemimpinan bertumbuh dalam dunia pendidikan dapat membantu memperkuat karakter dan keterampilan siswa yang lebih

luas. Dengan fokus pada pengembangan karakter dan keterampilan, seperti kreativitas, kerja sama, dan kepemimpinan, pemimpin yang bertumbuh dapat membantu siswa untuk menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan di masa depan dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih baik. Dalam era digital dan globalisasi, pemimpin yang bertumbuh dapat membantu mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan dan kompetitif di pasar kerja yang semakin ketat.

Salah satu cara untuk menerapkan kepemimpinan bertumbuh dalam dunia pendidikan adalah dengan memperkuat kemitraan dengan orang tua, masyarakat, dan organisasi lokal. Kepemimpinan bertumbuh dapat membantu membangun hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pembuatan keputusan pendidikan. Ini dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya dan memperbaiki kualitas pendidikan di daerah.

Hal ini dapat dicapai dengan memberikan dukungan dan kesempatan untuk pengembangan profesional bagi staf dan guru. Pemimpin yang bertumbuh dapat membantu mendorong kolaborasi dan *sharing best practices* antara staf dan guru untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inovatif dan efektif bagi siswa.

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENDIDIK, MENINGKATKAN PERCAYA DIRI SISWA

Hayatun Nufus

Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering mendengar kata pemimpin atau kepemimpinan, bahkan sangat lekat dengan kegiatan kita. Dalam pemahaman secara umum, pemimpin adalah atasan atau orang yang mengarahkan, mengatur, dan membuat keputusan dalam sebuah organisasi. Berdasarkan buku yang ditulis Young (dalam Kartono, 2003) Kepemimpinan merupakan bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus.

Seorang pemimpin akan memiliki metode dalam menjalankan kepemimpinannya agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud. Metode tersebut bisa dipelajari secara formal maupun nonformal, namun terkadang kemampuan memimpin tidak didapatkan dalam Pendidikan formal melainkan secara lahiriah memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan atau pun mengajak orang lain. Kemampuan ini disebut dengan *softskill*.

Dalam dunia Pendidikan, kepemimpinan adalah hal yang penting, karena untuk mewujudkan tujuan Pendidikan dibutuhkan pemimpin yang mampu mengarahkan, mendorong, dan mengajak insan sekolah dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Pendidik merupakan pemimpin di dalam pembelajaran dan

diharapkan dapat menjadi suri teladan serta dapat memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak didiknya.

Dalam tulisan pada laman Kemenkeu RI, bahwa terdapat empat perilaku spesifik dari Kepemimpinan Transformasional yaitu *Credible*, artinya mempunyai sifat konsisten dan komitmen yang tinggi apa yang diucapkannya dengan yang diperbuat, *Creation Opportunities*, artinya menciptakan peluang bagi orang lain untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, *Caring*, artinya menunjukkan kepedulian kepada orang lain sehingga membuat bawahan merasa diakui menjadi bagian dari organisasi dan *Communication*, artinya mempunyai ketrampilan komunikasi yang baik dengan orang lain.

Perilaku *Credible*, artinya mempunyai sifat konsisten dan komitmen yang tinggi apa yang diucapkannya dengan yang diperbuat. Seorang pendidik mempunyai sifat yang tidak mudah terpengaruh terhadap pengaruh dari luar yang akan menjadikan dirinya tidak berkomitmen dalam menjalankan tugasnya serta tetap bekerja secara realistis. Di dalam mengajar, pendidik harus konsisten untuk mencerdaskan anak didik dan berkomitmen untuk menjalankan tugas sebagai pendidik agar terwujud capaian pembelajaran.

Perilaku selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yaitu *creation opportunities*, artinya menciptakan peluang bagi orang lain untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan. Pada perilaku ini peserta didik harus terbuka, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplor kemampuannya untuk menggali kemampuan yang terdapat pada diri siswa serta menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan.

Caring, artinya menunjukkan kepedulian kepada orang lain sehingga membuat bawahan merasa diakui menjadi bagian dari organisasi. Perilaku ini *caring* pendidik dapat memberikan rasa nyaman pada diri siswa sehingga peserta didik merasa dihargai dan dapat menimbulkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri membuat

siswa tidak merasa rendah diri dan siswa merasa diakui kemampuannya, hal ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan unjuk kemampuan yang dimiliki.

Seorang pendidik yang baik yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi atau *communication*, artinya mempunyai ketrampilan komunikasi yang baik dengan orang lain. Komunikasi yang baik akan menciptakan sebuah hubungan yang harmonis antara pendidik dengan peserta didik. Komunikatif artinya apa yang dibiicarakan dipahami dan mudah dimengerti oleh lawan bicara. Jika komunikasi terbangun dengan baik, siswa akan merasa dihargai dan dapat menerima dengan mudah apa yang dibicarakan oleh guru terutama dalam pembelajaran sehingga peserta didik memahami apa yang disampaikan.

KECERDASAN EMOSIONAL DAN SPIRITUAL DALAM KEPEMIMPINAN

Qurrota Ayu Neina

Pendidikan dapat dikatakan sebagai organisasi. Dalam organisasi pendidikan, pimpinan bertanggung jawab atas kelangsungan organisasi tersebut. Pendidikan sebagai salah satu organisasi nonbisnis dapat melakukan peningkatan kualitas SDM untuk mencegah agar tidak kalah dalam persaingan. Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah tentu tidak hanya cerdas secara intelektual namun lebih penting itu cerdas secara emosional dan cerdas spiritual bagi anak didiknya.

Kepemimpinan pendidikan merupakan bagian penting dari manajemen pendidikan yang meliputi perencanaan dan pengorganisasian. Peran utama kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan pendidikan dimaknai sebagai kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien (Junaidah, 2016).

Dalam konteks desentralisasi dan otonomi pendidikan, terdapat tiga model kepemimpinan yaitu, kepemimpinan transaksional, kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan visioner. Dalam organisasi pendidikan, pimpinan diharapkan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi lebih penting itu cerdas secara emosional dan cerdas spiritual. Goleman (2015) mengemukakan bahwa kecerdasan emosional (EQ) pada hakikatnya bertolak pada

hubungan antara perasaan, watak, dan naluri, yang bersumber pada sikap perilaku dan kemampuan emosional yang mendasarinya dan para pemimpin secara khusus memerlukan kecerdasan emosional sebab pemimpin tersebut merepresentasikan organisasi kepada masyarakat publik, melakukan interaksi dengan orang-orang di dalam organisasi dan di luar organisasi.

Melalui penelitiannya, Khaliq (2011) menyatakan bahwa makin tinggi tingkat kecerdasan emosional pimpinan maka akan makin tinggi pula kepemimpinan transformasionalnya. Dimensi kecerdasan emosional terdiri atas motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial, masing-masing berpengaruh signifikan terhadap kepemimpinan transformasional baik secara parsial maupun bersama-sama. Pendapat ini dikuatkan oleh Supriyanto (2012) yang menyatakan bahwa kecerdasan emosional yang meningkat akan memberikan pengaruh terhadap kepemimpinan transformasional. Makin tinggi tingkat kecerdasan emosional pemimpin, maka kepemimpinan transformasional yang diterapkan akan makin baik. Hal ini dikarenakan para pemimpin dan manajer secara khusus membutuhkan kecerdasan emosional yang baik karena mewakili organisasi publik.

Goleman (2015) menyatakan bahwa kecerdasan intelektual hanya memberikan kontribusi sebesar 20% sebagai faktor yang mempengaruhi kesuksesan dalam hidup dan 80% ditentukan oleh kekuatan lainnya. Selain itu, kemampuan intelektual saja tidak akan mampu bekerja dengan baik tanpa diimbangi dengan kecerdasan emosional. Faktor lain yang penting selain kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ) yaitu kecerdasan spiritual (SQ). Pada dasarnya, Spiritual Quotient (SQ) adalah kemampuan dasar dari seseorang yang berisikan pengalaman hidup, yang merupakan bagian dari kehidupan seseorang atau bahkan organisasi. Supriyanto (2012) mengemukakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki motivasi murni yang berlandaskan nilai-nilai spiritual yang tulus.

Melalui pidatonya, Jack Welch mengemukakan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin-pemimpin yang memiliki landasan spiritual untuk memimpin sebuah organisasi, baik kemasyarakatan maupun sosial. Pemimpin-pemimpin yang berhasil membawa perusahaan ke puncak kesuksesan adalah orang-orang yang memiliki integritas, terbuka, mampu menerima kritik, rendah hati, mampu memahami orang lain dengan baik, terinspirasi oleh visi, mengenal diri sendiri dengan baik, memiliki spiritualitas yang nondogmatis, dan selalu mengupayakan yang terbaik bagi diri sendiri dan orang lain. Para pemimpin yang sukses lebih mengamalkan nilai-nilai spritual.

Supriyanto (2012) menunjukkan hasil bahwa kecerdasan spiritual (SQ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepemimpinan transformasional. Hasil ini bermakna bahwa semakin meningkat tingkat kecerdasan spiritual, maka kepemimpinan transformasional akan semakin baik. Koefisien jalur bertanda positif mengindikasikan semakin meningkat tingkat kecerdasan emosional, maka akan mengakibatkan semakin baik pula kepemimpinan transformasional.

PEMIMPIN YANG AMANAH DAN TANGGUNG JAWAB DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Prasetyo Yuli Kurniawan

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan sebuah negara. Oleh karena itu, pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab sangat penting dalam dunia pendidikan. Seorang pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab tentu akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pendidikan bagi kemajuan suatu negara dan mampu memimpin secara baik dan benar.

Seorang pemimpin pendidikan yang amanah dan bertanggung jawab seharusnya memiliki integritas yang tinggi serta memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi akan mampu merancang dan menerapkan program-program yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara tersebut. Pemimpin yang amanah juga akan menjaga dan mengelola anggaran pendidikan secara transparan dan akuntabel. Tidak akan ada peluang kecurangan atau penyelewengan dana di bawah kepemimpinan seorang pembaharuan, pemimpin pendidikan yang amanah dan bertanggung jawab juga harus memiliki kemampuan dalam memimpin dan mengelola sekolah atau institusi pendidikan dengan baik. Kemampuan ini mencakup kemampuan dalam melakukan perencanaan strategis, mengelola sumber daya manusia, dan melakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran secara berkala.

Selain itu, pemimpin pendidikan yang amanah dan bertanggung jawab harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa serta guru. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membangun budaya akademis yang positif, menciptakan program-program ekstrakurikuler yang beragam, dan memastikan keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah.

Pemimpin pendidikan yang amanah dan bertanggung jawab juga harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan seluruh stakeholder pendidikan, termasuk siswa, orang tua, guru, serta pemerintah dan masyarakat komunikasi yang baik tersebut, pemimpin pendidikan dapat memahami harapan dan kebutuhan dari masing-masing stakeholder sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat untuk kemajuan pendidikan.

Selain itu, pemimpin pendidikan juga harus memahami dan memperhatikan perkembangan teknologi dan pemanfaatannya dalam dunia pendidikan. Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan operasional sekolah secara keseluruhan.

Selanjutnya pemimpin pendidikan yang amanah dan bertanggung jawab harus selalu membuka diri untuk belajar dan mengembangkan diri agar dapat memberikan yang terbaik bagi pendidikan. Dengan cara ini, pemimpin pendidikan dapat menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan yang positif bagi masyarakat.

KEPEMIMPINAN YANG BAIK DALAM MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH

Mei Fita Asri Untari

Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang rumit dan kompleks. Hal ini berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sistem persekolahan, peningkatan kualitas pendidikan yang menuntut manajemen pendidikan yang baik. Peran pemerintah dalam menyukseskan penyelenggaraan pendidikan adalah dengan memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Pengalokasian dana di pendidikan tidak lain adalah penanaman modal pada pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah memberikan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dikelola oleh Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab penyaluran anggaran ke pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab atas pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan Kementerian Pendidikan bertanggung jawab terhadap peruntukan/penggunaan anggaran. Setelah sampai di sekolah, diperlukan manajemen yang baik dari pihak sekolah untuk pengelolaan dana BOS tersebut. Sekolah memiliki kewenangan dan keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pengelolaan dana sekolah untuk mewujudkan

program sekolah dan kinerja sekolah yang baik asalkan tidak menyimpang dari aturan.

Manajemen keuangan merupakan salah satu bagian dari manajemen sekolah yang turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah merupakan proses mendayagunakan sumber dana yang didapatkan untuk pencapaian tujuan sekolah secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Manajemen keuangan di sekolah adalah tanggung jawab dari pihak sekolah dalam hal ini adalah kepala sekolah.

Kepala sekolah memiliki otoritas utama untuk menyiapkan langkah-langkah dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, penguasaan kecakapan kepemimpinan kepala sekolah menjadi hal yang sangat penting. Kecakapan kepemimpinan tidak lagi diukur dari keterampilan menyelenggarakan kegiatan operasional, melainkan kemahiran dan kemampuannya menggerakkan orang lain dalam organisasi. Menurut Sudarwan dalam Hastuti (2018) ada beberapa hal yang harus diperhatikan kepala sekolah dalam manajemen keuangan yaitu penetapan kriteria yang ketat untuk setiap perilaku mengajar guru, penetapan kriteria yang ketat untuk setiap perilaku belajar siswa; penetapan kriteria yang ketat untuk setiap kegiatan interaksi antara guru dan siswa; penyediaan buku-buku pembelajaran dan buku pelengkap; pemetaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang mendukung program inti sekolah; evaluasi keefektifan pembelajaran secara kontinu; pelembagaan program-program yang bersifat kompetitif; pelibatan orang tua atau wali siswa dalam mengontrol perilaku belajar di rumah; pengembangan budaya belajar; mendatangkan nara sumber sebagai kelompok teladan, dan kegiatan lain yang relevan.

Anggaran pendapatan dan belanja sekolah merupakan rencana yang diformulasikan untuk jangka waktu tertentu, serta lokasi sumber-sumber kepada setiap bagian aktivitas sekolah.

Kuangan sekolah merupakan sumber daya yang secara langsung menunjang keefektifan pengelolaan pendidikan. Maka dibutuhkan seorang pemimpin yang bijak dan mampu mengelola keuangan dengan baik. Keuangan sekolah dapat bersumber dari pemerintah, orang tua atau peserta didik, dan masyarakat baik yang mengikat maupun tidak mengikat. Pengelolaan keuangan sekolah tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan harus dikelola secara terorganisir. Kepala sekolah perlu mengkoordinasikan pengelolaan ini secara tepat, tidak asal beres laporannya. Untuk itu diperluaka organisasi pengelola yang baik untuk membantu kepala sekolah sebagai pemimpin. Organisasi pengelola anggaran sekolah dipimpin langsung oleh kepala sekolah dan diawasi oleh komite sekolah.

Organisasi pengelola keuangan atau anggaran sekolah terdiri atas (1) kepala sekolah menunjuk guru/bendahara sekolah yang bertanggung jawab dalam mengelola anggaran sekolah di tingkat sekolah; (2) Komite sekolah memantau dan mengawasi pelaksanaan penggunaan anggaran sekolah yang dilakukan oleh pihak sekolah; (3) bendahara menyimpan dan membayar ke pengguna atas perintah kepala sekolah. dengan demikian bendahara tidak dapat mengeluarkan tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah tentu harus memiliki kemampuan dalam merencanakan anggaran, mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Kemudian mempersiapkan anggaran dengan menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusinya, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Kepala sekolah juga harus mampu mengelola pelaksanaan anggaran, antara lain mempersiapkan pembukaan, melakukan pembelanjaan, transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah sangat diperlukan dalam manajemen keuangan di sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pola manajemen keuangan yang baik dan berbasis sekolah akan berpengaruh terhadap kinerja guru dan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Pengaruh dari pola manajemen keuangan yang baik diantaranya: (1) dukungan yang kuat dari orang tua dan masyarakat kepada sekolah, (2) lingkungan sekolah yang kondusif, (3) birokrasi sekolah yang kompak, (4) guru yang profesional dengan kompetensi yang tinggi dalam pembelajaran dan pendidikan, (5) materi, perlengkapan, dan fasilitas sekolah yang lengkap.

KEBIJAKAN PEMIMPIN YANG 'MANUT SAMA JURAGANNYA'

Zainal Arifin

Tidak bisa dinafikan, pendirian partai di Indonesia memang seperti investasi jangka panjang yang sangat menggiurkan. Bukan hanya Bangsa Indonesia baru saja diberikan investasi fakta memilukan, dari jawaban Ketua Komisi III DPR RI Bambang Pacul menggiurkan yang tak berani memutuskan undang-undang karena manut sama untuk mengatur juragannya. Politikus PDI Perjuangan kebijakan. Ada pula yang "langsung cair" investasi yang melalui istilah "restu pimpinan partai" untuk setiap rancangan undang-undang disahkan pencalonan. Nilai oleh legislatif. restu ini bisa berkisar 4-10 miliar

untuk maju dalam berbagai macam pencalonan, mulai bupati/walikota, gubernur, sampai nomor urut pencalonan legislatif.

Misalnya saja pencalonan bupati atau walikota di seluruh Indonesia. Bila nilai restu minimal dalam kisaran 4 miliar, dikalikan dengan jumlah kabupaten/kota yang berjumlah 416, maka nilai investasi dari "restu pimpinan partai" tiap lima tahun sekali sebesar 1,6 triliun. Bila angka tersebut dibagi per tahun, maka nilai kapital restu juragan partai mencapai 320 miliar per tahun atau setara 26 miliar per bulan.

Itu baru dari restu calon bupati/walikota, belum restu untuk gubernur, nomor urut 1 daerah pemilihan, atau transaksi-transaksi “di balik meja” yang kerap terjadi. Maka mendirikan partai bukan hanya perkara memperebutkan memenangkan peran politis, melainkan pula perkara investasi yang menjanjikan bermodalkan pencitraan dan jaringan. Tak mengherankan bila pimpinan-pimpinan partai akan berusaha mempertahankan dominasi mereka terhadap para anggotanya. Tidak *manut*, buang!

Kondisi inilah yang membuat pemerintahan di Indonesia itu seperti “demokrasi abal-abal”. Kelihatannya sih demokratis, tapi yang menentukan kebijakan tetap saja itu-itu juga. Tidak ada pimpinan yang benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Semua pimpinan bertekuk lutut di bawah kekuasaan juragan partai. Apakah ini juga menyentuh wilayah kepemimpinan pendidikan Indonesia. Tentu saja iya. Maka saran dari Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi, sangat jitu: bila ingin mengubah UU, demo saja di rumah Ketum Partai, lebih efisien.

Peran pimpinan partai juga sangat terlihat ketika Menteri Nadiem digoyang isu resufle kabinet. Nadiem dianggap gagal dalam menangani dunia pendidikan saat pandemi, calon yang digadagadag pun sudah muncul dalam pemberitaan media. Tapi Nadiem tak banyak bicara, tidak juga melobi presiden, tapi cukup mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan hasilnya Nadiem selamat dalam resufle kabinet beberapa hari berikutnya.

Feodal

Melihat fakta praktik feodalisme dalam kuat mengakar dalam bangsa Indonesia. Artinya pendidikan Indonesia sangat bergantung pada partai apa yang memenangkan pemilu. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ideologinya memang sama-sama Pancasila, tapi warna pemerintahannya bergantung dari partai apa yang memenangkannya; bergantung selera juragan partainya. Bila partai tidak mutlak menguasai parlemen maka para juragan akan berkoalisi untuk saling mengamankan dengan bagi-bagi kekuasaan.

Pendidikan sebagai bagian dari komoditas politik, pada akhirnya bergantung pada kebijakan-kebijakan politik yang diambil partai. Bila partai cenderung pada kebijakan pembangunan material, maka yang dibangun selama kekuasaan partainya adalah sarana dan sarana pendidikan. Tapi bila partai condong pada pengembangan sumberdaya manusia, maka yang dibangun adalah sistem yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

Yang perlu disadari, feodalisme meskipun terlihat sudah hilang, di banyak negara masih tetap terbentuk. Bahkan, negara sekuat Amerika Serikat pun laju kekuasaannya bergantung pada patungan para kepentingan para feodalis yang memiliki modal. Kekuasaannya juga akan turun dari beberapa trah keluarga atau kepanjangan tangan dari trah keluarga yang pada akhirnya memimpin secara bergantian. Mungkin terlihat demokratis, tapi sebenarnya, kekuasaan itu hanya berpindah dari satu keluarga ke keluarga berikutnya, dan bergantian selamanya.

Bila ditanyakan, akankah pendidikan di Indonesia jadi setara atau unggul dari negara-negara maju di Eropa sana? Ada sebuah kata bijak yang perlu kita resapi sungguh-sungguh dalam hati kita; *mengendalikan orang bodoh jauh lebih mudah daripada mengendalikan orang-orang pintar*. Maka marilah kita belajar memahami cara berpikir pemimpin kita supaya kita lebih ikhlas menerima kenyataan. ***

GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH PADA KURIKULUM MERDEKA BELAJAR

Uki Hares Yulianti

Kualitas sekolah salah satunya bergantung pada kepemimpinan dari kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi di sekolah, sebagai pengambil keputusan dalam segala hal untuk kebaikan sekolah yang dipimpinnya. Bisa dikatakan kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didiknya. Seorang pemimpin tentunya harus memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menjalankan sekolahnya, seperti disiplin, bertanggung jawab, cerdas, kreatif dan menjadi sosok yang baik serta patut dicontoh bagi organisasi yang dipimpinnya.

Kurikulum merdeka sangat berbeda dengan kurikulum-kurikulum yang ada sebelumnya. Kurikulum merdeka belajar merupakan jawaban dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 dimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran mengarah guru dan peserta didiknya untuk mandiri, memiliki kebebasan, dan inovatif. Kapabilitas dalam merespon tantangan dan perkembangan zaman, dapat menjadikan standar kualitas sekolah yang mengimplementasikan Merdeka Belajar guna melahirkan peserta didik yang berdaya saing.

Dalam menciptakan merdeka belajar, yang pertama dilakukan yaitu kepala sekolah harus memiliki peran sebagai pemimpin dan yang kedua kepala sekolah juga berperan sebagai

manajer. Kepala sekolah dikatakan sebagai pemimpin maka kepala sekolah dapat memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan sekolah. Merdeka belajar dapat memberikan peluang bagi kepala sekolah dalam mengoptimalkan dan dengan keleluasaan mengelola potensi sumber daya sekolah dan menjalin kemitraan untuk memenuhi sarana prasarana yang mendukung dan keterlibatan proses pembelajaran guna menghasilkan lulusan yang sesuai.

Esensi dari merdeka belajar perlu dimulai oleh kompetensi kepala sekolah dalam memahami serta menguasai kompetensi dasar dari guru (Mustagfiroh, 2020). Oleh karena itu peranan kepemimpinan kepala sekolah sangat penting untuk menjadikan guru sebagai penggerak proses pembelajaran guna menciptakan merdeka belajar di sekolah.

Kepemimpinan kepala sekolah yang tepat pada kurikulum merdeka dapat diwujudkan dengan gaya kepemimpinan yang berfokus pada kolaborasi, partisipasi, dan pemberdayaan semua *stakeholder* di sekolah. Gaya kepemimpinan tersebut disebut sebagai gaya kepemimpinan transformasional. Pada gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai pemimpin dan manajer, tetapi sebagai penggerak dan motivator dalam mengubah dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

Gaya kepemimpinan transformasional yang dapat dilakukan kepala sekolah pada kurikulum merdeka belajar saat ini sebagai berikut.

1. Kolaboratif

Kepala sekolah harus dapat bekerja sama dengan guru, wali murid, siswa, dan masyarakat sekitar dalam mengembangkan kurikulum merdeka yang relevan. Kepala sekolah juga berkolaborasi dengan guru dan siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan mendukung program *project based learning* yang melatih kemandirian siswa dalam memecahkan masalah.

2. Inspiratif

Kepala sekolah menginspirasi dan memotivasi *stakeholder* di sekolah untuk terlibat dalam pengembangan kurikulum. Memberikan contoh yang baik kepada guru, tenaga pendidikan, siswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

3. Pemberdayaan

Kepala sekolah memberdayakan guru dan stakeholder di sekolah untuk mengembangkan inisiatif dan ide-ide baru dalam pengembangan kurikulum.

4. Peduli

Kepala sekolah peduli dan responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan siswa serta kondisi lokal, sehingga dapat mengembangkan kurikulum yang relevan dan merdeka. Menyiapkan sarana dan prasarana dengan mengelola manajemen keuangan di sekolah yang ada dalam proses pembelajaran pada kurikulum merdeka.

Gaya kepemimpinan demokratis juga diperlukan pada kurikulum merdeka saat ini. Kepala sekolah dapat melibatkan semua stakeholder dalam pengembangan kurikulum. Kepala sekolah memfasilitasi diskusi dan konsultasi untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan, sehingga semua stakeholder merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab dalam pengembangan kurikulum. Menerima masukan, saran, dan kritik dari semua stakeholder kemudian bersama-sama menemukan jalan tengah dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis dan transformasional pada kurikulum merdeka dapat membawa perubahan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Hal ini dapat menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa secara holistik.

Transformasi Pendidikan pada Masa Pascapandemi



Buku ini berisi tentang transformasi pendidikan pada masa pascapandemi. Topik itu hadir sebagai upaya untuk menjelajahi perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan seiring dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia secara luas. Pandemi COVID-19 telah menghadirkan tantangan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Sistem pendidikan menjadi salah satu sektor yang terdampak paling signifikan. Pembatasan fisik, penutupan sekolah, dan pembatasan interaksi sosial telah memaksa kita untuk mencari solusi inovatif dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.

Buku ini menggali secara mendalam transformasi yang terjadi pada pendidikan pada era pascapandemi. Penulis mengeksplorasi dampak pandemi terhadap pembelajaran daring, penyesuaian kurikulum, peran teknologi dalam pembelajaran, dan transformasi dalam pola pikir dan paradigma pendidikan. Dalam buku ini, pembaca akan menemukan pemikiran kritis dan analisis mendalam tentang berbagai aspek transformasi pendidikan pascapandemi.

Wajah pendidikan pascapandemi bergantung pada setiap pundak masyarakat Indonesia. Setiap individu harus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itulah, mahasiswa S3 Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa Pascasarjana UNNES, menyumbangkan gagasan tulisnya dalam bentuk artikel dengan tema besar "Manajemen Pendidikan Pascapandemi Covid-19". Laksana embun di padang pasir, semoga buku ini setidaknya sedikit bisa memberi sumbangan bagi pendidikan di Indonesia.



Perum Green Village kav. 115, Ngijo,
Gunungpati, Semarang - Jawa Tengah
email: ciptaprimanusantara@gmail.com
web: <http://www.penerbitciprinus.com>

ISBN 978-623-380-311-3 (PDF)



9 786233 803113